

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pendidikan yang ada di Indonesia telah memperlihatkan kepada kita bahwa pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan pembenahan. Pada dasarnya perubahan-perubahan terhadap Hal-hal yang mempengaruhi pendidikan tersebut adalah semacam konsekuensi logis dari adanya dinamika yang terjadi dalam dunia politik dan akhirnya melahirkan sesuatu yang baru (<http://edukasi.kompasiana.com>). Upaya perbaikan kualitas pendidikan juga terus menerus dilakukan baik secara umum maupun dengan cara-cara yang baru. Hal tersebut lebih berfokus kembali setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan mutu pendidikan nasional pada setiap jenjang pendidikan. Menteri pendidikan nasional Prof. Dr. H. Abdul Malik Fadjar, M.Sc, juga mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional” pada tanggal 2 Mei 2002 (<http://www.geocities.ws>).

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Hal ini senada dengan apa yang telah diserukan oleh UNESCO bahwa suatu bangsa yang ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan seluruh bangsanya maka harus dimulai dari pendidikan. Menurut ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa manusia membutuhkan

pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Pendidikan merupakan proses belajar-mengajar agar orang dapat berfikir secara arif dan bijaksana. Pendidikan dapat berlangsung dimana saja, baik dilingkungan formal yaitu sekolah, maupu dilingkungan informal, yaitu keluarga dan masyarakat. Sekolah sebagai suatu lembaga lingkungan, yakni lingkungan pendidikan yang menyediakan berbagai kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan belajar. Dengan berbagai kesempatan belajar itu, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik diarahkan dan didorong kepada pencapaian tujuan yang dicita-citakan.

Pendidikan harus mampu membangun masyarakat yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang suka belajar dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan tersebut disusun dalam suatu kurikulum yang pada gilirannya dilaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran (Hamalik, 2001:3).

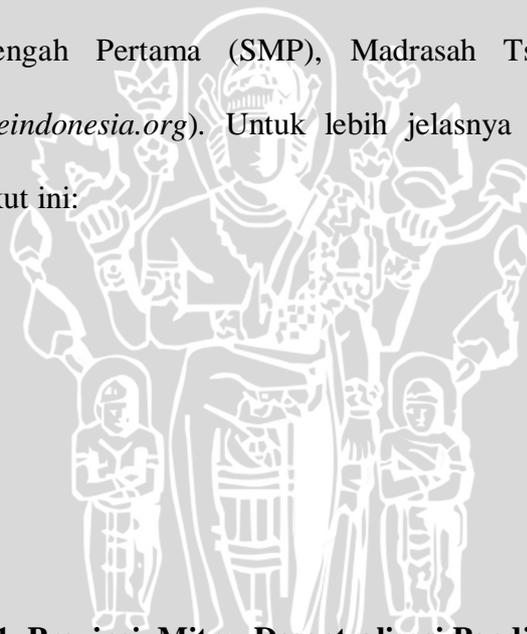
Dalam menghadapi era globalisasi industri dan perdagangan bebas yang akan datang, berbagai negara didunia, termasuk Indonesia berbenah diri mempersiapkan sumber daya manusianya. Inovasi didalam pendidikan sangat diperlukan utamanya dalam peningkatan mutu pendidikan. Problem pendidikan di Indonesai tidak sekedar menyangkut kualitas. Kesenjangan

antar daerah juga menjadi masalah serius yang harus di hadapi. Salah satu upaya untuk memecahkan persoalan tersebut adalah program pendidikan yang terdesentralisasi.

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik secara regional maupun secara internasional (Hadiyanto, 2004: 63).

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam rangka membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dalam konteks desentralisasi Melalui *United States Agency for International Development (USAID)* merancang program 5 tahun yang dirancang untuk menunjang peningkatan pendidikan dasar yang bermutu dan relevan di Indonesia dan disebut dengan program *Desentralized Basic Education (DBE)*. Diperkenalkan sejak empat tahun lalu, program DBE baru bisa direalisasikan sejak 2005. Pelaksanaan program yang mengeluarkan dana senilai USD 157 juta itu berlangsung selama kurun 2005-2010. Inisiatif yang pada awalnya dilontarkan presiden Amerika Serikat George W. Bush itu merupakan respons positif untuk pemerintah Indonesia, sekaligus komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan.

DBE dijalankan melalui *United States Agency for International Development* (USAID). Program ini dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Kokesra) bekerjasama dengan 28 pemerintah kabupaten atau kota yang tersebar di delapan propinsi. Di antaranya, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam dan DKI Jakarta. Di daerah-daerah tersebut, DBE bekerjasama dengan 1.042 sekolah yang meliputi sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) (<http://www.dbeindonesia.org>). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Provinsi Mitra Desentralisasi Pendidikan Dasar USAID/Indonesia (Program DBE)

Sumber : <http://www.dbe-usaid.org/>

Area yang dicakup program desentralisasi pendidikan dasar USAID Indonesia (program DBE) ialah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Program ini berlangsung mulai tahun 2005 sampai 2010 dan diharapkan akan membantu meningkatkan pendidikan untuk lebih dari 2.400 sekolah dan

lebih dari 250 ribu siswa di 100 kabupaten/kota. Program DBE tersusun atas 3 komponen, yaitu DBE1, DBE2, dan DBE3.

Tujuan dari program ini ialah peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia melalui tiga komponen kegiatan yang saling berintegrasi, yaitu: 1) desentralisasi manajemen dan tata pelayanan pendidikan yang lebih efektif (DBE1), 2) peningkatan kualitas belajar mengajar (DBE2), serta 3) peningkatan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah melalui kecakapan hidup dan keterampilan vokasional (DBE3). Dengan program DBE mampu mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah melalui serangkaian pendekatan inovatif yang dirancang untuk memperkuat pelatihan guru dan meningkatkan lingkungan belajar di sekolah.

DBE 2 bekerjasama dengan USAID Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan sektor publik maupun swasta lainnya untuk mengembangkan alternatif sistem pengembangan profesional guru yang modern, memperkuat kapasitas pendidik dan administrasi untuk memulai, memfasilitasi, dan mempromosikan perbaikan sekolah diseluruh wilayah Indonesia. DBE 2 mengimplementasikan beberapa strategi untuk meningkatkan sistem pendidikan dasar di Indonesia, termasuk didalamnya: pelatihan guru terdesentralisasi yang diakreditasi oleh universitas; kepemimpinan dan manajemen pembelajaran; instruksi audio interaktif (IAI) untuk guru dan siswa Taman Kanak-kanak (TK), pusat sumber belajar gugus, kerjasama

dengan universitas di Indonesia dan Amerika Serikat, teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat pembelajaran, dan, kerjasama dengan sektor swasta untuk memperluas dampak proyek.

Di kabupaten Nganjuk ide peningkatan mutu pendidikan telah diperkenalkan dalam banyak kurikulum dan program pelatihan serta telah diterapkan oleh para kepala sekolah dan guru di sekolah masing-masing.

Sayangnya dari desain dan implementasinya masih sama dengan sebelumnya, hal ini sama halnya dengan yang diungkapkan salah satu staff

Pendidikan Tk, SD dan PLB Nganjuk sebagai berikut :

Sebelum menerapkan program pendidikan yang terdesentralisasi yang merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Pemerintah kabupaten nganjuk melalui dinas pendidikan telah beberapa kali mencoba melakukan suatu perubahan didalam peningkatan kualitas mutu pendidikan diawali dengan kurikulum yang disebut dengan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) tahun 1975, kemudian muncul istilah TIU, TIK, PPSI, Satuan Pelajaran, Remedial, Pengayaan, dan sebagainya. Sampai dengan digantinya kurikulum GBPP dengan Kurikulum 1984, namun hasilnya sama saja karena , masih teramat banyak guru yang tidak mampu menyusun TIK dengan benar, bahkan masih banyak guru yang tidak pernah membuat satuan pelajaran selanjutnya muncul kurikulum 1994 namun hasilnya sama tidak pernah ada perubahan yang mendasar pada dua kurikulum terakhir terhadap kurikulum 1975.

Sebagaimana diungkapkan staff bagian Pendidikan Tk, SD dan PLB Nganjuk diatas permasalahan pendidikan di kabupaten Nganjuk terletak pada Perubahan kurikulum yang sejak tahun 1947 sampai sekarang membuat pusing para pendidik. Mereka dipusingkan dengan pembuatan program kurikulum dan metode pembelajaran yang hampir

setiap tahun berubah. Namun ketidaksiapan dan kedikmampuan guru maupun sarana dan prasarana di kabupaten Nganjuk menjadi penghambat dalam pengembangan kurikulum tersebut sehingga perubahan yang dicanangkan menjadi sama saja.

Selain dari itu, permasalahan kurikulum 1994 yang diterapkan di kabupaten Nganjuk baik dari desain kurikulum maupun dari implementasi masih sama dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1994 adalah kurikulum nasional terakhir yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan dinyatakan secara nasional untuk mengakhiri dominasi pemerintah pusat dalam dunia pendidikan.

Ketika tahun 2001 muncul MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) ditatakan kepada para Kepala Sekolah, para pemimpin ini pun banyak sekali yang kelabakan tidak mampu menyusun program sekolahnya sendiri yang seharusnya mandiri. Selanjutnya pada tahun 2004 pemerintah kabupaten Nganjuk juga menerapkan gagasan kurikulum baru dari luar negeri KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), namun Paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada *teacher oriented*, namun seperti yang telah dilakukan saat ini pemerintah kabupaten Nganjuk mengantinya dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) sesuai dengan anjuran pemerintah, namun Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP, menjadikan kurikulum ini menjadi sama saja didalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nganjuk. (Sumber: Wawancara, senin 22 oktober 2012 pukul 10.00 WIB).

Melihat permasalahan yang ada, pemerintah Kabupaten Nganjuk berinisiatif menerapkan program DBE2 dengan fokus pada pelatihan ataupun workshop kepada guru mata pelajaran khususnya bidang : IPA, IPS, MTK dan B.indonesia), dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang aktif *Learning* , serta pembinaan disektor pembelajaran di dalam

maupun diluar kelas, serta meningkatkan profesionalisme dan kreativitas guru. Dalam hal ini USAID sebagai pendukung program tersebut menunjuk Koordinator Distrik atas rekomendasi Kementerian Pendidikan Nasional yang meliputi: PC (*Provinsi Coordinator*) yang bertujuan bagaimana merumuskan tujuan dari program DBE2 tersebut, 2 MTT (*Master Teacher Trainer*) yang dalam hal ini bertugas untuk mendampingi dalam kegiatan pelatihan dan menyiapkan serta mengevaluasi setiap kinerja guru mata pelajaran, PBS (Pemandu Bidang Studi), yang bertugas untuk memberikan pengarahannya dan bagaimana menciptakan kreativitas dalam pembelajaran melalui Kelompok Kerja Guru (KKG).

Program DBE 2 di Kabupaten Nganjuk berkembang lebih jauh untuk menciptakan sistem sekolah berbasis gugus yang efektif untuk mendukung pengembangan metode pembelajaran berkesinambungan bagi guru. Dengan dunia pendidikan yang lebih terkonsep, dalam lima tahun sudah bisa kerja secara *Local Teacher Training*. Selain itu setiap gugus memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan profesi guru di Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) serta aset berupa sumber daya manusia yang sudah terlatih yakni *master teacher trainner* (MTT), pemandu bidang studi (PBS), tim teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Di Kabupaten Nganjuk, program DBE 2 USAID masuk sejak Desember 2006 dan sudah bermitra di 2 kecamatan di Kabupaten Nganjuk yakni, Kecamatan Kertosono dan Tanjunganom. Dan ratusan siswa mampu di didik dengan konsep pengembangan pendidikan yang lebih terarah, serta mampu mengembangkan sistem pembelajaran dengan jarak jauh secara online antar

kecamatan (*Sumber: Wawancara, senin 22 oktober 2012 pukul 10.00 WIB*).

Hal tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan program pendidikan khususnya pendidikan dasar dikabupaten Nganjuk secara realitas fakta tersebut dapat kita lihat pada table 1 dibawah ini.

Tabel 1.
Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2009-2011

No	Indikator Kinerja	Satuan	2009	2010	2011
1	APK SD	%	97,49	112,94	111,53
2	APK MI	%	12,06	8,70	11,86
3	APM SD + MI	%	98,60	98,55	100,35
4	APK SMP/MTs	%	84,33	104,63	106,56
5	APM SMP/MTs	%	80,22	80,41	82,31
6	Angka Melanjutkan ke SMP/ MTs	%	90	???	83,45

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.

Program DBE2 ini memberikan pembinaan di sektor pembelajaran serta menciptakan kreativitas dalam hal proses belajar mengajar oleh para guru didalam kelas, melalui pelatihan dan workshop yang dilaksanakan secara kontinue. Dengan adanya program DBE2 ini diharapkan pembinaan disektor pembelajaran khususnya pada tingkat sekolah dasar dapat merubahn perilaku guru dalam mengajar, perubahan perilaku siswa serta penciptaan lingkungan yang memungkinkan siswa belajar aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Namun dalam pelaksanaan program ini juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain menyesuaikan jadwal pengawasan yang dilakukan oleh seorang MTT (*Master Teacher Trainer*) terhadap kegiatan

kedinasan, karena seorang MTT yang telah ditunjuk oleh Koordinator distrik juga merupakan pegawai sekolah sekaligus seorang aparatur pemerintah. Selain itu kendala berikutnya yang dihadapi adalah penyesuaian sumber daya manusia (SDM) terhadap kemajuan teknologi dalam hal ini adalah penggunaan IT.

Maka dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“EVALUASI DAMPAK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR”** (Studi Tentang Program *Decentralized Basic Education (DBE2)* di Kabupaten Nganjuk).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, peneliti memiliki beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus dari penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program *Decentralized Basic Education (DBE2)* dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimanakah dampak program *Decentralized Basic Education (DBE2)* dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Nganjuk?
3. Apa sajakah faktor penghambat dan faktor pendukung program *Decentralized Basic Education (DBE2)* di Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat beberapa perumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan Dasar di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan Dasar di Kabupaten Nganjuk.

D. Kontribusi Penelitian

Diharapkan hasil dari adanya penelitian tentang penerapan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis serta berguna bagi pihak terkait antara lain:

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar, sehingga nantinya dikemudian hari akan lahir inovasi dalam dunia pendidikan yang relevan dengan kondisi saat ini.

2. Secara Praktis

Sebagai Bahan informasi dan masukan bagi dunia pendidikan terkait dengan penerapan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah, agar dapat mengaplikasikan program tersebut sesuai dengan tujuan awalnya.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disajikan dalam lima pokok bahasan yang semuanya merupakan satu kesatuan, diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 ini terdiri dari lima subbab. Pertama, mendeskripsikan Latar Belakang Kedua, Perumusan Masalah Penelitian. Ketiga, Tujuan Penelitian Keempat, Kontribusi Penelitian. Kelima, sistematika pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan dan mencantumkan teori-teori yang berkaitan dengan topic penelitian pertama, pengertian administrasi publik serta peran adminitarasi publik. Kedua

pengertian kebijakan publik yang terdiri dari tahap-tahap kebijakan, evaluasi kebijakan, fungsi evaluasi kebijakan publik, jenis-jenis evaluasi kebijakan publik, evaluasi dampak kebijakan. Ketiga, pengembangan sumberdaya manusia pendidikan. Keempat mutu pendidikan terdiri dari faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Kelima konsep desentralisasi pendidikan beserta kelebihan dan kelemahan desentralisasi pendidikan. Keenam *Desentralized Basic Education* (DBE), sejarah singkat visi, misi program kerja DBE beserta prinsip dasar *Decentralized Basic Education* (DBE). Ketujuh DBE2.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini menjelaskan dan menggambarkan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi atau situs penelitian, jenis data dan sumber data, teknik yang dipakai pada proses pengumpulan data, analisis data, serta instrument penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari tiga subbab. Pertama, akan menguraikan tentang gambaran umum pemerintah kabupaten Nganjuk yang meliputi deskripsi umum kabupaten Nganjuk. Kedua, menguraikan hasil dan fokus penelitian mengenai pelaksanaan program Decentralized Basic Education (DBE), dampak program

Decentralized Basic Education (DBE2) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Nganjuk, faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Decentralized Basic Education (DBE2) di kabupaten Nganjuk. Ketiga, pembahasan hasil dan fokus penelitian mengenai pelaksanaan program Decentralized Basic Education (DBE), dampak program Decentralized Basic Education (DBE2) faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Decentralized Basic Education (DBE2) di kabupaten Nganjuk.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang disampaikan oleh peneliti terkait dengan permasalahan yang diangkat. Di dalam kesimpulan diuraikan hal-hal penting mengenai pelaksanaan program Decentralized Basic Education (DBE), serta dampak program Decentralized Basic Education (DBE2) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Nganjuk secara garis besar dan umum. Sehingga dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberi saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi dunia pendidikan khususnya kabupaten nganjuk dalam rangka peningkatan mutu pendidikan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Administrasi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan (*Science*) karena telah dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasikan menjadi suatu rangkaian teori. Administrasi dipandang sebagai ilmu, karena mempunyai sosok *subjek matter* yang tersusun dengan rapi dan terorganisasi dengan baik. Bahkan teori-teori administrasi telah diuji dalam praktek sehingga terus berkembang.

Leonard D. White dan Syafie (1999), dalam Pasalog (2007:2) mendefinisikan administrasi adalah “suatu proses yang umum ada pada usaha-usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil”. Dunshire (1991) dalam Keban (2004:2) mendefinisikan “administrasi sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik”. Dimock & Dimock (1992) dalam pasalog (2007:3) , “mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara

mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur manajemen”.

Menurut pendapat Zauhar (2001:6) “administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Dalam konteks pemerintahan, istilah administrasi publik merupakan istilah yang sering digunakan. Ruang lingkupnya yang luas mencakup ilmu sosial dan ilmu sosial lainnya”.

Dari beberapa definisi tersebut diatas, maka penulis mencoba merumuskan definisi administrasi untuk ikut berpartisipasi dalam merumuskan definisi administrasi sebagai bahan diskusi selanjutnya. Adapun yang dimaksud administrasi dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : “ Administrasi adalah serangkaian kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah disepakati untuk mencapai tujuannya secara efektif, efisien dan rasional”.

2. Pengertian Publik

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa inggris “*public*” yang berarti umum , rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Nampaknya kata “publik” diterjemahkan oleh beberapa kalangan berbeda-beda sebagaimana kepentingan mereka. Misalnya kata “*public administration*” diterjemahkan menjadi “administrasi negara”.

Syafi’ie dkk.(1999: 18), mengatakan bahwa publik adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan,

harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

Frederickson (1997:46), menjelaskan konsep “publik” dalam lima prespektif, yaitu :

- 1) Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat.
- 2) Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri.
- 3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui “suara”.
- 4) Publik sebagai konsumen, yaitu yaitu konsumen yang sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik, dan
- 5) Publik sebagai warga Negara, yaitu warga negara dianggap sebagai politik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting.

3. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan suatu seni dan ilmu yang ditunjukkan untuk mengatur dan melaksanakan tugas yang ditentukan, pengertian administrasi publik ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh para ahli berikut ini.

Administrasi Publik menurut Chandler dan plano (1988) dalam Keban (2004:03) administrasi publik mempunyai definisi yaitu :

”Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinir untuk memformulasikan, implementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusia dan materi untuk mencapai tujuan pemerintah serta Administrasi Publik sebagai seni dan juga sebagai kajian intelektual dari pengelolaan dalam urusan kenegaraan. Kesimpulan penting yang dapat diambil bahwa administrasi publik merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan dalam konteks kenegaraan.

4. Peran Administrasi Publik

Administrasi publik yang secara umum dipresepsikan sebagai pekerjaan pada pemerintah, memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam suatu negara, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan para ahli berikut ini.

Frederik A. Cleveland (1989) dalam Keban (2004:15), menjelaskan :

”bahwa peran administrasi publik sangat vital dalam memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Menurut beliau, administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan bagi pemerintah manakala dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi tersebut”, sehingga apa yang disebut ”*Organized democracy*”.

Gray (1989) dalam Pasalog (2007: 18), menjelaskan peran administrasi publik dalam administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut:

Pertama, Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara

berkeadilan, *Kedua*, Administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia, *Ketiga*, administrasi publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

Keban (2004:15), menjelaskan bahwa peran administrasi publik dapat diamati secara jelas dari dinamika pengaturan dan perubahan jenis departemen, penempatan menteri dan semua jajaran dalam jabatannya, pengaturan persyaratan jabatan, mekanisme pengangkatan atau pemilihan dan pemberhentian para gubernur, bupati dan walikota, serta semua sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor pada tingkat lokal. Peran tersebut dapat dirasakan ketika kualitas para birokrat kunci atau eksekutif seperti, menteri dan semua pejabat eselon yang ada dipusat atau didaerah tidak memadai, penggantian struktur dan fungsi mulai dari pusat sampai daerah secara tidak responsif. Pengaruh negatif yang paling dirasakan terjadi ketika berbagai kesalahan dan pengaturan struktur organisasi publik, proses manajemen dan kebijakan publik yang kurang rasional, serta rendahnya etika dan moral birokrat. Pada umumnya dinegara berkembang peran negatif administrasi publik masih nampak dan menjadi salah satu sumber keterbelakangan.

Peran administrasi publik pada dasarnya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam administrasi publik diupayakan tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara input dan output. Peran tersebut juga dapat dirasakan ketika kualitas para birokrat kunci atau eksekutif seperti menteri dan semua eselon yang ada dipusat atau daerah tidak memadai, penggantian struktur dan fungsi birokrasi mulai dari pusat sampai di daerah secara tidak responsif. Mungkin pengaruh negatif yang paling dirasakan adalah ketika terjadi berbagai kesalahan dalam

pengaturan struktur organisasi publik, proses manajemen dan kebijakan publik yang kurang rasional, dan rendahnya etika dan moral birokrat.

Secara khusus administrasi publik di fokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksana dari kebijakan publik. Artinya administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik maupun penyediaan barang-barang publik.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu opsi untuk mengatasi sebuah masalah, banyak literatur yang mendefinisikan tentang kebijakan publik diantaranya.

Kebijakan adalah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2004:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

1. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa: (1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan

publik, dan (3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik dibuat untuk dilaksanakan dalam bentuk rill, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) Kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik, yaitu:

- a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
- c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat diperlukan.
- e. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat pemerintah (Agustino, 2006:9).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan

atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan suatu fenomena yang kompleks karena ada variasi kompleksitas, melibatkan multiaktor dengan beragam kepentingan dimana masing-masing pihak mencermati kebijakan dari perspektifnya masing-masing. Mengingat kompleksitas konteks kebijakan publik, maka pemerintah sebagai otoritas pihak yang mengambil keputusan dituntut untuk mampu memilih alternatif keputusan secara tepat dengan berorientasi pada sebesar mungkin kepentingan masyarakat.

1. Tahap-tahap Kebijakan

Dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahapan penting antara lain Dunn (1994) dalam Keban (2004:62), penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), Implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assessment*). Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Hakekat permasalahan ditentukan melalui suatu prosedur yang seringkali dikenal dengan nama “*problem structuring*”.

Pada tahapan formulasi kebijakan, para analis mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan suatu prosedur yang disebut “*forecasting*”

dimana konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan. Adopsi kebijakan merupakan tahap berikutnya, dimana ditentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan setelah melalui proses rekomendasi.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. Pada tahap ini, proses monitoring dilakukan. Dan tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap tersebut proses evaluasi diterapkan.

Ada juga model "*policy making process*" yang diungkapkan oleh Shafritz dan Russell (dalam Keban 2004: 63) yang terdiri atas (1) agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) implementasi, (4) evaluasi program dan analisis dampak; dan (5) feedback, yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses ini menyerupai suatu siklus.

2. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu dan terhadap kegiatan yang sedang direncanakan atau sedang berlangsung atau sudah selesai pelaksanaannya, serta dapat bersifat internal maupun eksternal mencakup antara lain mengenai penilaian atas dampak kolektif baik penilaian itu bersifat positif maupun negatif, dari semua atau sebagian kegiatan yang telah dilakukan, pada lokasi dan kelompok sasaran yang berbeda-beda serta deskripsi keluaran dan hasil atau manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat (Suzetta, 2008:83)

Menurut Laster dan Stewart (dalam Agustino,2006:185) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Selain itu ada pengertian lain dari evaluasi yaitu menurut Stufflebeam, evaluasi adalah : *Process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives*. Dalam evaluasi ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu : adanya sebuah proses (*process*), perolehan (*obtaining*), penggambaran (*delineating*), penyediaan (*providing*), informasi yang berguna (*useful information*), dan alternatif keputusan (*Decision alternatives*) (<http://evaluasiendidikan.blogspot.com>).

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jones yang mencoba merumuskan evaluasi kebijakan dengan dihubungkan pada penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya terhadap kelompok sasaran dan daerah tertentu. Jones merumuskan evaluasi kebijakan “sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program-program pemerintah yang berbeda secara tajam tentang spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya” (Islamy, 2009:15).

Sejalan dengan pendapat diatas evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi *evaluator*, secara khusus, dan penggunaan lainnya secara umum (Agustino, 2006:185)

Ada tiga hal evaluasi kebijakan yang perlu diperhatikan menurut (Agustino, 2006:186), yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan berusaha member informasi yang valid tentang kinerja kebijakan.
- b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi.
- c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk member sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli diatas, kita dapat menarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

3. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn, berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai informasi atau Manfaat-manfaat hasil kebijakan (Agustino, 2006:187). Hal ini dikatakan bernilai dan bermanfaat manakala fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi secara baik. Ada tiga fungsi evaluasi kebijakan yang akan dijabarkan di sini, ialah:

- a. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi:
 - 1) Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
 - 2) Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam hal ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia

ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar peri kehidupan warganya.

- 3) Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memperdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari implementasi kebijakan.
 - b. Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam pencapaian tujuan dan target, seharusnya pemilihan nilai yang tidak didasari oleh kepentingan kelompok tertentu dan kebijakan itu harus didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Karena itu, nilai perlu diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoprasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai.
 - c. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan. Evaluasi kebijakan pun dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternatif kebijakan yang lebih baru atau revisi atau kebijakan-kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa alternative kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan yang lebih baik (Agustino, 2006:187).

Jadi dapat disimpulkan fungsi evaluasi yaitu pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu. Kedua, evaluasi member sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang ketiga, evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi

sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

4. Jenis-jenis Evaluasi Kebijakan Publik

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli terkait dengan jenis atau tipe dari evaluasi kebijakan. Antara lain menurut Putra (2003) terdapat tiga macam evaluasi kebijakan, yaitu:

- a) Evaluasi *Administratif* adalah evaluasi kebijakan publik yang dilakukan didalam lingkup pemerintahan atau didalam instansi-instansi atau umumnya evaluasi ini dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang berkaitan dengan program tertentu seperti irjen, irwil, konsultan swasta, dan sebagainya. Sorotan dari evaluasi kebijakan publik ini adalah adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek finansial dan prosedur kebijakan publik yang dievaluasi. Artinya, bahwa evaluasi kebijakan publik dilakukan untuk mendapatkan jaminan bahwa apakah yang dilakukan pemerintah lewat proyek tertentu itu benar-benar mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan (*the expected good*) pada tingkat biaya yang paling rendah. Dalam evaluasi administrative terdiri dari :
 - 1) *Effort evaluation*: Mengevaluasi *input* program.
 - 2) *Performance evaluation*: Mengkaji *output* dibandingkan dengan *input* program.
 - 3) *Effectiveness evaluation*: mengkaji apakah pelaksanaannya sesuai dengan sasaran & tujuan.
 - 4) *Efficiency evaluation*: Membandingkan biaya dengan *output* yang dicapai. *Process evaluation*: Mengkaji metode pelaksanaan, aturan dan prosedur dalam pelaksanaan.
(<http://evaluasipendidikan.blogspot.com>)
- b) Evaluasi *Yudisial* adalah evaluasi yang dilakukan yang berkait dengan objek-objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan publik yang dievaluasi tersebut. Yang melakukan yudisial sebagai pihak utamanya adalah lembaga-lembaga hukum, seperti pengacara, pengadilan, kejaksaan, dan

sebagainya. Yang menjadi titik amanat dari evaluasi ini adalah utamanya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada pada kebijakan tersebut. Ini berarti menyangkut perlindungan hak dari berbagai pihak atas berjalannya sebuah program kebijakan.

- c) Evaluasi *politik* adalah evaluasi yang pada umumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga politik baik oparlemen maupun parpol. Namun sesungguhnya evaluasi politik ini bisa juga dilakukan oleh masyarakat secara umum. Evaluasi ini menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari sebuah kebijakan publik. Hal ini diberi ruang sebab sesungguhnya sudah menjadi kesadaran umum bahwa kebijakan publik itu pada hakikatnya adalah sebuah proses politik. Dengan demikian, sebuah kebijakan publik itu tidak cukup hanya efektif, efisien, ekonomis dan abash secara hukum saja, namun harus pula memiliki baris legitimasi politik yang kuat.

Dengan demikian maka kajian ini yang didalamnya terdapat salah satu jenis evaluasi yang sangat mendasari di dalamnya yaitu Jenis *Effectiveness evaluation* dimana dalam evaluasi kebijakan ini mengevaluasi suatu program yang khususnya membahas tentang Dampak Program Desentralized Basic Education (DBE2) dan seberapa besar manfaatnya dalam peningkatan mutu pendidikan, baik secara positif maupun negatif.

5. Evaluasi Dampak Kebijakan

Secara konseptual studi implementasi dalam beberapa hal dapat tumpang tindih deng studi evaluasi dampak. Mengevaluasi dampak *short-run* (yang juga merupakan bagian dari performa program) adalah merupakan bagian integral dari evaluasi implementasi. Tetapi sebenarnya ada berbagai aspek dari dampak yang dapat dievaluasi secara tersendiri. Gambaran yang khas dari orang yang melakukan studi evaluasi dampak

adalah programnya terlebih dahulu dilaksanakan secara nyata sampai selesai, sehingga beberapa saat kemudian dampaknya bisa dipelajari berdasarkan pada data yang sudah mencukupi (Kusumanegara, 2010:132).

Ripley (1986) (dalam, Kusumanegara, 2010:132), menjelaskan bahwa analisis dampak telah sering dilakukan oleh berbagai pemerintah. Semua aparat pemerintah pasti mempunyai keinginan yang besar untuk mengetahui apa yang terjadi dalam suatu program yang didalamnya mereka telah menggunakan banyak anggaran negara. Meskipun demikian pengertian tentang dampak tidak berkembang dengan baik dikalangan mereka, dengan tentunya banyak perbedaan dari mereka sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan dampak itu.

Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*). Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

Pada umumnya makna dampak dikonsentrasikan pada fenomena ekonomi. Dan yang paling besar perhatiannya adalah pada penggunaan ditingkat individu dan masyarakat, yang diagregasikan pada tingkat individu. Dengan demikian maka ada beberapa fenomena penting yang

luput dari perhatian dan juga terjadi bias dalam pemilihan tujuan-tujuan kebijakan dan program yang tidak cukup dianalisis dengan pengukur secara ekonomi saja.

Sebenarnya ada empat dimensi utama dari dampak yang perlu diperhatikan Ripley (1985) (dalam Kusumanegara 2010: 1985), yaitu:

1. Waktu

Kajian pada dimensi waktu dipandang sangat penting dalam analisis dampak. Secara alamiah, semakin lama priode *post initiation* (priode permulaan setelah adanya dampak) dipelajari, semakin sulit untuk mengukur adanya dampak. Karena rantai kasualitas semakin kabur dan sejumlah pengaruh dari faktor-faktor lain yang akan dijelaskan akan semakin bertambah banyak dengan cepat. Jika efek terhadap individu-individu dipelajari lebih lama, maka akan timbul masalah praktis yang kesulitan menjaga *track* (jejak data) individu yang sama dalam waktu yang lama. Meskipun demikian, problem intelektual ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Faktanya setiap peneliti seharusnya memperhatikan dampak suatu program dari waktu ke waktu, dengan kondisi ini maka seorang peneliti tidak dapat mengkaji dampak sepanjang waktu. Untuk itu perlu ditentukan jangka waktu penelitiannya.

2. Hubungan dampak actual dengan bakal dampak

Analisis dampak memerlukan perhatian tidak hanya sekedar pada derajat pencapaian program dan apa yang bakal dicapai, tetapi juga

pada akibat yang terjadi jika program yang hanya tercapai sebagian saja atau bahkan tidak tercapai sama sekali. Adalah sulit mengetahui perbandingan antara dampak yang terjadi dengan bakal dampak. Karena akan sulit bagi seseorang peneliti untuk memperkirakan bakal dampak apa yang timbul setelah itu. Bisa jadi apa yang timbul kemudian adalah dampak yang malah bertentangan arah dengan dampak aktual.

3. Tingkat agregasi dampak

Dampak suatu program terhadap individu dapat dipelajari, dan dampak tingkat individual ini dapat diagregasikan, dirata-rata, dan dianalisis dengan berbagai cara untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada unit yang lebih luas terhadap individu. Tetapi kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat atau masyarakat itu sendiri secara keseluruhan adalah merupakan subyek dari dampak itu sendiri dan dapat dipelajari secara langsung oleh para analis.

4. Tipe-tipe dampak

Ada empat tipe-tipe dampak dari program domestik yang dapat diuji oleh para ilmuwan, (Kusumanegara, 2010:136), yaitu :

1. Dampak pada kehidupan ekonomi
2. Dampak pada proses pembuatan keputusan
3. Dampak pada sikap-sikap publik seperti dukungan pada sistem politik, dan
4. Dampak pada kualitas kehidupan

Memperhatikan dampak suatu program terhadap kehidupan ekonomi individual atau masyarakat secara luas perlu dilakukan dengan emfokuska perhatian indikator penghasilan, nilai tambah, resiko *cost-benefith*, GNP, dan indikator-indikator serupa lainnya yang tepat untuk diteliti, kebijakan juga mempunyai dampak terhadap proses kebijakan, yaitu dalam memutuskan apa yang menjadi kebijakan atau program berikutnya.

Karena adanya dampak dari suatu kebijakan maka proses pembuatan kebijakan itu sendiri akan relatif lebih terbuka atau mungkin malah lebih tertutup terhadap akses individual warga negara, kelompok-kelompok NGO, dan actor-aktor lainnya. Kebijakan dan program juga mempengaruhi sikap orang dalam berbagai bentuk. Baik mereka yang memperoleh keuntungan maupun public secara keseluruhan mempunyai sikap terhadap program tertentu, terhadap efektivitas dan legitimasi pemerintahan, terhadap para aparat dan kantor dinasnya, terhadap kesejahteraan mereka sendiri, dan terhadap kemampuannya untuk mencapai apa yang diinginkannya dalam kehidupan ini. sikap terhadap program yang disponsori pemerintah maupun yang dibangkitkan oleh adanya pelaksanaan program tertentu mempunyai arti penting terhadap fungsinya program dan pada pilihan yang dibuat masyarakat terhadap program dan kebijakan tertentu dampak seperti ini sangatbaik jika dipelajari dengan dianalisis,

Terakhir, kebijakn dan program mempunyai dampak terhadap kualitas hidup individu, kelompok-kelompok individu dalam masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengukuran terhadap dampak jenis ini seharusnya bersifat nonekonomis. Persoalan-persoalan sperti tersediannya waktusenggang, ketersediaan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupdan menggunakan waktu senggang, masalah buta huruf, kesehatan, dan adanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan sepanjang hidup, adalah merupakan persoalan yang ditujukan pada peneliti dampak seperti ini.

Namun perlu untuk dicermati bahwa dalam kenyataannyatidak setiap program mempunyai dampak yang mencangkup seluruh dimensi diatas. Sehingga para analis harus membuat pilihan apa yang akan dianalisis dan menetapkan pengukuran konsep-konsep utamanya serta kemudian melakukan analisa yang kemudian bisa dilakukan.

Menurut (Agustino, 2006:1993), dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, yaitu:

- a. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dengan melibatkan masyarakat.
- b. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situsi dan kelompok lain.
- c. Kebijakan dapat mempunyai pengararuh dimasa mendatang seperti pengaruhnya yang ada pada kondisi saat ini.
- d. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya. Seperti biaya sering tidak dipertimbangkan dalam pembuatan evaluasi sebuah kebijakan, setidaknya sebagian ada yang menentang penghitungannya.

Evaluasi dampak menurut Suzzetta (2008:89), adalah jenis evaluasi yang berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya. Dengan kata lain, sejauh mana hasil atau manfaat dan dampak yang diharapkan telah tercapai. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang besar pada output dan dampak kebijakan. Evaluasi yang dilakukan untuk melihat berbagai hal antara lain yaitu:

- a. Menentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga.
- b. Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program.
- c. Mengeksplorasi akibat yang tidak diperkirakan baik positif maupun negatifnya.
- d. Permasalahan yang disoroti pada bagaimana program mempengaruhi peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program betul-betul disebabkan oleh program ataukah faktor lain

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dampak kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada tercapainya indikator-indikator pelaksanaan kebijakan, yang dapat diukur dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun *outcome* kebijakan. Sehingga menimbulkan suatu dampak, baik dampak positif maupun negatif yang akan berpengaruh juga terhadap perubahan suatu organisasi dalam menyusun suatu strategi dan kebijakan didalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Artinya suatu organisasi

mampu menyusun strategi dan kebijakan yang ampuh untuk mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Keberhasilan penyusunan kebijakan dan strategi organisasi akan didukung lebih banyak fungsi manajerial yang ada. Salah satu bidang fungsional strategi yang menjadi perhatian adalah Manajemen Sumber Daya Manusia.

6 Masalah yang dihadapi dalam evaluasi dampak

Mengevaluasi dampak kebijakan sebenarnya merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan sekalipun dilakukan pada kondisi yang sangat kondusif. Laster dan Stewart (2000) (dalam Kusumanegara, 2010:136) mendeskripsikan kesulitan-kesulitan dalam evaluasi dampak sebagai berikut :

1. Evaluasi kebijakan sulit memperoleh keberhasilan jika tujuan-tujuan kebijakan tidak jelas, dalam arti tidak dispesifikasikan dalam bentuk pengukuran. Akibatnya kriteria, evaluasi yang dilakukan menyatakan bahwa : kebijakn telah berhasil melakukan tujuannya juga tidak jelas.
2. Jika tujuan kebijakn secara jelas telah diidentifikasi, masih ada kesulitan lain yaitu cara mengukur keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan itu.
3. Adakalanya dampak kebijakan lain berpengaruh pada kebijakan atau program yang sedang dievaluasi. Dalam hal ini kesulitan akan muncul ketika seorang analis berusaha mengidentifikasi dan mengukur efek samping dari kebijakan yang sedang dievaluasi.

Tantangannya adalah pada kemampuan analisis memisahkan dampak dari program lain dengan program yang diteliti.

4. Cukup sering terjadi, data penting untuk mengevaluasi dampak kebijakan ternyata tidak tersedia. Di dalam ilmu politik aspek ketersediaan data untuk kebijakan-kebijakan yang sensitif sering tidak bisa dipenuhi. Karena data tersebut masuk dalam kategori data rahasia.
5. Begitu banyaknya program yang ditunjukkan ke masyarakat menumpuk pada kelompok target yang sama dengan tujuan yang sama pula. Akibatnya, jika evaluasi ditujukan hanya pada suatu program maka akan sulit untuk menilai dampaknya. Misalnya, jika ternyata tingkat kenakalan siswa di kelas menurun apakah disebabkan oleh program pengembangan pendidikan, mutu pendidikan yang semakin baik atau program yang lainnya ini merupakan tantangan bagi metodologi evaluasi kebijakan.
6. Kenyataannya studi evaluasi kebijakan sering dianggap mengancam kehidupan seseorang. Karena keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan berkaitan dengan reputasi dan karier politisi mungkin birokrat.
7. Studi evaluasi yang dilakukan biasanya menggunakan biaya yang cukup besar. Semakin canggih dan semakin banyak variasi metodologi yang dipergunakan semakin besar pula biayanya.

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan

Salah satu bidang penting dalam administrasi atau manajemen pendidikan adalah berkaitan dengan personil atau sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu Pendidik seperti guru maupun tenaga kependidikan seperti tenaga administratif. Intensitas dunia pendidikan berhubungan dengan manusia dapat dipandang sebagai suatu perbedaan penting antara lembaga pendidikan atau organisasi sekolah dengan organisasi lainnya, ini sejalan dengan pernyataan Sergiovanni, et.al (dalam Suharsaputra, 2010:2) yang menyatakan bahwa:

”Perhaps the most critical difference between the school and most other organization is the human intensity that characterize its work. School are human organization in the sense that their products are human and their processes require the socializing of humans”.

Ini menunjukkan bahwa masalah sumber daya manusia menjadi hal yang sangat dominan dalam proses pendidikan atau pembelajaran, hal ini juga berarti bahwa mengelola sumber daya manusia merupakan bidang yang sangat penting dalam melaksanakan proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah.

Sumber daya manusia dalam konteks manajemen adalah *”people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals*

Oleh karena itu Sumberdaya Manusia dalam suatu organisasi termasuk organisasi pendidikan memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberi

sumbangan bagi pencapaian tujuan. Meningkatnya kinerja sumber daya manusia akan berdampak pada semakin baiknya kinerja organisasi dalam menjalankan perannya di masyarakat (Djahidin 2007: 24).

Meningkatkan kinerja sumber daya manusia memerlukan pengelolaan yang sistematis dan terarah, agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini berarti bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan, besar atau kecil, apapun jenis industrinya, aspek manajemen sumber daya manusia menduduki posisi penting dalam suatu perusahaan atau organisasi karena setiap organisasi terbentuk oleh orang-orang, menggunakan jasa mereka, mengembangkan keterampilan mereka, mendorong mereka untuk berkinerja tinggi, dan menjamin mereka untuk terus memelihara komitmen pada organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem sumber daya manusia dapat mendukung keunggulan kompetitif secara terus menerus melalui pengembangan kompetensi SDM dalam organisasi (Djahidin 2007: 25-26).

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat menentukan dalam suatu organisasi, dan perlu terus

dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya.

Dalam era yang penuh dengan perubahan, lingkungan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia sangatlah menantang, perubahan muncul dengan cepat dan meliputi masalah-masalah yang sangat luas. Berdasarkan penelitian dan sumber-sumber lain menurut Mathis (2001:4) dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut (a) perekonomian dan perkembangan teknologi; (b) ketersediaan dan kualitas tenaga kerja; (c) kependudukan dengan masalah-masalahnya; (d) restrukturisasi organisasi. Oleh karena itu mengelola Sumber daya manusia menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagi keberhasilan suatu organisasi, kegagalan dalam mengelolanya akan berdampak pada kesulitan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor yang akan menentukan pada kinerja organisasi, ketepatan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mengintegrasikannya dalam suatu kesatuan gerak dan arah organisasi akan menjadi hal penting bagi peningkatan kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk lebih memahami bagaimana posisi manajemen SDM dalam konteks organisasi diperlukan pemahaman tentang makna manajemen SDM itu sendiri, agar dapat mendudukan peran manajemen SDM dalam dinamika gerak organisasi.

Adapun lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi. fungsi manajemen sumber daya Manusia terbagi atas, “fungsi manajemen yang meliputi: *planning, organizing, actuating, controlling* dan fungsi operasional yang meliputi *procurement, development, kompensasi, integrasi, maintenance, separation*” (Cahyono,1996:2).

Fungsi perencanaan (*planning*) merupakan penentu dari program bagian personalia yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah disusun oleh perusahaan.

Fungsi pengorganisasian (*organizing*) merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi, dimana setelah fungsi perencanaan dijalankan bagian personalia menyusun dan merancang struktur hubungan antara pekerjaan, personalia dan faktor-faktor fisik.

Fungsi *actuating*, pemimpin mengarahkan karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Fungsi pengendalian (*controlling*) merupakan upaya untuk mengatur kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi pengadaan tenaga kerja (*procurement*) yang berupaya untuk mendapatkan jenis dan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Fungsi pengembangan (*development*) harus dilaksanakan untuk meningkatkan ketrampilan mereka melalui pendidikan

dan pelatihan untuk meningkatkan prestasi kerja. Fungsi integrasi (*integration*) merupakan usaha untuk mempersatukan kepentingan karyawan dan kepentingan organisasi, sehingga tercipta kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Fungsi pemeliharaan (*maintenance*) tenaga kerja yang berkualitas perlu dilakukan agar mereka mau tetap bekerja sama dan loyal terhadap organisasi. Fungsi pemberhentian (*separation*) yang merupakan putusnya hubungan kerja seseorang dengan perusahaan karena alasan-alasan tertentu.

Menurut Lunenburg dan Ornstein (dalam Djahidin, 2007: 27). dalam proses manajemen sumber daya manusia terdapat enam program yaitu :

1. *Human resource planning*
2. *Recruitment*
3. *Selection*
4. *Professional development*
5. *Performance appraisal*
6. *Compensation*

Human resource planning merupakan perencanaan sumber daya manusia yang melibatkan pemenuhan kebutuhan akan personel pada saat ini dan masa datang, dalam konteks ini pimpinan perlu melakukan analisis tujuan pekerjaan syarat-syarat pekerjaan serta ketersediaan personil. *Recruitment* adalah paya pemenuhan personil melalui pencarian personil yang sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada rencana sumber daya manusia yang telah ditentukan. Kemudian dari pendaptar

yang diperoleh dalam rekrutmen, dilakukanlah *selection* untuk menentukan personil yang kompeten sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan.

Apabila personil yang dibutuhkan telah diperoleh, maka langkah manajemen sumber daya manusia yang amat diperlukan adalah *Professional development* atau pengembangan profesional yang merupakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi personil agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kepentingan organisasi. Dalam hubungan ini maka diperlukan upaya untuk melakukan penilaian kinerja (*performance appraisal*) sebagai upaya untuk memahami bagaimana kondisi kinerja personil dalam organisasi yang diperlukan dalam menentukan kebijakan kompensasi (*compensation*) serta pengembangan karir personil.

Manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi pada dasarnya hanyalah suatu cara atau metode dalam mengelola sumber daya manusia agar dapat mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi, melalui upaya-upaya yang dapat mengembangkan kompetensi sumber daya manusia menjalankan peran dan tugasnya dalam suatu organisasi, oleh karena itu tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi untuk bekerja dengan baik dalam mewujudkan tujuan organisasi. Menurut Wherther dan Davis "the purpose of human resources management is to improve the productive contribution of people to the

organization in an ethical and socially responsible way". Sementara itu secara rinci Wherther dan Davis dalam (Djahidin 2007: 28). menyatakan bahwa tujuan dari pada manajemen sumberdaya manusia adalah :

- a. **Societal objective.** *To be ethically and socially responsible to the needs and challenge of society while minimizing the negative impact of such demand upon thr organization.*
- b. **Organizational objective.** *To recognize that human resource management exists to contribute to organizational effectiveness. Human resource management is not an end in itself; it is only a means to assist the organization with its primary objectives. Simply stated, the departement exists to serve the rest of the organization.*
- c. **Functional objective.** *To maintain the department's contribution at a level appropriate to the organization's needs. Resources are wasted when human resource management is more or less sophisticated than the organization demand. The department's level of service must be tailored to the organization it serve.*
- d. **Personal objective.** *To assisst employees in achieving their personal goal, at least insofar as these goals enhance the individual's contribution to the organization. Personal objective of employees must be met if workers are to be maintained, retained, and motivated. Otherwise, employee performance and satisfaction may decline, and employees may leave the organization*".

Manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu bagian dari manajemen organisasi secara keseluruhan jelas akan berpengaruh pada bidang-bidang manajemen lainnya, karena pada dasarnya semua organisasi itu bergerak dan berjalan karena adanya aktivitas dan kinerja sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi.

Dengan demikian nampak bahwa manajemen sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam suatu organisasi termasuk dalam lembaga pendidikan seperti sekolah yang juga memerlukan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dalam meningkatkan

kinerja organisasi. Tuntutan akan upaya peningkatan kualitas pendidikan pada dasarnya berdampak pada perlunya sekolah mempunyai sumber daya manusia pendidikan baik pendidik maupun sumber daya manusia lainnya untuk berkinerja secara optimal, dan hal ini jelas berakibat pada perlunya melakukan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan legal formal seperti kualifikasi dan kompetensi, maupun tuntutan lingkungan eksternal yang makin kompetitif di era globalisasi dewasa ini, yang menuntut kualitas sumber daya manusia yang makin meningkat yang mempunyai sikap kreatif dan inovatif serta siap dalam menghadapi ketatnya persaingan.

D. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu merupakan konteks yang dinamis, wujudnya dapat berupa kepuasan. Kepuasan ini dapat dilihat dari dua sisi, pertama dari sisi produsen dan yang kedua dari sisi pengguna. Mutu bersifat dinamis karena ukuran kepuasan akan selalu berubah dengan cepat sejalan dengan perubahan waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Itulah sebabnya, konsep mutu harus dikaitkan dengan upaya perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dari sisi produsen mutu dapat digambarkan sebagai sesuatu hasil yang telah sesuai atau melebihi dari apa yang ada dalam perencanaan program. Program perencanaan

dimaksud meliputi input, proses, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau output. Namun mutu atau kepuasan dari sisi produsen belum tentu sama dengan mutu atau kepuasan menurut pelanggan. Dikatakan bermutu menurut pelanggan apabila program-program, kegiatan, dan hasil yang dicapai telah sesuai atau melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan itu sendiri.

Menyiasati agar ada relevansi antara mutu yang dimaksud oleh pelanggan, dalam hal ini sekolah, maka harus ada kerja sama antara sekolah dengan pihak pengguna pendidikan dalam penentuan dan pembuatan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah.

Pengukuran mutu dari sisi produsen (sekolah) disebut *quality in fact* sedangkan pengukuran mutu dari sisi pelanggan disebut sebagai *quality in perception*. Adapun standar yang dipakai pengukuran *quality in fact* adalah standar proses dan pelayanan, yakni yang sesuai dengan spesifikasi dalam perencanaan, cocok dengan tujuan dan dilaksanakan dengan tanpa kesalahan (*zero defect*) atau mengerjakan sesuatu yang benar sejak pertama dan seterusnya (*right first time and every time*). Standar yang digunakan untuk pengukuran *quality in perception* adalah standar pelanggan, yakni kepuasan pelanggan yang dapat meningkatkan permintaan dan harapan pelanggan (Suderadjat, 2005 : 2).

Mutu merupakan suatu keadaan yang esensi dalam segala hal, termasuk dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan di sekolah yang

tidak bermutu lambat laun akan mati ditinggalkan pelanggannya dan kalah bersaing oleh penyelenggara pendidikan yang bermutu. Mengingat esensinya masalah mutu, ditegaskan oleh Syafaruddin (2005 : 34) bahwa : “Konsep sekolah bermutu (unggul) perlu ada dalam konsep setiap kepala sekolah.”

Memandang mutu pendidikan tidak bisa serta merta hanya dilihat dari sisi mutu lulusannya saja, karena yang paling penting justru harus mempertanyakan bagaimana caranya meningkatkan mutu lulusan tersebut ? Jelasnya, hal-hal yang dapat dan berpengaruh terhadap mutu lulusan adalah suatu proses dan fasilitas-fasilitas pendukungnya dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Proses yang dimaksud tiada lain berupa layanan yang diberikan kepada pelanggan pendidikan, baik kepada siswa sebagai pelanggan utama yang menerima layanan pendidikan dan pembelajaran, maupun orang tua dan masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan. Dalam upaya mencapai lulusan yang bermutu tentu harus melalui tahap proses yang bermutu, yakni memberikan layanan pendidikan dengan mengerahkan segala sumber daya sebagai pendukungnya, baik sumber daya material maupun nonmaterial. Sejalan dengan itu, Syafaruddin (2002 : 37) menjelaskan sebagai berikut :

Tuntutan terhadap pelayanan terbaik juga menjadi perhatian manajemen mutu terpadu, tak terkecuali dalam pendidikan. Sekolah-sekolah pada dewasa ini tidak hanya cukup menawarkan program studi dengan kurikulum tertentu, orang tua dan pelajar menjadi puas. Akan tetapi, sekolah juga harus menyediakan alat-alat belajar dan mengajar yang relevan dengan perkembangan

zaman untuk mendukung kemajuan proses pembelajaran dan pengajaran. Gedung sekolah yang bagus diisi dengan sarana dan fasilitas belajar yang baik dan fungsional, tempat bermain pelajar, serta pelayanan yang prima terhadap pelajar, guru, orang tua, dan masyarakat. Situasi dan kondisi sekolah yang kondusif akan memberikan kontribusi positif bagi mutu proses dan mutu produk (lulusan) sekolah.

Sesuai dengan gambaran tersebut di atas dapat dikatakan bahwa layanan pendidikan mencakup dimensi proses dan dimensi sarana prasarana. Proses berupa pelaksanaan pembelajaran, metode, komunikasi, motivasi, dan sebagainya. Sarana prasarana berupa alat-alat pembelajaran, gedung, dan lingkungan sekolah yang kondusif.

Bermutu atau tidaknya proses dan sarana prasarana pendidikan sebagai indikator dalam layanan pendidikan dapat dibandingkan dengan standar yang tertuang dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya mencakup standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Apabila sarana prasarana, dan proses yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan harapan pelanggan, maka layanan pendidikan dapat memuaskan produsen maupun pelanggan. Dengan kata lain, layanan pendidikan yang bermutu adalah layanan pendidikan yang sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.

Digulirkannya paradigma baru pendidikan yang menganut sistem desentralisasi pendidikan, sesuai dengan PP Nomor 25 tahun

2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom, bertitik tolak pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan sistem desentralisasi pendidikan sekolah diberi keleluasaan untuk memperoleh pendidikan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan kondisi lingkungan serta kemampuan masing-masing. Sehingga hasil dari pendidikan akan betul-betul dirasakan manfaatnya karena mulai dari proses perencanaan sudah mempertimbangkan segi relevansinya dengan kebutuhan yang ada. Dengan cara ini akan memberikan kepuasan kepada semua pihak. Seperti telah disinggung dalam pembahasan terdahulu bahwa kepuasan merupakan ciri dari pendidikan yang bermutu. Namun perlu disadari, dengan sistem desentralisasi pendidikan bukan berarti bebas dari permasalahan, karena dengan kondisi dan kemampuan tiap-tiap daerah yang berbeda-beda tentu kemampuan dalam mengelola pendidikannya pun akan berbeda-beda pula. Mengenai hal ini dikemukakan oleh Fiska, Nurhadi, dan Satori dalam Mulyasa (2006 : 17) sebagai berikut :

Sedikitnya terdapat enam permasalahan yang harus diantisipasi pada paradigma baru manajemen pendidikan dalam konteks otonomi daerah, yakni kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, perluasan dan pemerataan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.

Permasalahan-permasalahan yang dapat muncul dari konteks mutu layanan pendidikan dikaitkan dengan desentralisasi pendidikan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pendidikan. Yakni masalah kurikulum, tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, proses pembelajaran, dan penilaian. Dilihat dari kacamata nasional, regional, apalagi global sebagai efek sampingnya dikhawatirkan bahwa mutu pendidikan yang bersifat kedaerahan ini kurang kompetitif secara global. Permasalahan- permasalahan tersebut sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan oleh Mulyasa (2006 : 18) sebagai berikut :

Masalahnya adalah bagaimana menjamin divaritas yang disebabkan oleh adanya konteks lokalitas yang cenderung memunculkan kriteria lokal. Lebih lanjut perlu dipikirkan pengembangan standar kinerja pendidikan yang memenuhi tuntutan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam konteks nasional bahkan internasional.

Guna menghadapi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan seperti di atas, maka pemerintah mengeluarkan Standar Nasional Pendidikan. “Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” (UU Sisdiknas 2003, pasal 1 butir 17). Dengan berpedoman dan mengacu pada SNP maka pengelolaan pendidikan yang kewenangannya diberikan kepada tiap daerah dan tiap satuan pendidikan, tetapi tetap akan ada dalam koridor nasional, sehingga mutu pendidikan secara nasional akan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Satu hal yang sangat mendasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah peningkatan mutu layanan pendidikan Syarafarudin

(2002:39) menjelaskan bahwa : “Untuk mendapatkan standar mutu merupakan suatu keharusan menggunakan konsep manajemen yang menggunakan pendekatan mutu, yang kemudian kita kenal dengan istilah ‘manajemen mutu’.” Ada lima dimensi yang diarahkan untuk mutu layanan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Zeitham, Parasuraman, dan Berry dalam Jayawinata (2012) sebagai berikut :

1. *Tangibles*, yaitu berkaitan dengan penampilan fisik lembaga, peralatan, pegawai dan sarana komunikasi.
2. *Reliability*, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan sebagaimana yang dijanjikan, terpercaya, akurat, dan konsisten.
3. *Responsiveness*, yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat.
4. *Assurance* (kombinasi dari *courtesy competence*, *credibility*, *security*), yaitu kemampuan staf lembaga untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan melalui rasa hormat dan pengetahuan yang mereka miliki.
5. *Empathy* (kombinasi dari *access*, *communication*, *understanding the customer*), yaitu perhatian staf lembaga yang diberikan kepada pelanggan secara individu.

Indikator untuk mengukur dimensi-dimensi mutu layanan pendidikan sebagaimana tersebut di atas dapat mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, juga harus memperhatikan kriteria-kriteria pendidikan yang baik, seperti dikemukakan dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 (2005 : 84) sebagai berikut :

Program dan latihan kegiatan pendidikan yang baik memiliki lima kriteria yang bisa disingkat dengan SMART (specific, measurable, achievebel, realistic, timebound). Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target atau sasaran masing-masing program.

Sekolah sebagai suatu organisasi yang memberikan jasa layanan pendidikan, mempunyai tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal. Itulah sebabnya, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu elemen-elemen yang ada di dalamnya. Secara umum unsur-unsur yang ada dalam organisasi sekolah ini terdiri dari tiga dimensi yaitu masukan (input), proses, dan keluaran (output).

1. Input, meliputi peserta didik, kurikulum, dana, data dan informasi, pendidik dan tenaga kependidikan, motivasi belajar, kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan, sararan dan prasarana, serta lingkungan.
2. Proses, meliputi lama waktu belajar dan mengikuti pendidikan, kesempatan mengikuti pembelajaran, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran.
3. Output, meliputi jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai ujian, jumlah siswa yang bekerja dan diterima pada lapangan kerja, peran serta lulusan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Faktor yang menyebabkan mutu pendidikan ada 2 (dua):

1. Faktor *Intern*
2. Faktor *Ekstern*

Faktor *intern* antara lain :

- a) Guru
- b) Murid
- c) Sarana Pembelajaran
- d) Alat Ukur atau evaluasi

- e) Metode
- Faktor *ekstern* antara lain :
- a) *Stakeholders* (Tidak termasuk Masyarakat
 - b) Orang Tua/ Wali murid
 - c) Lingkungan
 - d) Dunia Usaha
 - e) Lembaga Pendidikan atasnya atau Perguruan Tinggi
- (Sumber : *Buku Penanduan Workshop Penyusunan SKB Tentang Pengawasan Pendidikan, 2010 : 2*).

Sedangkan pemerintah dalam meningkatkan kemajuan dibidang pendidikan dengan menggunakan 5 (lima) pilar kebijakan pokok pendidikan yang dikemas dalam “MISI 5 K” yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas atau mutu dan relevansi layanan pendidikan.
4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan.
5. Meningkatkan kepastian atau keterjaminan memperoleh pendidikan.

Untuk mewujudkan “MISI 5 K” tersebut diatas, maka pemerintah melakukan banyak upaya antara lain dengan melakukan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Program ini merupakan payung kerjasama antara Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan USAID. Tujuan dari program ini ialah peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah. menggunakan DBE yang mengusung pendidikan dengan terobosan strategi baru

(Sumber : *Buku Penanduan Workshop Penyusunan SKB Tentang Pengawasan Pendidikan, 2010 : 2*)

E. Desentralisasi Pendidikan

1. Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik secara regional maupun secara internasional (Hadiyanto, 2004: 63). Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air kita. Hal ini beralasan, karena sistem birokrasi selalu menempatkan “kekuasaan” sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah-sekolah saat ini telah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi sejak kekuasaan tingkat pusat hingga daerah bahkan terkesan semakin buruk dalam era reformasi saat ini. Ironisnya, kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan berada pada tempat yang “dikendalikan”. Merekalah seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun, mereka ada dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang “pasti” tidak sesuai dengan kenyataan obyektif di masing-masing sekolah.

Disamping itu pula, kekuasaan birokrasi juga yang menjadi faktor sebab dari menurunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dulu, sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, dan merekalah yang membangun dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, serta iuran untuk mengadakan biaya operasional sekolah. Jika sekolah telah mereka bangun, masyarakat hanya meminta guru-guru kepada pemerintah untuk diangkat pada sekolah mereka itu. Pada waktu itu, kita sebenarnya telah mencapai pembangunan pendidikan yang berkelanjutan (*sustainable development*), karena sekolah adalah sepenuhnya milik masyarakat yang senantiasa bertanggungjawab dalam pemeliharaan serta operasional pendidikan sehari-hari. Pada waktu itu, Pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang, melalui pemberian subsidi bantuan bagi sekolah-sekolah pada masyarakat yang benar-benar kurang mampu (Ace Suryadi, 2003: 3).

Selanjutnya desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah maupun sekolah untuk mengambil keputusan terbaik tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah atau sekolah yang bersangkutan berdasarkan potensi daerah dan *stakeholders* sekolah. Oleh karenanya, desentralisasi pendidikan disamping diakui sebagai kebijakan politik yang berkaitan dengan pendidikan, juga merupakan kebijakan yang berkait dengan banyak hal. V. Paqueo dan Lammaert (2000:23) menunjukkan alasan-alasan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan yang sangat cocok untuk kondisi Indonesia, yaitu;

- 1) Kemampuan daerah dalam membiaya pendidikan,
- 2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah,
- 3) Redistribusi kekuatan politik,
- 4) Peningkatan kualitas pendidikan,
- 5) Peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga negara.

Sesuai dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi di bidang pendidikan, pengelolaan pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan

dari keinginan dan tujuan bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh dalam pendidikan dasar, propenas menyebutkan kegiatan pokok dalam upaya memperbaiki manajemen pendidikan dasar di Indonesia adalah:

1. Melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional, termasuk peningkatan peranan *stakeholders* sekolah;
2. Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti diversifikasi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Mengembangkan sistem insentif yang mendorong terjadinya kompetensi yang sehat baik antara lembaga dan personil sekolah untuk pencapaian tujuan pendidikan
5. Memberdayakan personil dan lembaga, antara lain melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional.
6. Meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan yang tidak sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan; dan

7. Merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen.

Atas dasar amanat seperti yang dirumuskan dalam propenas di atas, maka sangat jelas bahwa tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan sistem pendidikan secara desentralistik terkesan sangat kuat. Dengan sistem ini pendidikan dapat dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, di mana proses pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang paling dekat dengan proses pembelajaran (kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik).

Adanya otonomisasi daerah yang sekaligus disertai dengan otonomi penyelenggaraan pendidikan atau desentralisasi pendidikan, hendaknya dapat mencapai sasaran utama program restrukturisasi sistem dan manajemen pendidikan di Indonesia. Restrukturisasi dimaksud antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur organisasi pendidikan hendaknya terbuka dan dinamis, mencerminkan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran dibakukan berdasarkan prinsip edukatif sehingga lembaga pendidikan merupakan tempat yang menyenangkan untuk belajar, berprestasi, berkreasi, berkomunikasi, berolah raga serta menjalankan syariat agama.

3. Tenaga kependidikan, terutama tenaga pengajar harus benar-benar profesional dan diikat oleh sistem kontrak kinerja.
4. Struktur kurikulum pendidikan hendaknya mengacu pada penerapan sistem pembelajaran tuntas, tidak terikat pada penyelesaian target kurikulum secara seragam per catur wulan dan tahun pelajaran
5. Proses pembelajaran tuntas diterapkan dengan berbagai modus pendekatan pembelajaran, peserta didik aktif sesuai dengan tingkat kesulitan konsep-konsep dasar yang dipelajari.
6. Sistem penilaian hasil belajar secara berkelanjutan perlu diterapkan di setiap lembaga pendidikan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembelajaran tuntas.
7. Dilakukan supervisi dan akreditasi. Supervisi dan pembinaan administrasi akademik dilakukan oleh unsur manajemen tingkat pusat dan provinsi yang bertujuan untuk mengendalikan mutu (*quality control*). Sedangkan akreditasi dilakukan untuk menjamin mutu (*quality assurance*) pelayanan kelembagaan.
8. Pendidikan berbasis masyarakat seperti pondok pesantren, kursus-kursus keterampilan, pemagangan di tempat kerja dalam rangka pendidikan sistem ganda harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.
9. Formula pembiayaan pendidikan atau unit *cost* dan subsidi pendidikan harus didasarkan pada bobot beban penyelenggaraan

pendidikan yang memperhatikan jumlah peserta didik, kesulitan komunikasi, tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat partisipasi pendidikan serta kontribusi masyarakat terhadap pendidikan pada setiap sekolah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa desentralisasi pendidikan pada hakekatnya berkorelasi positif terhadap peningkatan mutu lulusan lembaga pendidikan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Apabila sekolah dapat dikelola dengan optimal oleh personalia yang profesional, pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih dekat dan tahu tentang kebutuhan dan potensi sekolah, maka mutu pendidikan akan semakin menunjukkan pada tingkat maksimal sesuai yang diharapkan.

2. Kelebihan dan Kelemahan Desentralisasi Pendidikan

Berdasarkan pengalaman, pelaksanaan disentralisasi yang tidak matang juga melahirkan berbagai persoalan baru, diantaranya :

- 1) Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah, antar sekolah antar individu warga masyarakat.
- 2) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua) menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurun dari waktu sebelumnya, sehingga akan menurunkan motivasi dan kreatifitas tenaga kependidikan di sekolah untuk melakukan pembaruan.

- 3) Biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggaran di alokasikan untuk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru didistribusikan ke sekolah.
- 4) Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan pendidikan, secara kumulatif berpotensi akan menurunkan pendidikan.
- 5) Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahami sepenuhnya permasalahan dan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pendidikan.
- 6) Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam di karenakan perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial.
- 7) Terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah.

Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan tersebut di atas, desentralisasi pendidikan dalam pelaksanaannya harus bersikap hati-hati. Ketepatan strategi yang ditempuh sangat menentukan tingkat efektifitas implementasi desentralisasi. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk tersebut ada beberapa hal yang perlu di perhatikan :

- 1) Adanya jaminan dan keyakinan bahwa pendidikan akan tetap berfungsi sebagai wahana pemersatu bangsa.

- 2) Masa transisi benar-benar di gunakan untuk menyiapkan berbagai hal yang dilakukan secara gradual dan di jadwalkan setepat mungkin.
- 3) Adanya komitmen dari pemerintah daerah terhadap pendidikan, terutama dalam pendanaan pendidikan.
- 4) Adanya kesiapan sumber daya manusia dan sistem manajemen yang tepat yang telah dipersiapkan dengan matang oleh daerah.
- 5) Pemahaman pemerintah daerah maupun DPRD terhadap keunikan dan keberagaman sistem pengelolaan pendidikan, dimana sistem pengelolaan pendidikan tidak sama dengan pengelolaan pendidikan daerah lainnya.
- 6) Adanya kesadaran dari semua pihak (pemerintah, DPRD, masyarakat) bahwa pengelolaan tenaga kependidikan di sekolah, terutama guru tidak sama dengan pengelolaan aparat birokrat lainnya.
- 7) Adanya kesiapan psikologis dari pemerintah pusat dari propinsi untuk melepas kewenangannya pada pemerintah kabupaten / kota.

Selain dampak negatif tentu saja desentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilan antara lain :

1. Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.
2. Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar - benar dari oleh dan untuk masyarakat.
3. Mampu menyelenggarakan pendidikan secara memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

F. Teori Program

1. Pengertian Program

Dari berbagai takrif tentang program pembangunan, dapat diketahui bahwa program di samping bersifat alokatif dan diskriptif, program juga bersifat inovatif dan multi fungsi. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh United Nations (1971) dalam Zauhar (1993:2) bahwa:

Programme is taken to mean form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an interrelated group of projects and usually limited to one or more an going organizations and activities.

Dengan suatu program berbagai macam masalah pembangunan dan kemasyarakatan dicoba dipecahkan. Karena demikian banyaknya problem yang muncul dalam masyarakat, maka diperlukan pula program yang banyak. Atas dasar itulah maka di kebanyakan negara sedang berkembang muncul beragam program semisal program KB, peningkatan

gizi, wajib belajar, pembangunan desa, penanggulangan perencanaan lingkungan, dan lain-lain. Program tersebut disamping bertujuan untuk memecahkan suatu masalah tertentu (problem solving) dimaksudkan juga agar masyarakat bangkit motivasinya dan inovasinya, karena mereka tertarik pada program yang dicanangkan. Dalam mencapai tujuan tersebut disadari benar bahwa kelangkaan sumber merupakan hal yang tak dapat dihindari. Oleh karenanya maka para pengelola pembangunan harus mampu menyusun skala prioritas sehingga alokasi dan distribusi sumber daya dapat dilaksanakan secara tepat. Agar fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik maka suatu program harus memiliki ciri-ciri:

- a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas;
- b) Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan;
- c) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program selektif mungkin;
- d) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut;
- e) Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri;
- f) Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. (United Nation, 1971) dalam Zauhar (1993: 2).

2. Keterkaitan antara Program Pembangunan dan Proyek Pembangunan

Sebagaimana nampak pada uraian terdahulu bahwa proyek pembangunan terkait erat dengan program pembangunan. Karena pada hakekatnya proyek pembangunan merupakan penjelasan lebih operasional dari suatu program. Secara singkat proyek dapat didefinisikan sebagai “serangkaian kegiatan dengan cara kerja tertentu, kriteria keberhasilan, lokasi yang jelas, jumlah biaya yang pasti, sumber pembiayaan yang telah ditetapkan, dan dikelola oleh sekelompok orang yang secara khusus ditunjuk untuk itu” (Siagian, 1984) dalam Zauhar (1993:3). Sedangkan ciri-ciri umum suatu proyek adalah:

- a) Proyek lebih menekankan kepada tujuan-tujuan yang lebih dekat. Bagaimana mencapai suatu hasil tujuan dalam periode yang relatif lebih singkat dengan mengusahakan sumber-sumber pembiayaannya dan merencanakan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu proyek berorientasi kepada kegiatan;
- b) Seharusnya kegiatan usaha untuk mencapai tujuan proyek tidak berlaku terus menerus. Pencapaian tujuan proyek tidak dapat dilakukan melalui kegiatan rutin dari suatu badan pemerintahan (U.N. 1971) dalam Zauhar (1993:3).

Aspek administrasi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu proyek adalah tahap-tahap yang harus dilalui. Tahap-tahap pengembangan suatu proyek adalah pententuan ide atau gagasan, formulasi rencana atau program kerja proyek, laporan dan arus balik, kemudian evaluasi dari pelaksanaan hasil proyek. Agar rumusan proyek

dapat lebih diandalkan maka biasanya didahului dengan survey dan feasibility study yang matang.

Dalam tahap pencetusan gagasan atau yang lebih dikenal sebagai tahap identifikasi proyek, di kebanyakan negara sedang berkembang banyak berasal dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Ada kalanya inisiatif ini berasal dari para konsultan asing. Hal ini disebabkan di kebanyakan negara sedang berkembang *autonomous energies* masyarakat masih rendah.

Di Indonesia dan kebanyakan negara sedang berkembang lainnya, formulasi rencana biasanya diajukan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek (DUP), yang sekaligus dipakai sebagai dasar evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian ini biasanya dilakukan dengan sangat cermat, dan menyangkut aspek keuangan, administrasi dan manajemen, teknis organisasi dan lain-lain.

Sedangkan di dalam tahap analisis dan evaluasi biasanya digunakan teknik-teknik kuantitatif seperti *social benefit-Cost analysis*, CPM, PERT dan lain-lain. Walaupun penggunaan teknik-teknik kualitatif sering digunakan, namun karena banyak segi yang perlu diperhatikan, maka penilaian secara kualitatif perlu pula dilakukan. Bahkan akhir-akhir ini dalam bidang ekonomi ada semacam kecenderungan untuk menggunakan "*judgement*", seperti dikatakan oleh Leon A Mears bahwa *judgement in appraising these benefits and cost qualitatively become important* (Mears:1969) dalam Zauhar (1993:4) .

Dengan nada yang hampir sama King berucap *that no amount of formal analysis can substitute for experience with actual projects in many places and under many different conditions, the kind of experience that enables an appraiser to "SEE" un-quantifiable benefits of a project clearly enough to have confidence in his judgement about in worth (King JR, 1967)dalam Zauhar (1993:4).*

Penerimaan atau penolakan terhadap usulan rencana tersebut didasarkan pada penilaian dan evaluasi, baik kualitatif maupun kuantitatif.

1). **Siklus Pengelolaan Program dan Proyek**

Setiap program dan proyek tertentu mempunyai ciri-ciri khas. Program dan proyek tentang pembangunan desa berbeda dengan program dan proyek keagamaan, sosial dan yang lain. Sungguhpun begitu setiap program dan proyek mempunyai sejumlah kesamaan, terutama dalam siklus pengelolaannya.

Perencanaan

Tahap awal pengelolaannya selalu dimulai dengan konsepsualisasi dan identifikasi. Setiap ide biasanya tidak begitu saja “turun dari langit”, kemudian lahir ide besar. Namun tidak bisa dipungkiri, bisa saja terjadi, walaupun sangat jarang terjadi, suatu ide tentang program dan proyek “hadir begitu saja”. Terlepas apakah suatu ide tentang program dan proyek “turun dari langit” atau melalui suatu proses yang panjang, yang penting adalah bahwa ide tersebut perlu ditindak lanjuti, dalam bentuk pembicaraan resmi, yang akhirnya tertuang dalam bentuk usulan tertulis.kegiatan ini biasa disebut dengan pra studi kelayakan. Tujuan dilakukan pra studi kelayakan ini ialah untuk memberikan justifikasi bahwa program dan proyek yang diusulkan merupakan kegiatan yang logis

dan penting. Untuk mengetahui apakah suatu program dan proyek logis dan penting, dapat dilihat dari efisiensi penggunaan tenaga, waktu dan biaya.

Setelah tahap awal dilakukan, tahap kedua adalah melakukan studi kelayakan. Di dalam studi kelayakan ini harus memuat informasi serta analisis yang berkaitan dengan:

- a) Segi ekonomi dari suatu proyek;
- b) Segi keuangan suatu proyek terutama sumber pembiayaan;
- c) Segi teknik suatu proyek, khususnya dalam pelaksanaan dan pengoperasian proyek;
- d) Dampak politik suatu proyek yang sering merupakan pertimbangan yang dominan dalam memproyeksikan suatu kegiatan,
- e) Segi manajemen suatu proyek dalam arti tersedianya tenaga pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan proyek, dan
- f) Desain sementara suatu proyek. (Siagian, 1984:168) dalam Zauhar (1993:5).

Biasanya kondisi sumber daya insani di kebanyakan negara sedang berkembang masih sangat memprihatinkan. Hal ini wajar karena aparatur di negara sedang berkembang pada awalnya hanya didesain untuk mengajukan tugas rutin pemerintahan, sehingga tugas untuk mengelola program dan proyek pembangunan merupakan tugas yang agak asing bagi mereka. Menghadapi kendala yang demikian ini paling tidak ada 2 cara yang ditempuh oleh negara sedang berkembang.

Pertama, dalam jangka pendek mendatangkan tenaga ahli asing untuk melakukan studi kelayakan. Memang dari sudut teknis dan teoritis hasil pekerjaan dari para konsultan ini memang dapat diandalkan, karena

profesi mereka adalah dalam bidang konsultasi. Tetapi masalah akan muncul, jika konsultan asing ini kurang mengetahui kondisi lapangan.

Kedua, dalam jangka panjang mengirim para aparatur ke berbagai forum pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri.

Jika studi kelayakan sudah dianggap cukup maka langkah selanjutnya, ketiga, adalah tahap desain. Di dalam desain inilah akan tergambar rincian yang lebih detail dari suatu program atau suatu proyek.

Jika desain ini memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, finansial, sosial dan politik tahap berikutnya adalah persetujuan (*approval*). Disetujui tidaknya suatu program dan proyek merupakan indikasi kualitas dari suatu perencanaan. Semakin berkualitas suatu perencanaan program dan proyek, semakin besar kemungkinannya untuk disetujui. Dengan kata lain bahwa *applicability* dan *acceptability* merupakan salah satu indikasi kualitas perencanaan program dan proyek.

3. Evaluasi Dan Monitoring

(Zauhar 1993:11) Monitoring adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti, mengamati dan melacak jalannya pelaksanaan program dan proyek pembangunan dengan menggunakan sistem pelaporan dan tujuan langsung ke lokasi agar memperoleh data dan informasi yang jelas serta menghimpun masalah yang ada untuk segera dijadikan alternatif pemecahan sebagai input penyempurnaan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dari dekat pelaksanaan pembangunan

dan mengidentifikasi tindakan korektif kemudian dimungkinkan untuk pengambilan penyesuaian serta mendukung usaha penyempurnaan.

Monitoring dapat dibedakan ke dalam monitoring umum dan monitoring proyek.

a) Monitoring umum

Monitoring umum adalah monitoring yang melihat semua kegiatan pembangunan sebagai objeknya. Semua kegiatan yang berupa proyek-proyek dan program-program, maupun kegiatan pembangunan lainnya yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat di daerah, oleh daerah sendiri, maupun oleh keduanya secara bersama-sama.

Monitoring umum ini bersifat mengamati dan mengawasi secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna keseluruhan kegiatan pembangunan tersebut secara fungsional dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan. Di samping itu juga mengamati apakah penggunaan sumber dana oleh seluruh kegiatan pembangunan itu sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan.

Objek monitoring umum adalah semua kegiatan pembangunan baik proyek pusat, proyek APBD Tingkat I, APBD Tingkat II maupun proyek-proyek inpres.

Dalam rangka menyelenggarakan monitoring umum, sumber informasi untuk didapatkan antara lain melalui pihak-pihak dibawah ini :

- a. Seluruh pimpinan proyek sektoral maupun pimpinan proyek daerah tingkat I dan tingkat II serta inpres.
- b. Bank Rakyat Indonesia.
- c. Aparat pemerintah di daerah selaku pengendalian umum.
- d. Lembaga-lembaga masyarakat atau non pemerintah yang terlibat dalam proyek-proyek dan kegiatan pembangunan dimaksud.
- e. Pihak masyarakat sebagai penerima manfaat proyek, sekaligus sebagai peserta didalam pelaksanaan proyek-proyek dan program-program tersebut.
- f. Pihak-pihak lain dianggap perlu. (Zauhar (993:12).

b). Monitoring Proyek

Monitoring proyek adalah monitoring yang melihat kegiatan-kegiatan dalam suatu proyek dalam suatu objek. Adapun fungsi dari monitoring proyek ini adalah mengamati dan mengawasi secara terus-menerus bagaimana hasil guna dan daya guna kegiatan-kegiatan tersebut dalam hubungan dengan penggunaan input proyek, untuk mencapai hasil proyek yang diharapkan. Monitoring ini juga berfungsi mengamati apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Untuk memudahkan pengendalian maka kegiatan monitoring terhadap setiap proyek yang telah disetujui harus dilengkapi dengan suatu kerangka proyek yang menggambarkan:

- a. Hirarki harapan yang hendak dicapai dari suatu proyek.
- b. Indikator- indikator yang diperlukan sebagai bukti pengukuran kemajuan tiap-tiap hierarki dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
- c. Total biaya proyek.
- d. Realisasi keuangan proyek.
- e. Kegiatan-kegiatan penting lain yang tidak tercantum dalam bagian penjadwalan proyek tetapi dianggap penting oleh pelaksanaan teknis di lapangan untuk dilaporkan sebagai data tambahan bagi kegiatan monitoring.

- f. Hambatan- hambatan yang berda diluar kemampuan pelaksanaan teknis, juga sebutkan sebab-sebab terjadinya hambatan tersebut. (Zauhar 1993:17)

F. *Desentralized Basic Education (DBE)*

1. Sejarah Singkat Tentang DBE

DBE adalah suatu organisasi yang mengadakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang pendidikan dasar. Organisasi ini juga turut serta membantu penyediaan sarana, prasarana dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di seluruh wilayah di indonesia utamanya lima daerah yang menjadi prioritas yaitu Sumatra Utara, Jawa tengah, Jawa Timur, Jawa Barat-Banten, Sulawesi Selatan. Di Jawa timur, utamanya sembilan daerah prioritas yaitu Bangkalan, Sampang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, Nganjuk. Sekaligus kedepan program ini diharapkan dapat berkembang ke kabupaten atau kota lainnya.

Dengan adanya desentralisasi tersebut, kabupaten atau kota di Indonesia memiliki mandat untuk mengatur dan mengelola pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas dan untuk bidang non-formal atau pendidikan tingkat yang disamakan. Namun demikian, banyak daerah mengalami kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab yang sebelumnya dilaksanakan melalui struktur pemerintah pusat. Sebagai akibatnya, dana yang terbatas tidak digunakan secara strategis, kebijakan yang ada seringkali tidak efektif dan tidak berjalan seperti seharusnya. Selain itu, penyebaran guru yang tidak efisien

mengakibatkan kelebihan dan kekurangan guru di berbagai sekolah. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan yang kurang transparan, akuntabel, dan menampung aspirasi masyarakat. Hal-hal yang disebutkan tersebut dapat menghambat usaha untuk memperbaiki mutu pendidikan maka Indonesia bekerjasama dengan DBE untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas mengajar guru-guru di Indonesia (USAID Indonesia : 4).

DBE bekerja sama dengan sekolah menengah pertama (baik umum maupun berbasis agama), pusat-pusat pendidikan non formal, LSM serta pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan mengembangkan kecakapan hidup yang sesuai bagi murid SMP/MTs dan remaja putus sekolah di bawah usia 18 tahun.

2. Visi, Misi dan program kerja DBE

Kemitraan ini didesain untuk merespon berbagai pembangunan dan perubahan fokus kebijakan USAID di Indonesia. Di dalam strategi program kerjasama pembangunan untuk Indonesia yang baru, USAID bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan sosial dasar. Terdapat peningkatan anggaran tahunan yang signifikan dibidang pendidikan dasar untuk periode strategi ke depan.

Penekanan ditujukan bagi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, mengurangi angka *Drop Out* yang tinggi dan memperbaiki administrasi dan kabupaten, jadi perincian dari kemitraan bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas manajemen pendidikan dasar di Indonesia dan tujuan utamanya, yaitu:

- a. Membangun kapasitas pemerintah daerah.
- b. Membangun kapasitas sekolah dan kelompok masyarakat terpilih dalam merencanakan.
- c. Mengelola dan memberikan layanan pendidikan dasar yang bermutu.

DBE juga memiliki empat (4) komponen yang saling terkait, yaitu:

- a. *Governance*, kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat komponen *governance* untuk layanan pendidikan dasar di tingkat kabupaten dan sekolah.
- b. Administrasi pemerintah, kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kantor pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola layanan Pendidikan Dasar.
- c. Pengembangan di sekolah, kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekolah-sekolah proyek pendidikan dasar.
- d. Manajemen kemitraan, kemitraan ini bertujuan untuk mengelola aktifitas sehingga berfungsi secara efektif, berkesinambungan dan menghasilkan model replika.

3. Prinsip Dasar *Decentralized Basic Education* (DBE)

Decentralized Basic Education (DBE2) dalam menjalankan tugasnya memegang beberapa prinsip yakni:

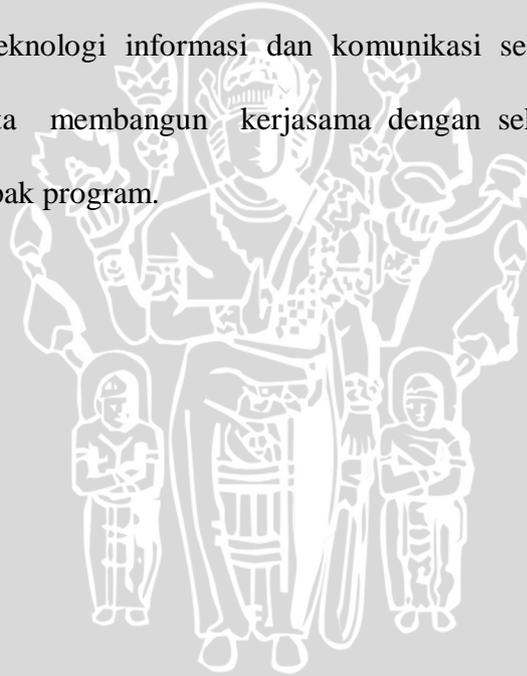
- a. Ditujukan pada sekolah dan masyarakat yang kurang beruntung atau tertinggal
- b. Terfokus pada guru, siswa dan proses belajar
- c. Terintegrasikan dalam kebijakan, sistem dan lembaga yang ada
- d. Menggalang kerjasama
- e. Mengupayakan pemerataan dan peran serta.

H. DBE2

Program Pendidikan Dasar yang Terdesentralisasi USAID bertujuan untuk mengembangkan kualitas belajar mengajar di sekolah dasar di Indonesia melalui serangkaian pendekatan inovatif yang dirancang untuk memperkuat pelatihan guru dan meningkatkan pemanfaatan lingkungan belajar di sekolah. Dipimpin oleh *Education Development Center, Inc.* (EDC) dan didukung oleh *Academy for Educational Development* (AED) beserta *Research Triangle Institute* (RTI), DBE 2 bekerjasama dengan USAID Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, sektor publik dan juga swasta mengembangkan suatu pilihan sistem terkini untuk peningkatan profesionalisme guru serta penguatan kemampuan tenaga pendidik dan

administrator untuk mengawali, memfasilitasi dan mempromosikan peningkatan mutu sekolah di seluruh wilayah Indonesia.

DBE 2 menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan sistem pendidikan dasar di Indonesia, termasuk diantaranya desentral-isasi pelatihan guru yang diakreditasi oleh universitas; kepemimpinan dalam pengelolaan belajar mengajar; instruksi audio interaktif (IAI) untuk guru dan siswa Taman Kanak-kanak (TK); pusat sumber belajar gugus; kerjasama antar universitas di Indonesia dan Amerika Serikat; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat belajar mengajar serta membangun kerjasama dengan sektor swasta untuk perluasan dampak program.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri Furchan (1992:21). Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif Lexy J. Moelong adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*), peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.
2. Menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari (*grounded Theory*), deskripsi (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dengan kerangka-kerangka, lebih mementingkan proses daripada hasil.
3. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus, desain bersifat sementara, adanya criteria khusus untuk keabsahan data, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Menurut Sugiyono (2008:143) Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian

kualitatif tidak menekankan pada generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan langsung di Kabupaten Nganjuk tepatnya pada SDN Tanjunganom 4 sebagai SD imbas 1 dan SDN Kutorejo 1 Kertosono. Selain itu, hasil yang akan diperoleh dari penelitian berdasarkan survey atau berdasarkan kenyataan yang didapatkan selama penelitian lapangan berlangsung serta diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai informan.

Berdasarkan uraian defenisi diatas, melalui penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai “Evaluasi Dampak rangka peningkatan mutu pendidikan dasar” (Studi tentang Program *Desentralized Basic Education* (DBE 2) Di Kabupaten Nganjuk) serta mengungkap fakta-fakta di lapangan yang nantinya dikaitkan dengan teori yang digunakan, hingga diambil suatu kesimpulan dan dikemas dalam suatu tulisan yang sistematis.

B. Fokus Penelitian

Seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2007:12) bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian.

Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu: batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus, dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui evaluasi dampak program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar di kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu penulis memberikan batasan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan, antara lain :
 - a. Pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Nganjuk.
 - b. Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) yang dilakukan SDN Tanjunganom 4 (imbas 1) dan SDN Kutorejo 1 Kertosono.
 - c. Stakeholder yang terlibat dalam Program *Decentralized Basic Education* (DBE2)

2. Dampak pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di kabupaten

Nganjuk dapat dilihat dari :

a) Peningkatan Sumberdaya Manusia

a. Munculnya Kreativitas siswa dalam proses pembelajaran di kelas.

b. Peningkatan hasil belajar peserta didik baik secara akademik maupun non akademik.

c. Peningkatan kemampuan mengajar guru dan prestasi guru.

b) Tercipta sistem sekolah berbasis gugus yang efektif dalam mendukung pengembangan metode pembelajaran berkesinambungan bagi guru.

a. Pengembangan jaringan gugus sekolah untuk menghubungkan sekolah dengan jaringan global.

b. Lapora mutu sekolah

c. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan proses pembelajaran.

3. Faktor - faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) di kabupaten Nganjuk:

1). Faktor pendukung

a. Faktor Internal :

a). Lokasi/tempat penerapan program.

- b). Sarana dan Prasarana Program.
- c). Sumber Daya Manusi (SDM) dari pelaksana program.

b. Faktor Eksternal

- a). Relevansi Program-program pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat.
- b). Dukungan dari perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang menghasilkan dan meningkatkan kemampuan guru-guru SD.

2). Faktor Penghambat

a. Faktor internal

- a). Sumber Daya Manusia MTT (*Master Teacher Trainer*).
- b). Keterlambatan pencairan dana

b. Faktor eksternal

- a). Sosialisasi kepada masyarakat
- b). Persaingan antar sekolah.

C. Lokasi Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi dilaksanakan di kabupaten Nganjuk tepatnya pada SDN Tanjunganom 4 (imbas 1) dan SDN Kutorejo 1 Kertosono. Lokasi ini dipilih karena menurut peneliti, kabupaten Nganjuk merupakan satu

diantara dua kabupaten di Jawa Timur yang berhasil menerapkan program desentralisasi pendidikan, khususnya komponen program kedua yang didanai oleh USAID atau yang lebih dikenal dengan nama *Decentralized Basic Education* (DBE2) dan program ini sudah direalisasikan sejak tahun 2006 sampai 2011. Oleh karena itu peneliti ingin mengevaluasi bagaimana dampak program yang bekerjasama dengan USAID ini apakah sudah mampu meningkatkan mutu pendidikan dasar di kabupaten Nganjuk khususnya.

Situs penelitian menunjukkan dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap objek yang akan diteliti, sehingga keakuratan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian dapat diperoleh. Situs dalam penelitian ini adalah sekolah mitra yang sukses menerapkan program *Decentralized Basic Education* (DBE2), yakni : SDN Kuterejo 1 Kertosono dan SDN 4 Tanjanganom (imbas 1).

D. Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan dari dokumen, foto, peta, dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Kata dan tindakan

Kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, perekaman, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data

utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong 2000:112).

Jadi dalam hal ini peneliti berusaha mengali informasi dari lapangan mengenai bagaimana dampak program *Decentralized Basic Education* (DBE2), melalui wawancara dengan cara direkam ataupun dicatat kepada stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, dan untuk lebih menguatkan data peneliti mengambil foto dari dampak yang dihasilkan oleh program *Decentralized Basic Education* (DBE2)

2. Sumber Tertulis

Sumber data tertulis ini dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip dokumen resmi bertanya (Moleong 2000:113). Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan oleh peneliti. Sumber data primer dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara untuk mendapatkan data primer dari narasumber yang terkait, antara lain:

a). Monitoring dan mentor program *Decentralized Basic Education* (DBE2) yang dilaksanakan di kabupaten Nganjuk, yang terdiri

dari kordinator propinsi, serta pendamping program atau yang sering disebut dengan *Master teacher trainer* (MTT).

1. Bapak Kasman selaku *provincial coordinator* (PC) program *Decentralized Basic Education* (DBE2).
 2. Bapak Sunardi *Master teacher trainer* (MTT) 1 program *Decentralized Basic Education* (DBE2) kec. Kertosono dan tanjunganom.
 3. Bapak Agus santoso *Master teacher trainer* (MTT) II program *Decentralized Basic Education* (DBE2) kec. Kertosono.
 4. Bapak Satriyo abadi selaku staff dinas pendidikan dasar kabupaten Nganjuk.
- b). Pelaksana dan sumberdaya yang dilibatkan dalam program *Decentralized Basic Education* (DBE2) kec. Kertosono dan Tanjunganom yang terdiri dari Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) serta para guru yang terlibat di pelatihan.
1. Ibu Ari mangesti selaku ketua PSBG gugus 01 kec. Tanjunganom.
 2. Ibu Hanfik Warmiati selaku kepala sekolah SDN Tanjunganom 4 kec. Tanjunganom
 3. Bapak Agus santoso selaku kepala sekolah SDN kutorejo 1 Kertosono.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini dapat berupa dokumen resmi, majalah, dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan kaitan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) yang dilaksanakan di kabupaten Nganjuk, dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dan informasi dampak yang sudah dihasilkan oleh program *Decentralized Basic Education* (DBE2) SDN Kutorejo 1 Kertosono serta SDN 4 Tanjunganom (imbas 1). Yang termuat dalam *website* Pusat Pembelajaran Gugus (PBS) Tanjunganom dan Kertosono.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab sekaligus memecahkan permasalahan yang ada. Maka dari itu data tersebut harus valid dan akurat. Sugiyono (2006:156), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan realibilitas, instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan realibilitas, instrumen

dan kualitas pengumpulan data dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000:135).

Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data tentang evaluasi dampak program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di kabupaten Nganjuk. Wawancara ini ditunjukkan kepada *propincial coordinator* (PC) , master program yang ditunjuk dari provinsi, *Master Teacher Trainer* (MTT), ketua Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG), serta kepala sekolah yang sekolahnya menerapkan program tersebut.

2. Observasi

Nawawi & martini dalam Afifudin dan A. Saebani (2009: 134) mengatakan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam suatu penelitian.

Metode observasi ini peneliti gunakan untuk mengetahui secara langsung dan jelas terhadap apa yang terdapat dilapangan, observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi dampak program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di kabupaten Nganjuk, melalui mitra program tersebut yakni) SDN Kutorejo 1 Kertosono serta SDN 4 Tanjunganom (imbas 1) dan ditinjau dari teori evaluasi dampak kebijakan publik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang yang tertulis, dimana dalam melaksanakan teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2002:135).

Dengan teknik ini, peneliti melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber yang ada dilokasi. Misalnya, dalam bentuk darft, tabel, dan sebagainya. Dokumen- dokumen yang diperoleh yaitu dari website SDN Tanjunganom 4 (imbas 1) dan SDN Kutorejo 1 Kertosono yang tersimpan dalam Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG).

F. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan instrument dalam pelaksanaannya. Menurut Moleong (2007:168) mengatakan dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti itu sendiri) sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Dalam penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan data diatas, maka instrument penelitian yang dipergunakan antara lain :

1. Peneliti Sendiri

Dalam Penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama karena hanya peneliti yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya dan mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan serta peneliti sendiri yang dapat menilai apakah kehadiran peneliti menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hambatan-hambatan, peneliti bisa langsung menyadari dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Dalam Melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisikan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang hendak diajukan kepada responden dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan penulis dalam rangka mencari data.

3. Perangkat Penunjang Lapangan

Perangkat penunjang lapangan merupakan alat yang diperlukan penulis untuk mengumpulkan data, seperti *tape recorder* atau kamera untuk merekam suara dan foto-foto aktivitas yang dilakukan responden, hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis ketika pelaksanaan wawancara ada bagian yang tidak dapat ditangkap langsung oleh penulis.

4. Dokumen dan Arsip-arsip

Instrumen ini berupa data dari salinan arsip atau catatan resmi yang diperoleh penulis dari Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG), yang kemudian nantinya digunakan penulis untuk menambah hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Pekerjaan analisis data ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode, dan mengkategorikannya (Moleong, 2000:103).

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992:16-21) mengatakan, bahwa analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan terdiri dari reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, model analisis interaktifnya bisa dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Komponen-komponen analisis data model interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 247)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bagaimana alur dalam analisis data kualitatif, dapat dijelaskan bahwa :

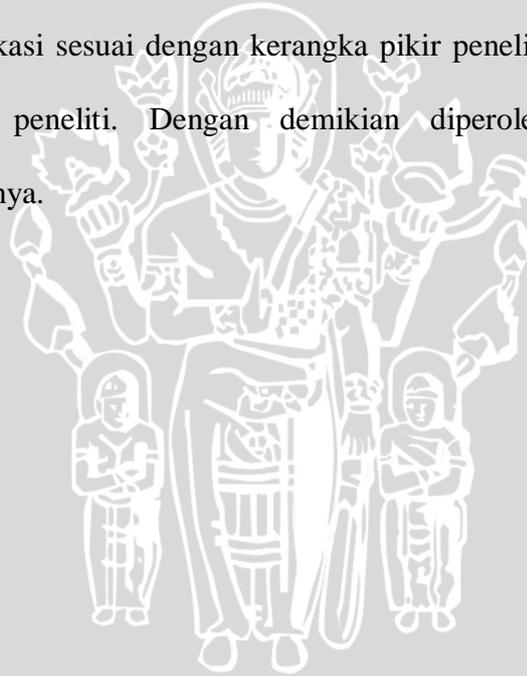
1. Pengumpulan Data : langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi dengan narasumber-narasumber yang relevan dengan fokus penelitian, seperti Monitoring dan mentor program *Decentralized Basic Education* (DBE2) yang dilaksanakan di kabupaten Nganjuk, yang terdiri dari kordinator propinsi, serta pendamping program atau yang sering disebut dengan *Master teacher trainer* (MTT), Pelaksana dan sumberdaya

yang dilibatkan dalam program *Decentralized Basic Education* (DBE2) kec. Kertosono dan Tanjunganom yang terdiri dari Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) serta para guru yang terlibat di pelatihan.

2. Reduksi Data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. artinya disini peneliti melakukan penelaahan terhadap semua data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan dan yang telah dijelaskan diatas. Peneliti melakukan proses reduksi data terhadap data yang dikumpulkan dengan cara membuat tabelisasi dan abstraksi, yaitu berusaha membuat rangkuman dan tabelisasi pada masing-masing fokus. Dalam proses ini peneliti juga mengabaikan data atau informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan, dan fokus penelitian. Sehingga data-data yang tersaji adalah data yang memang berhubungan dengan judul dari penelitian itu sendiri.
3. Penyajian Data adalah susunan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya disini bahwa data yang telah direduksi peneliti, kemudian peneliti melakukan display dalam bentuk laporan, penyajian data yang bersumber dari situs dan lokasi penelitian disajikan sesuai dengan format yang telah diatur oleh Fakultas Ilmu Administrasi sehingga data tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak.

Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi diintegrasikan oleh peneliti dan juga dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga tersaji laporan yang memiliki kekayaan informasi dan pengetahuan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi adalah kesimpulan akhir yang baru akan ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi mengenai dampak program program *Decentralized Basic Education* (DBE2), kemudian kesimpulan tersebut akan diverifikasi sesuai dengan kerangka pikir peneliti maupun dengan kolega peneliti. Dengan demikian diperoleh validitas dan akurasinya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam hal ini adalah kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibukotanya di Nganjuk. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Jombang di timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Madiun di barat. Nganjuk juga dikenal dengan julukan *Kota Angin*.

a. Pembagian Administratif

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar ± 122.433 Km² atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas:

- a). Tanah sawah 43.052.5 Ha
- b). Tanah kering 32.373.6 Ha
- c). Tanah hutan 47.007.0 Ha

Dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan pegunungan, Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian. Kondisi dan struktur tanah yang produktif ini sekaligus

ditunjang adanya sungai Widas yang mengalir sepanjang 69,332 km dan mengairi daerah seluas 3.236 Ha, dan sungai Brantas yang mampu mengairi sawah seluas 12.705 Ha.

Jumlah curah hujan per bulan selama 2002 terbesar terjadi pada bulan Januari yaitu 7.416 mm dengan rata-rata 436 mm. Sedangkan terkecil terjadi pada bulan November dengan jumlah curah hujan 600 mm dengan rata-rata 50 mm. Pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tidak terjadi hujan sama sekali.

b. Sejarah

Nganjuk dahulunya bernama Anjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa Kuna berarti Tanah Kemenangan. Dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi (www.nganjukkab.go.id/Pemkab_Nganjuk/2010..._Profil_Nganjuk).

Berdasarkan peta Jawa Tengah dan Jawa Timur pada permulaan tahun 1811 yang terdapat dalam buku tulisan Peter Carey yang berjudul : "Orang Jawa dan masyarakat Cina (1755-1825)", penerbit Pustaka Azet, Jakarta, 1986; diperoleh gambaran yang agak jelas tentang daerah Nganjuk. Apabila dicermati peta tersebut ternyata daerah Nganjuk terbagi dalam 4 daerah yaitu Berbek, Godean, Nganjuk dan Kertosono merupakan daerah yang dikuasai Belanda dan kasultanan Yogyakarta, sedangkan daerah Nganjuk merupakan mancanegara kasunanan Surakarta.

Sejak adanya Perjanjian Sepreh 1830, atau tepatnya tanggal 4 juli 1830, maka semua kabupaten di Nganjuk (Bebek, Kertosono dan

Nganjuk) tunduk dibawah kekuasaan dan pengawasan *Nederlandsch Gouvernement*. Alur sejarah Kabupaten Nganjuk adalah berangkat dari keberadaan kabupaten Berbek dibawah kepemimpinan Raden Toemenggoeng Sosrokoesoemo 1. Dimana tahun 1880 adalah tahun suatu kejadian yang diperingati yaitu mulainya kedudukan ibukota Kabupaten Berbek pindah ke Kabupaten Nganjuk.

Dalam *Statsblad van Nederlansch Indie* No.107, dikeluarkan tanggal 4 Juni 1885, memuat SK Gubernur Jendral dari *Nederlandsch Indie* tanggal 30 Mei 1885 No 4/C tentang batas-batas Ibukota Toeloeng Ahoeng, Trenggalek, Ngandjoek dan Kertosono, antara lain disebutkan: III tot hoofdplaats Ngandjoek, afdeling Berbek, *de navalgende Wijken en kampongs : de Chineeshe Wijk de kampong Mangoendikaran de kampong Pajaman de kampong Kaoeman*. Dengan ditetapkannya Kota Nganjuk yang meliputi kampung dan desa tersebut di atas menjadi ibukota Kabupaten Nganjuk, maka secara resmi pusat pemerintahan Kabupaten Berbek berkedudukan di Nganjuk.

c. Pembagian Administratif

Nganjuk mempunyai 20 kecamatan dan 284 desa atau kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah

Tabel 2
Kecamatan Di Kabupaten Nganjuk

No	Nama Kecamatan		
1.	Bagor	11.	Ngluyu
2.	Baron	12.	Ngronggot
3.	Berbek	13.	Pace
4.	Gondang	14.	Patianrowo
5.	Jatikalen	15.	Prambon
6.	Lengkong	16.	Rejoso
7.	Lengkong	17.	Sawahan
8.	Loceret	18.	Sukomoro
9.	Nganjuk	19.	Tanjunganom
10.	Ngetos	20.	Wilangan

Sumber : www.nganjukkab.go.id

d. Agama dan budaya

Mayoritas penduduk di Kabupaten Nganjuk memeluk agama Islam dengan jumlah hampir 99%, dan sisanya menganut agama Kristen, Hindu, Budha, Khonghucu (www.nganjukkab.go.id).

e. Transportasi

Nganjuk dilintasi jalur utama Surabaya -Yogyakarta, serta menjadi persimpangan dengan jalur menuju Kediri. Nganjuk juga dilintasi jalur kereta api Surabaya-Yogyakarta-Bandung atau Jakarta.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

Situs Penelitian dalam hal ini adalah SDN Kuterejo 1 Kertosono dan SDN 4 Tanjanganom.

a). SDN Kuterejo 1 Kertosono

PROFIL SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SDN
2. Nomor Statistik Sekolah : 101051409022
3. Tipe Sekolah : A
4. Alamat Sekolah : Jl. Supriadi No. 4 Ds. Kuterejo
Kecamatan Kertosono
Kabupaten Nganjuk
Propinsi Jawa Timur
5. Telepon/HP/Fax : 08175089735
6. Status Sekolah : Negeri
7. Luas Lahan/Tanah : 1492M
8. Status Kepemilikan : Pemerintah
9. Nama Kepala Sekolah : AGUS SANTOSO,S.Pd.M.MPd
10. Tingkat Pendidikan : S2
11. Masa Kerja Kepala Sekolah : 32 tahun
12. Nilai Akreditasi Sekolah : A

Sumber: Data SDN Kuterejo 1 Kertosono 2012

Tabel 3
Data Kependidikan Sekolah

No.	Data Kelas	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa		Jumlah
			L	P	
1.	1	2	33	33	36
2.	2	2	38	33	71
3.	3	2	39	40	79
4.	4	2	43	37	80
5.	5	2	37	32	69
6.	6	2	33	38	71
Total		12	223	213	436

Sumber: Data SDN Kutorejo 1 Kertosono 2012

Tabel 4
Jenjang Pendidikan Dan Status Guru

No.	Tingkat Pendidikan	Status Guru			Jenis Kelamin		Jumlah
		GT	GB	GTT	L	P	
1.	S3/S2			1	1		1
2.	S1	9		7	5	11	16
3.	D4						
4.	D3/SARMUD						
5.	D2/PGSD						
6.	D1						
7.	SPG/SGO						
Jumlah		9		8	6	11	17

Sumber: Data SDN Kutorejo 1 Kertosono 2012

Tabel 5
Data Jumlah Guru Sesuai Dengan Bidangnyanya

No.	Mata Pelajaran	Jumlah Guru (GT, GB, GTT)
1.	IPA	
2.	Matematika	
3.	Bahasa Indonesia	
4.	Bahasa Inggris	1
5.	Pendidikan Agama	3
6.	IPS	
7.	Penjaskes	2
8.	Kertakes	
9.	PKn	
10.	TIK	
11.	BK	
12.	Kelas	10
13.	Lainnya	1
Total		17

Sumber: Data SDN Kutorejo 1 Kertosono 2012

Tabel 6
Pegawai Administrasi (Tata Usaha)

No.	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian		Jenis Kelamin		Jumlah
		Tetap	PTT	L	P	
1.	S2/S1					
2.	D3/SARMUD					
3.	D2		1		1	1
4.	D1					
5.	SMA					
6.	SMP					
7.	SD					
Total			1		1	1

Sumber: Data SDN Kutorejo 1 Kertosono 2012

Tabel 7
Data Perpustakaan

No.	Jenis Buku	Judul Buku	Exemplar
1.	Buku Paket	5	2143
2.	Buku Referensi	540	7098
3.	Buku Bacaan	940	4132

Sumber: Data SDN Kutorejo 1 Kertosono 2012

Tabel 8
Kepemilikan Fasilitas Ruang/Laboratorium

No.	Jenis Ruang	Jumlah	Ukuran P X L	Kondisi			
				B	CB	KB	TB
1.	Laboratorium IPA						
2.	Laboratorium Bahasa						
3.	Laboratorium Komputer						
4.	Laboratorium Audio Visual						
5.	Ruang Kelas	10		V			
6.	Ruang Ketrampilan/Kesenian						
7.	Ruang Perpustakaan	1		V			
8.	Ruang Kepala Sekolah	1		V			
9.	Ruang Guru						
10.	Ruang Tata Usaha						
11.	Kamar Mandi/WC Siswa	4			4		
12.	Kamar Mandi/WC Guru	1			4		
13.	Kamar Mandi/WC Kepala Sekolah						
14.	Aula						
15.	Ruang Lainnya	4		2			2

Sumber: Data SDN Kutorejo 1 Kertosono 2012

Keterangan Kondisi :

B = Baik KB = Kurang Baik

TB = Tidak Baik CB = Cukup Baik

b). SDN 4 Tanjunganom**Profil Sekolah Tahun 2012**

Nama Sekolah	SDN Tanjunganom 4
Alamat/Telp	Jl. Basuki Rahmat No.03 Kel. Tanjunganom/ (0358) 775286
Visi & Misi	“Unggul Dalam Prestasi Terampil Dan Budi Pekerti Luhur Berdasarkan Iman Dan Taqwa” 1. Menyiapkan Generasi Unggul Yang Memiliki Potensi Dibidang Iman Dan IPTEK” 2. Membentuk Sumberdaya Mausia Yang Aktif Kreatif Dan Inovatif Sesuai Dengan Perkembangan Zaman 3. Membangun Citra Sekolah Sebagai Mitra Masyarakat 4. Menanamkan Sikap Dan Perilaku Yang Mencerminkan Nilai Agama.

Tujuan

- Rata-Rata Nilai Uas Tiap

Pelajaran Mencapai 8,00.

- Mampu Meraih Kejuaraan

Tingkat Kecamatan,

Kabupaten, Provinsi Dan

Nasional.

- Terwujudnya Sdn

Tanjunganom 4 Sebagai

Sekolah Dalam Penerapan

MBS :

1. Suasana Sekolah

Yang Asri (Aman,

Sejuk, Rindang Dan

Indah).

2. Bangunan Runag

Kelas Yang Cukup.

3. Lingkungan Sekolah

Yang Mendukung.

- Adanya

Taman

Sekolah

- Adanya

Lapangan



Olahraga.

- Adanya

Warung

Sekolah.

Nomor Pokok Sekolah (NPSN)	20538264
Nomor Statistik	101051413044
Tahun Pendirian	1960
Jenjang Akreditasi	Sekolah Dasar
Luas Tanah	(Sertifikat Bergabung Dengan SDN Tanjunganom 2)
Luas Bangunan	516 M ²
Status Kepemilikan	Hak Pakai
Tanda Bukti Kepemilikan Tanah	Sertifikat
Jumlah Murid TP 2011/2012	214
Jumlah Rombongan Belajar	6
Jumlah Guru Dan Karyawan	12
Jumlah Ruang Belajar	6
Jumlah Ruang Kelas Rusak	Rr. 5 Rs. 1 Rb.-
Nama Bank	Bank Jatim
Nomor Rekening	0192051380
Atas Nama Rekening	Hanfik Warmiati, S.Pd

Ari Mangesti, S.Pd, M.MPd.

Nama Kepala Sekolah

Hanfik Warmiati, S.Pd

NIP

19580824 197803 2 010

No.Telp. Kepala Sekolah

(0358) 772065

Sumber: Data SDN Tanjunganom 4 2012

Tabel 9
Rekapitulasi Data Pendidik Dan Kependidikan
SDN Tanjunganom 4 Tahun 2012

NO	NAMA	NIP	L	P
1	Hanafik Harmati, S.Pd	195808241978032000	-	1
2	Yayuk Suprihatin, S.Pd	196004221978052001	-	1
3	Ari Mangesti, S.Pd, M.MPd	196111081981122000	-	1
4	Saribit, S.Pd	196410111986022000	-	1
5	Sugiwati, S.Pd	196302261994032004	-	1
6	Abdul Malik, S.Ag	195504291978071001	1	
7	Mulyatini, S.Pd	-	-	1
8	Wiji Astutik, S.Pd	-	-	1
9	Masviati, S.Pd	-	-	1
10	Ummi Nasiroton, S.Ag	-	-	1
11	Umi Kushariani, S.E.	-	-	1
12	Slamet Warjianto	-	1	
JUMLAH			2	10

Sumber: Data SDN Tanjunganom 4 2012

B. Hasil Data Fokus Penelitian

1. Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan.

a. Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan Di Nganjuk.

Dalam pelaksanaannya program *Decentralized Basic Education* (DBE2) di kabupaten Nganjuk lebih memfokuskan kegiatannya kedalam paket-paket pelatihan yang telah diterapkan sebagai alternatif sistem pengembangan profesional guru yang modern, memperkuat kapasitas pendidik dan administrasi untuk memulai, memfasilitasi, dan mempromosikan perbaikan sekolah di kabupaten Nganjuk. *Decentralized Basic Education* (DBE2), mengimplementasikan beberapa strategi untuk meningkatkan sistem pendidikan dasar di kabupaten Nganjuk, termasuk di dalamnya: pelatihan guru terdesentralisasi yang diakreditasi oleh universitas; kepemimpinan dan manajemen pembelajaran; instruksi audio interaktif (IAI) untuk guru dan siswa Taman Kanak-kanak (TK); pusat sumber belajar gugus; kerjasama dengan universitas di Indonesia; teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat pembelajaran (*Sumber: Panduan Praktek Terbaik DBE2 2010*). Paket-paket pelatihan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) antara lain :

a). Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG)

Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) merupakan bentuk pengembangan dari Pusat Kegiatan Guru (PKG). Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) dibentuk oleh sekolah serta komunitas pendidikan di gugus sekolah yang bersangkutan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) sebagai unit pelayanan teknis pembelajaran yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dapat digunakan oleh para guru, kepala sekolah serta tenaga kependidikan lainnya untuk berinteraksi dengan berbagai sumber belajar dalam mengembangkan kreatifitas pembelajarannya.

Aktifitas yang dilakukan di Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran. Ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan di Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) tidak berdiri sendiri tetapi merupakan kegiatan integral dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) merupakan *agent* yang dinamis dan aktif dalam pengembangan kapasitas guru.

Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh koordinator distrik program *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk.

“Selama DBE masuk sejak tahun 2006 dan berakhir 2011 telah ada sedikitnya 10 sekolah yang dibina oleh DBE, dan setiap wilayah ditunjuk satu sekolah sebagai gugus inti sekaligus sebagai wadah pengembangan program DBE ini. terdapat dua sekolah dikabupaten nganjuk yang ditunjuk sebagai gugus inti, yakni SDN kutorejo 1 Kertosono diwilayah timur sedangkan di barat diwakili SDN Tanjunganom 2 dan disetiap gugus inti terdapat pusat sumber belajar (PSGB) yang tujuan pokoknya adalah

Terwujudnya Profesionalisme dan Kreativitas guru selaras dengan kemajuan IPTEK dilandasi dengan budi pekerti”.

(Sumber: Wawancara, Rabu 24 oktober 2012 pukul 10.00 WIB).

Oleh karena itulah terdapat Pusat Sumber Belajar Gugus (PSGB) fungsinya sangat penting didalam menunjang keberlangsungan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) di kabupaten Nganjuk ini, sebelum setiap stakeholder yang terdiri dari : guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan dan wali murid melaksanakan suatu kegiatan semua stakeholder tersebut dibina dan diarahkan terlebih dahulu di Pusat Sumber Belajar Gugus (PSGB) dalam hal ini semua stakeholder yang terlibat bersinergi untuk bagaimana merumuskan bagaimana melaksanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sukses. Selain itu Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) juga mempunyai beberapa fungsi penting antara lain :

1) Fungsi Pertemuan

Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) sebagai tempat warga gugus untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan baik rutin maupun insidental yang berkaitan dengan kegiatan profesionalnya, misalnya pertemuan KKG, KKKS, dll.

2) Fungsi Informasi

Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) merupakan tempat di mana warga gugus dapat memperoleh informasi pendidikan dan pembelajaran. Berbagai informasi baik dalam bentuk referensi yang diperoleh dari nara sumber, materi cetak, non cetak ,

maupun online dapat diakses di Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG).

3). Fungsi Produksi

Pembuatan alat peraga sederhana dan media pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar mereka di sekolah masing-masing juga dilaksanakan di Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG).

4). Fungsi Pengembangan Profesi

Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG), juga melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan profesi seperti: pelatihan, simulasi, *peer teaching*, diskusi serta kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan profesionalisme guru.

b). Pembelajaran Aktif dengan TIK

Program Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Decentralized Basic Education* (DBE 2) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru Sekolah Dasar (SD) menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran aktif. Tujuan ini ditempuh melalui dua program inti TIK *Decentralized Basic Education* (DBE 2):

1). *Intel Teach Getting Started*

Pelatihan program *Intel Teach Getting Started* merupakan kerjasama antara *Decentralized Basic Education* (DBE 2) dan *Intel Corporation* melalui komponen kerjasama pihak publik dan

swasta. Pelatihan ini dirancang untuk mengajarkan ketrampilan dasar untuk guru yang tidak atau belum mempunyai pengalaman dalam menggunakan perangkat TIK. Melalui pelatihan ini guru diperkenalkan bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi pada komputer dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada saat pelatihan, guru mempelajari pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan dokumen-dokumen seperti pengaturan tempat duduk, presentasi dan absensi siswa dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Office*. Pelatihan ini juga memberikan pengalaman bagi guru dalam menjalankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, Pembelajaran Berbasis Proyek (PBL) dan pembelajaran kolaboratif berbasis proyek dengan sesama rekan guru.

2). Pelatihan DALI (*Development Active Learning With ICT*) untuk guru.

Pelatihan program DALI (*Development Active Learning With ICT*) merupakan pendalaman dari program pelatihan *Intel Teach Getting Started*, dimana pada pelatihan ini guru mempelajari penggunaan perangkat TIK untuk menunjang proses pembelajaran aktif. DALI terdiri dari sembilan modul pelatihan dimana guru dilatih untuk menggunakan perangkat TIK seperti komputer, kamera video dan digital serta aplikasi komputer yang dapat menunjang proses pembelajaran aktif. Pelatihan DALI menitikberatkan pada pendekatan pedagogis (fasilitasi,

penyusunan pembelajaran, dan pengelolaan kelas) yang mengangkat pembelajaran kolaboratif dan ketrampilan berpikir tingkat tinggi. Pada pelatihan DALI, guru merancang rencana pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai perangkat TIK. Setelah mengikuti pelatihan ini, guru dapat menggunakan peralatan TIK didalam kelas melalui sistem peminjaman yang berlaku di Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG), hal ini sesuai penuturan *master teacher trainner* (MTT) program *Decentralized Basic Education* (DBE 2) wilayah Kertosono.

“Pelatihan semacam ini sangat penting program *Decentralized Basic Education* (DBE 2) di Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) memberikan pelatihan IT kepada guru dan kepala sekolah yang meliputi *Intel Teach Getting Started* dan Pengembangan Pembelajaran Aktif dengan TIK (DALI), pelatihan diadakan setiap pecan dan langsung diadakan evaluasi , maka dari itu para guru bisa langsung menerapkannya dalam proses pembelajaran dikelas”.

(Sumber: Wawancara, Jum'at 26 oktober 2012 pukul 17.30 WIB).

Selain itu DBE 2 juga sedang menjalankan dua program rintisan, yaitu Kegiatan Kelas Satu Komputer dan pengembangan serta penerapan kursus pendampingan online: Strategi dan Teknik Pendampingan Berbasis Sekolah. Program - program ini diharapkan dapat menjadi sebuah landasan yang kemudian dapat dikembangkan oleh pihak pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di kabupaten Nganjuk.

c. Paket Pelatihan Terakreditasi

1). Prinsip – prinsip pelatihan DBE 2

a). Pendekatan menyeluruh (*holistic approach*)

Agar pelatihan ini memberi dampak perubahan nyata dalam pembelajaran di sekolah, pelatihan ini dirancang untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dan institusi kependidikan yang terkait dengan pengembangan sekolah, hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh *master teacher trainner* (MTT) wilayah Kertosono.

“Pemangku kepentingan dalam program pelatihan yang bertempat digugus inti tersebut meliputi unsur Diknas dan Depag, unsur PSBG atau PKG atau Gugus, para guru, kepala sekolah, wakil komite sekolah dan pengawas yang terkait dengan sekolah tersebut”

(*Sumber: Wawancara, Selasa 7 Novembaer 2012 pukul 10.00 WIB*).

Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan mereka mempunyai visi yang sama, ada rasa memiliki dan memberikan dukungan untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa apabila hanya kepala sekolah yang diberi pelatihan ternyata cenderung tidak ada perubahan di sekolah karena tanpa didukung SDM yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kurang didukung oleh pengambil kebijakan, baik dari pihak Diknas (Departemen Pendidikan Nasional) maupun dari pihak Depag (Departemen Agama). Kalau hanya gurunya saja yang diberi pelatihan juga kurang terjadi perubahan karena tidak ada dukungan dari atasan maupun pihak lainnya.

1. Partisipasi masyarakat

Dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangatlah penting dalam proses peningkatan mutu pembelajaran. Masyarakat orang tua dan mungkin para tokoh masyarakat setempat yang tergabung dalam forum Komite Sekolah dan para pengurus forum gugus sekolah mempunyai peranan penting dalam merancang program pelatihan. Mereka dapat memusyawarahkan kebutuhan pelatihan, berbagai sumber yang bisa dimanfaatkan. Masyarakat dapat juga memberikan dukungan dalam bentuk dana, sumber daya manusia dan pemikiran. Kalau semua dirancang berdasarkan kebutuhan sesungguhnya, memanfaatkan nara sumber yang ada, pelatihan akan menjadi lebih efektif dan berkesinambungan.

2. Menggunakan struktur yang ada

Pelatihan diupayakan memanfaatkan sistem atau struktur yang ada dan tidak menciptakan struktur yang baru. Adanya struktur atau forum di gugus seperti KKG, KKKS, KKPS merupakan wahana yang bisa dimanfaatkan untuk pelatihan bagi mereka. Dengan berpijak pada struktur yang ada, program dan kegiatan pelatihan ini akan berkelanjutan meskipun proyek sudah berakhir dan ini akan menjadi kegiatan rutin di gugus tersebut.

3. Lingkungan dan Media dan Bahan Ajar Murah

Agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa, disarankan pembelajaran dengan menggunakan media. Banyak bahan-bahan murah atau bahan-bahan bekas di sekitar kita dapat dimanfaatkan sebagai media dan sumber pembelajaran, baik itu yang bersifat alami maupun buatan. Benda-benda seperti batu, kayu, pasir, kertas, kardus bekas, plastik, dll. merupakan contoh yang dapat digunakan untuk media. Bahan-bahan murah atau bekas ini dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan materi pelajaran. Semua ini perlu dilakukan pada saat pelatihan sehingga ini dapat menjadi contoh bagaimana mereka nanti menerapkannya di sekolah.

Lingkungan juga dapat dimanfaatkan sebagai media atau sumber belajar. Lingkungan dapat mencakup lingkungan budaya, sosial, maupun alam, seperti misalnya, pantai, sawah, sungai, hutan, pasar, dan museum. “Berkaitan dengan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan, peserta didik dapat didekatkan dengan lingkungan atau lingkungan didekatkan ke peserta didik. Ini juga dilakukan di pelatihan sebagai model bagi para peserta dalam menerapkannya di kelas nanti”.

(Sumber : Panduan Praktik Terbaik DBE 2 (Paket Pelatihan Terakreditasi) 2010).

4. Jembatan Penghubung Perguruan Tinggi (PT) dengan Sekolah

Pelatihan terakreditasi ini dapat menjadi jembatan untuk mendekatkan hubungan antara sekolah dengan perguruan tinggi,

khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Tarbiyah, yang bertanggungjawab untuk menghasilkan para calon guru. Dengan kedekatan hubungan antara perguruan tinggi dengan sekolah, perguruan tinggi dapat memahami dengan sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di sekolah. Dengan demikian, mereka dapat merancang dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sekolah.

a. Memanfaatkan TIK

Sejalan dengan perkembangan jaman, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan media yang dapat mempermudah kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan pendidikan kita. Agar pelatihan menjadi lebih efisien dan efektif, disarankan dapat memanfaatkan TIK baik berupa presentasi teks, foto, gambar maupun penggunaan video. Dengan pemanfaatan TIK ini, tampilan akan lebih jelas, bermakna dan lebih menarik. Ini sekali gus juga menjadi model bagi peserta untuk bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolah.

b. *Bottom Up dan Top Down Approach*

Pelatihan ini dikembangkan dengan *Bottom Up Approach* atau pendekatan dari bawah dan dari atas. Pelatihan ini dirancang sesuai dengan kebutuhan para guru dan tenaga kependidikan di lapangan dan melibatkan tim pengembang dari orang-orang di lapangan. Menggunakan *Top Down Approach* atau pendekatan dari atas ke bawah, artinya pengembangan paket pelatihan melibatkan orang-orang perguruan tinggi

untuk memberikan masukan-masukan tentang kesesuaian materi pelatihan dengan kurikulum keguruan di perguruan tinggi. Dengan demikian, pelatihan membantu para tenaga lapangan untuk menjalankan tugas sebagai guru maupun tenaga kependidikan lainnya dan pada saat yang sama mereka mendapat pengakuan kredit (SKS) dari perguruan tinggi karena juga sudah dipertimbangkan kesesuaiannya dengan kurikulum perguruan tinggi.

c. Dekat Dengan Tempat Tugas

Mengingat peserta adalah orang dewasa biasanya berkeluarga dan yang mempunyai tugas terkait dengan pekerjaannya dan keluarga. Untuk itu pelaksanaan pelatihan diupayakan dekat dengan tempat tugas atau tempat tinggal mereka sehingga mereka tidak perlu harus menginap. Oleh karena itu, pelatihan DBE 2 dilaksanakan berbasis gugus sekolah para peserta.

d. Pelatihan Aktif

Pelatihan dirancang menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan berpusat pada kegiatan peserta. Dengan demikian, peserta dilibatkan secara aktif untuk berpikir, berinteraksi, bergerak atau berbuat dan menghasilkan karya. Dengan keaktifan peserta, semua potensi mereka mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat berkembang dengan baik dan seimbang.

e. Pendampingan Sekolah

Pendampingan sekolah merupakan bantuan profesional yang diberikan langsung di sekolah kepada peserta setelah mereka mengikuti pelatihan. Para fasilitator mengunjungi sekolah peserta untuk mengamati langsung pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan memberikan umpan balik terhadap apa yang telah dikembangkan dan dipraktikkan. Pendampingan ke sekolah ini menjadi poin penting dalam setiap pelatihan. Ini akan memberikan motivasi bagi peserta untuk mempraktikkan yang dipelajari di pelatihan. DBE 2 sangat memperhatikan hal ini, sehingga ada 2 periode pendampingan untuk masing masing paket pelatihan.

f. Terakreditasi

Pelatihan ini mendapat akreditasi dari perguruan tinggi mitra DBE 2 termasuk UT. Semua peserta pelatihan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh DBE 2 mendapat pengakuan kredit (SKS) dari perguruan tinggi mitra. Jumlah SKS bervariasi tergantung pada persetujuan dari perguruan tinggi masing-masing. Dengan demikian, peserta sudah memiliki tabungan SKS bila mereka ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi mitra DBE 2.

g. Memberdayakan Guru lokal

Kebanyakan pelatihan menggunakan sumber daya manusia sebagai motor atau fasilitator dari luar daerah, dalam menjalankan pelatihan dan atau pendampingan. Namun dalam pelatihan DBE 2,

menggunakan motor atau fasilitator dari daerah bahkan gugus bersangkutan yang telah diseleksi sebelumnya dari unsur guru yang akhirnya disebut *Master Teacher Trainer* (MTT). Hal ini dimaksudkan untuk kesinambungan pemberdayaan guru di gugus bersangkutan dan diharapkan dapat berimbas ke gugus lain seputarnya.

2). Jenis dan Judul Paket Pelatihan Terakreditasi DBE2 Paket Yang Dikembangkan

Tabel 10
Paket Pelatihan Terakreditasi DBE2

No	Jenis	Judul
1	Paket Dasar	Pembelajaran Efektif dalam 1. Mata Pelajaran Pokok.
2	Paket Mata Pelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran Matematika 2. Pembelajaran IPA 3. Pembelajaran Bahasa Indonesia 4. Pembelajaran Nilai-nilai dalam PKn
3	Paket Pengembangan Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Penilaian 2. Manajemen Kelas dan Personil 3. Pengembangan Komunitas Belajar 4. Bimbingan dan Konseling

(Sumber : Panduan Praktik Terbaik DBE 2 (Paket Pelatihan Terakreditasi) 2010).

Hal ini sesuai dengan apa yang dituturkan oleh *master teacher trainer* (MTT) wilayah Kertosono.

“Paket pelatihan terakreditasi yang telah dikembangkan melalui proyek DBE 2 di kabupaten Nganjuk diantaranya meliputi *pertama* paket dasar yang terdiri dari 3 sub paket pelatihan, yaitu : Pelatihan Tim Sekolah selama 3 hari, Pelatihan KKKS selama 2 hari (KKKS1-KKKS2), Pelatihan KKG selama 4 hari (KKG1-KKG2) dan kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan (Pendampingan1-Pendampingan2) di sekolah sebanyak 2-4 kali kunjungan untuk pendampingan di sekolah, *kedua* paket mata Pelajaran yang terdiri dari matematika, IPA, bahasa Indonesia, Pembelajaran Keangnegeraan : Hidup Bersama, terakhir adalah paket pengembangan sekolah”

(Sumber: Wawancara, jum'at 23 Novembaer 2012 pukul 08.30 WIB).

Dari hal ini diketahui bahwa Paket pelatihan ini pada dasarnya memberikan wawasan dan keterampilan dasar dalam mengembangkan pembelajaran aktif yang diintegrasikan dalam mata pelajaran pokok, yaitu mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan IPS. Materi paket ini secara garis besar meliputi prinsip-prinsip pembelajaran aktif, perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Perencanaan meliputi penyusunan silabus, RPP dan media pembelajaran.

Selain itu juga bahwa pada dasarnya paket pelatihan ini berisi materi berkenaan dengan perencanaan dan penilaian pembelajaran secara umum. Dalam bidang perencanaan pembelajaran, peserta akan belajar tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran aktif, pengembangan media pembelajaran,

pengembangan silabus dan RPP, baik yang terpadu secara tematis maupun per bidang studi. Berkenaan dengan penilaian, peserta akan belajar konsep dasar tentang penilaian dan evaluasi, evaluasi program pembelajaran, penyusunan rancangan evaluasi pembelajaran, analisis materi dan pengembangan indikator, teknik dan instrumen penilaian, penskoran, analisis hasil penilaian dan penyusunan tes.

3). Pola Pelatihan

Gambar 3. Pola Pelatihan (Per Paket atau Per semester)

(Sumber : *Panduan Praktik Terbaik DBE 2 (Paket Pelatihan Terakreditasi) 2010*).

Hal ini sesuai dengan data yang didapat dari hasil wawancara dengan koordinator distrik program *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk.

“Pola pelatihan dalam Paket pelatihan terakreditasi DBE 2 menggunakan prinsip: Belajar (Learn), Praktik (Practice), dan Melakukan refleksi (Reflect)”

(Sumber: *Wawancara, Senin 3 Desember 2012 pukul 11.00 WIB*).

Berdasarkan prinsip tersebut, pelatihan dilakukan berdasarkan tahapan dan kegiatan pelatihan seperti tergambaran gambar 4 dan penjelasan berikut:

Tahap 1	Pelatihan Tim Sekolah (PTS) Pelatihan ini berlangsung 3 hari yang dihadiri oleh tim sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan wakil komite sekolah, dan pengawas di gugus. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar berkaitan dengan topik paket pelatihan dan memperkuat tim sekolah menyatukan visi dan misi serta memberikan dukungan untuk mewujudkan visi-misi tersebut.	
Tahap 2	Pelatihan KKKS 1 Pelatihan selama 1 hari yang dihadiri oleh kepala sekolah dan pengawas. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan dan keterampilan berkaitan dengan peran kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah.	Pelatihan KKG 1 Pelatihan 1-2 hari yang dihadiri oleh guru untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam pengembangan pembelajaran efektif berkaitan dengan topik paket pelatihan.
Tahap 3	Pendampingan 1 Kunjungan ke sekolah oleh tim fasilitator selama 2-4 hari untuk mengamati langsung dan memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada guru dan kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah berkenaan topik paket pelatihan.	
Tahap 4	Pelatihan KKKS 2 Pelatihan untuk putaran ke 2 untuk mengevaluasi pelatihan - pelatihan dan pendampingan putaran 1 dan meningkatkan dan memperkaya untuk putaran 2	Pelatihan KKG 2 Pelatihan untuk putaran ke 2 untuk mengevaluasi pelatihan pelatihan dan pendampingan putaran 1 dan meningkatkan dan memperkaya untuk putaran 2.
Tahap 5	Pendampingan 2 Kunjungan tim fasilitator ke sekolah ke 2 selama 2-4 hari untuk mengamati langsung dan memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada guru dan kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah berkenaan topik paket pelatihan. Pendampingan ke sekolah yang ke 2 ini memberikan kesempatan kepada guru untuk mencoba lagi berdasarkan evaluasi dari pendampingan 1, penambahan dan penguatan pada pelatihan KKG dan KKKS 2.	
Tahap 6	Penilaian Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat memahami dan menerapkan materi pelatihan dalam pembelajaran di sekolah. Penilaian dapat menggunakan penilaian portofolio.	

Gambar 4. Pola Pelatihan Terakreditasi DBE 2

(Sumber : Panduan Praktik Terbaik DBE 2 (Paket Pelatihan Terakreditasi) 2010).

4). Penyelenggaraan Pelatihan

Untuk menyelenggarakan praktik terbaik dari program pelatihan paket DBE 2, pada dasarnya ada 3 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu :
Persiapan, Pelaksanaan, dan evaluasi.

a). Persiapan Pelatihan

Hal ini sesuai dengan apa yang dituturkan oleh koordinator distrik program *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk.

“Bahwa kegiatan - kegiatan yang dilakukan dalam mempersiapkan pelatihan diantaranya adalah: pembentukan tim kepanitiaan di gugus; melakukan analisis kebutuhan, menyusun proposal (TOR) untuk penyelenggaraan program, Mengkomunikasikan TOR untuk mencari dukungan, mengembangkan paket pelatihan, dan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaannya”

(Sumber: Wawancara, Senin 3 Desember 2012 pukul 11.00 WIB).

Oleh karena itu didalam penyelenggaraan program pelatihan paket *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan langkah-langkah yang matang dalam mempersiapkan program pelatihan tersebut agar nantinya setiap gugus yang sudah ditunjuk dapat menyampaikan kepada para peserta khususnya disini adalah para guru dan kepala sekolah yang sekolahnya telah dibina oleh *Decentralized Basic Education* (DBE2) dapat menerapkan dengan baik dalam proses pembelajaran didalam kelas, oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap persiapan diantaranya :

a. Pembentukan Tim Kepanitiaan di Gugus atau Kabupaten

Sebelum melakukan perencanaan pelatihan, terlebih dahulu perlu dibentuk Tim yang akan bertugas untuk mempersiapkan

penyelenggaraan pelatihan. Tim ini bisa melibatkan para tokoh pendidikan setempat, pejabat pendidikan di daerah, tenaga kependidikan di lapangan dengan diketuai oleh tokoh yang berpengaruh atau pejabat struktural di pemerintah daerah. Para anggota tim ini yang akan melakukan kegiatan dari mulai melakukan analisis kebutuhan hingga penyelenggaraan pelatihan.

b. Analisis Kebutuhan

Pelatihan yang akan diberikan hendaknya betul-betul memenuhi kebutuhan para guru di sekolah. Untuk itu, perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk menggali apa permasalahan dan kebutuhan para guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Analisis ini bisa dilakukan melalui angket pertanyaan, wawancara, pengamatan terhadap pihak-pihak yang terkait dan data-data yang ada dan yang relevan. Berdasarkan analisis kebutuhan, dibuat butir-butir rekomendasi yang perlu di tindak lanjuti.

c. Penyusunan TOR kegiatan pelatihan

Berdasarkan rekomendasi analisis kebutuhan, disusunlah TOR (*Term of Refence*) sebagai proposal untuk kegiatan yang akan dilakukan. TOR ini berisi : latar belakang masalah, tujuan yang hendak dicapai, sasaran peserta, fasilitator, waktu pelaksanaan, dan anggaran yang diperlukan. Kemudian proposal ini

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk mendapatkan dukungan.

d. Menentukan dan Mengembangkan Materi Paket Pelatihan

Berdasarkan proposal yang telah disetujui dan didukung, anda bisa mengetahui besar anggaran yang akan mempengaruhi jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan dan model pelatihan yang akan diimplementasikan. Pada dasarnya ada beberapa alternatif model pelatihan sebagai berikut :

a). Model 1 : Pelatihan Terakreditasi Lengkap

Model ini persis seperti pelatihan *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk yang selama ini telah dilakukan. Pelatihan dilakukan dengan struktur lengkap dan melibatkan tim perguruan tinggi mitra sehingga peserta pelatihan yang memenuhi syarat akan mendapat pengakuan kredit (SKS) yang dapat digunakan sebagai tambahan SKS untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.

b). Model 2 : Pelatihan Per Sub Paket Pelatihan

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa pola pelatihan *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk meliputi : pelatihan PTS, pelatihan KKKS, dan pelatihan KKG, dan Pendampingan. Untuk model ini dipilih per bagian pelatihan, misalnya hanya PTS, atau hanya KKKS atau KKG sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

c). Model 3 : Pelatihan Gabungan Topik Pilihan

Model ini tidak berdasarkan paket lengkap atau sub bagian, tetapi berdasarkan topik atau sesi dalam pelatihan *Decentralized Basic Education* (DBE2) dipilih yang sesuai dan kemudian disusun kembali menjadi satu paket pelatihan racikan. Ini juga disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan, jumlah hari sesuai anggaran yang tersedia.

(Sumber : *Panduan Praktik Terbaik DBE 2 (Paket Pelatihan Terakreditasi)* 2010).

- e. Menyiapkan tempat, logistik dan konsumsi.

Setelah model pelatihan terpilih sesuai dengan keadaan, panitia segera untuk mencari tempat, berkoordinasi untuk penggandaan bahan dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan serta konsumsi yang akan disediakan.

- b). Pelaksanaan Pelatihan

Hal-hal penting yang dilakukan dalam pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut. Persiapan sehari sebelum pelatihan perlu dilakukan persiapan sehari sebelum hari H pelatihan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua hal yang diperlukan untuk pelatihan sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Dalam persiapan ini perlu dilakukan hal-hal berikut :

- a. Pengecekan ruangan : apakah ruangan sudah ditata sesuai dengan pola pelatihan. Bentuk paralel atau kelompok atau yang lain, disesuaikan dengan karakteristik pelatihan.
- b. Pengecekan perlengkapan : apakah semua perlengkapan yang dibutuhkan sudah tersedia?
- c. Pengecekan bahan : apakah bahan yang dibutuhkan sudah digandakan sesuai dengan jumlah yang diharapkan?
- d. Gladi resik singkat untuk masing-masing fasilitator yang akan tampil dalam pelatihan untuk mengecek kesiapannya dan memberi kesempatan untuk persiapan yang lebih baik.

d. Program membaca di kelas

Melalui Program Membaca di Kelas, *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk, bekerjasama dengan para tenaga pendidik untuk membangun budaya membaca di lingkungan Sekolah Dasar. Program ini memfokuskan pada penyediaan materi baca (buku non-teks) di kelas 1–3 di semua sekolah binaan *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk.

Dengan pendekatan perpustakaan kelas, buku-buku yang diberikan langsung ditempatkan di dalam ruangan kelas sehingga memudahkan guru dan siswa dalam menggunakannya. Untuk mendukung penyediaan materi-materi baca tersebut, pelatihan profesional bagi guru juga diberikan guna mengembangkan keterampilan mereka dalam meningkatkan minat dan budaya baca di lingkungan sekolah. Keterlibatan orang tua juga dibangun, dimana siswa diberikan untuk membawa pulang buku untuk dibaca bersama keluarga, dan dalam area program membaca dikelas binaan *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk ada dua hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah :

1). Penyediaan Materi Baca di Kelas

Setiap sekolah binaan DBE 2 menerima 3 buah kotak buku. Masing-masing kotak buku berisi 5 eksemplar dari 40 judul buku, sehingga total buku perkotak adalah 200 buku. Buku bacaan ini telah diseleksi guna menjangkau tingkat kemampuan membaca siswa

kelas 1–3 yang berbeda. Judul-judul buku dipilih dari 4 kategori yang mampu mendukung beberapa area pembelajaran, yaitu:

- a). Ilmu Pengetahuan Alam;
- b). sejarah, geografi dan budaya;
- c). pendidikan moral; dan;
- d). legenda dan dongeng binatang.

2). Pengembangan Profesionalisme Guru

Pelatihan pengembangan profesionalisme program membaca bagi guru merupakan bagian dari keseluruhan sistem *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk yang berkelanjutan dan menitikberatkan pada dukungan guru berbasis sekolah dalam rangka memanfaatkan strategi pembelajaran aktif di dalam kelas. Guru mempelajari bagaimana mengintegrasikan kegiatan membaca kedalam kegiatan pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar dimana siswa dapat termotivasi untuk membaca baik di kelas dan di rumah.

b. Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) Yang Diterapkan SDN Tanjunganom 4 (SD imbas 1) dan SDN Kutorejo 1 Kertosono.

- a). Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) Yang Diterapkan SDN Tanjunganom 4 (SD imbas 1)

Pembelajaran yang sekarang ini dituntut berkualitas dengan pembelajaran yang aktif kreatif dan menyenangkan. Dengan pembelajaran yang seperti ini mau tidak mau guru dituntut untuk mempersiapkan

pembelajaran yang sebaik mungkin dan di dalam pembelajarannya pun guru dan murid harus aktif.

Untuk itu pemerintah kabupaten nganjuk menerapkan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) yang di wilayah timur di pusatkan pada SDN kutorejo 1 sedangkan wilayah barat SDN 4 Tanjunganom (SD imbas 1) , sebagai pusat pembelajaran dalam hal ini untuk mewujudkan pola pembinaan guru yang didukung oleh pola manajemen yang rapi dengan fokus kegiatan peningkatan wawasan guru dan kepala sekolah dan pengawas pendidikan serta wali murid sebagai sarana member layanan pendidikan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Agar nantinya guru mampu member layanan pembelajaran yang inovatif, khususnya model pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan, untuk member layanan yang berkualitas, efektif dan efisien dan tiap-tiap sekolah dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas hal ini juga sesuai dengan tujuan dari program kerja KKG gugus sekolah 01 kecamatan Tanjunganom tahun 2011/2012.

Untuk itu diharapkan melalui serangkaian program kegiatan yang telah dibina oleh *Decentralized Basic Education* (DBE2) SDN 4 Tanjunganom (imbas 1) khususnya yang berada di gugus satu telah melaksanakan beberapa program kegiatan diantaranya adalah: Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG), teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat pembelajaran, serta program membaca dan program bantuan lainnya.

Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh guru kelas IV SDN Tanjunganom IV dan sekaligus ketua PSBG kecamatan Tanjunganom

“Dengan keberadaan kami yang digugus inti dan juga binaan dari *Decentralized Basic Education* (DBE2) Kabupaten Nganjuk, kami difasilitasi dengan alat-alat yang bermanfaat dan penempatan alat berada di Pusat Sumber Belajar Gugus yang terletak di SDN Tanjunganom 2. Selain itu kami juga diberikan Pelatihan- pelatihan yang amat berguna khususnya bagi pembelajaran.

(Sumber : Wawancara, Senin 14 Januari 2013 pukul 10.30 WIB)

Sesuai dengan apa yang telah dituturkan oleh ketua PSBG kecamatan Tanjunganom diatas bahwa SDN Tanjunganom 4 sebagai SD imbas 1 merupakan sekolah yang telah dibina oleh DBE atau Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) berada di SDN Tanjunganom 2 yang berada tepat disebelahnya, banyak program kegiatan dan pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pelatihan ICT dan bantuan buku materi baca khususnya untuk murid kelas 1 sampai 3 total buku perkotak adalah 200 buku. Judul-judul buku dipilih dari 4 kategori yang mampu mendukung beberapa area pembelajaran, yaitu:

1. Ilmu Pengetahuan Alam;
2. Sejarah, geografi dan budaya;
3. Pendidikan moral; dan;
4. Legenda dan dongeng binatang.



**Gambar 5. Alat Peraga dan Piagam Penghargaan
PSBG Tanjunganom**

(Sumber: Pusat sumber belajar gugus satu kec. Tanjunganom kab.nganjuk, 2010)

Berdasarkan gambar V diatas ditunjukkan bahwa program *Decentralized Basic Education (DBE2)* Jawa timur khususnya kabupaten Nganjuk memfasilitasi tiap ssekolah yang menjadi binaanya dengan alat-alat yang sangat bermanfaat dan penempatan alat tersebut berada pada Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) selain itu juga diberikannya pelatihan-pelatihan yang berguna bagi pembelajaran, diantaranya dengan pelatihan ICT khususnya tentang internet, hal ini sesuai dengan penuturan ketua PSBG kecamatan Tanjunganom

“Pelatihan internet kami implementasikan dalam pembelajaran bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan materi pesawat sederhana. Anak-anak didik kami ajak ke ruang PSBG dan dengan bimbingan kami anak-anak kami pandu untuk mencari macam-macam pengungkit dan katrol melalui download di internet, sedangkan untuk bidang studi bahasa Indonesia anak-anak kami ajak

untuk mengunduh berbagai macam cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia”.

(Sumber : Wawancara, Selasa 15 Januari 2013 pukul 10.30 WIB)

Di gugus sekolah 01 kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk ini juga dibentuk Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG), yang difungsikan selain sebagai pusat pembelajaran dan kegiatan siswa dalam memunculkan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran, juga difungsikan sebagai pelatihan Teknologi Informasi (IT) yang difokuskan tidak hanya buat para guru sebagai bekal dalam mengajar tetapi juga para siswa yang dalam hal ini sebagai materi tambahan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) juga sebagai wadah pelaksanaan setiap program kegiatan dari *Decentralized Basic Education* (DBE2), selain itu juga sebagai wujud penyatuan gagasan dan gerak langkah serta evaluasi para stakeholder sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

Berikut adalah sekilas tentang Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) gugus sekolah 01 kecamatan tanjunganom kabupaten Nganjuk

Gambar 6. Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) 01 Tanjunganom

(Sumber: Pusat sumber belajar gugus Pangudiluhur.psbg@gmail.com, 2010)

1. Visi, Misi dan Tujuan PSBG

a. Visi

“Terwujudnya sistem pembinaan profesionalisme guru, yang mampu menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan efisien, serta terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Misi

- a). Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan professional guru sekolah dasar.
- b). Mencegah praktek indisipliner.
- c). Mendorong terciptanya akuntabilitas.
- d). Meningkatkan profesionalisme guru.
- e). Mengembangkan sistem pengawasan yang lebih obyektif.
- f). Melakukan koordinasi fungsi guru dan kepala sekolah yang dilakukan lintas dan multi dimensi.
- g). Menegakkan etika dan moral penyelenggara, pengelola, dan pelaksanaan pendidikan.

c. Tujuan

- a). Terwujudnya sistem pembinaan guru yang efektif dan efisien
- b). Terwujudnya guru yang professional
- c). Meningkatnya wawasan guru
- d). Terpecahkannya segala hambatan dalam melaksanakan layanan pendidikan

- e). Terselenggaranya sistem pendidikan yang efektif dan efisien
- f). Guru mampu melaksanakan proses belajar mengajar yang inovatif
- g). Setiap sekolah di Gugus Sekolah 01 kecamatan Tanjunganom mampu menghasilkan output yang memadai.

Hal ini sesuai dengan penuturan ketua PSBG kecamatan Tanjunganom bahwa fungsi Pusat Sumber Belajar Gugus adalah

“Pada intinya pola pembinaan guru yang didukung dengan pola manajemen yang rapi dan sehat, dengan fokus kegiatan di PSBG, berfungsi terciptanya, terciptanya ruang kelas yang kondusif yang memungkinkan guru untuk lebih meningkatkan kualitas profesionalismenya, guru mampu menerapkan manajemen kelas dengan lebih baik, tertib dan lebih bertanggungjawab, guru dapat member layanan pembelajaran yang lebih inovatif dan bertanggungjawab, lebih efektif dan efisien guna menghasilkan output yang sesuai harapan”

(Sumber : Wawancara, Kamis 17 Januari 2013 pukul 09.30 WIB)

Sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh ketua PSBG kecamatan Tanjunganom guru kelas VI SDN Tanjunganom IV sekaligus ketua PSBG gugus 01 kecamatan Tanjunganom diatas bahwa SDN Tanjunganom IV merupakan salah satu SD yang dibina oleh *Decentralized Basic Education* (DBE2) dan disini merupakan SD imbas 1 sebagai paguyuban pelaksanan program DBE tersebut dan didalamnya dibentuk PSBG (Pusat Pembelajaran Gugus) yang terletak di SD sebelahnya yakni SDN II Tanjunganom, adapun SD selain Tanjunganom IV yang dibina oleh DBE pada gugus 01 wilayah Tanjunganom ini diantaranya adalah sebagai berikut : SDN Tanjunganom II , SDN Tanjunganom IV (imbas 1), SDN Tanjunganom I, SDN Tanjunganom III, SDN Tanjunganom V, SDN

Jogomerto I, SDN Jogomerto II, SDI Darush Sholihin, MI Damai, MIN Sumberkepuh.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh program *Decentralized Basic Education* (DBE2) yang telah dilaksanakan di Gugus 01 Tanjunganom diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1). Pengembangan Mutu atau kualitas pembelajaran dengan menerapkan pendekatan PAIKEM GEMBROT (atau tampak dalam dimensi guru dalam memanfaatkan berbagai media termasuk ICT, dimensi penataan kelas dan dimensi pengelolaan kelas.
 - 2). Workshop dan pelatihan dalam peningkatan dan pengembangan SDM guru.
 - 3). Pelatihan penggunaan media atau alat peraga yang ada di PSBG
 - 4). Peningkatan dan pengembangan SDM (kepala sekolah) dalam mengikuti pelatihan manajemen sekolah dan PSM.
 - 5). Pelatihan penggunaan ICT terhadap para guru kelas awal dan tinggi.
- b). Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) Yang Diterapkan SDN Kutorejo 1 Kertosono.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa program *Decentralized Basic Education* (DBE2), mengimplementasikan beberapa strategi untuk meningkatkan sistem pendidikan dasar di kabupaten Nganjuk, termasuk di dalamnya: pelatihan guru terdesentralisasi yang diakreditasi oleh

universitas; kepemimpinan dan manajemen pembelajaran; instruksi audio interaktif (IAI) untuk guru dan siswa Taman Kanak-kanak (TK); pusat sumber belajar gugus; kerjasama dengan universitas di Indonesia; teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat pembelajaran, hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh kepala sekolah SDN kutorejo 1 kecamatan kertosono dalam hal ini yang bersangkutan mengatakan bahwa:

“ SDN kutorejo merupakan salah satu dari beberapa sekolah yang dibina oleh *Decentralized Basic Education* (DBE2), dan kutorejo 1 merupakan SD inti atau percontohan yang nantinya menjadi pusat belajar sekolah-sekolah lainnya utamanya diwilayah kertosono ini, ada banyak program-program kegiatan yang telah dilakukan oleh DBE ini selain terdapat PSGB (Pusat Sumber Belajar Gugus) yang kebetulan di SD kutorejo ini sebagai paguyuban sebelum mengimplementasikan beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan”

(Sumber : Wawancara, Senin 14 Januari 2013 pukul 08.30 WIB)

Sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh bapak kepala sekolah SDN Kutorejo 1 diatas bahwa SDN kutorejo merupakan salah satu SD yang dibina oleh *Decentralized Basic Education* (DBE2) dan disini merupakan SD inti sebagai paguyuban pelaksanaan program DBE tersebut dan didalamnya dibentuk PSBG (Pusat Pembelajaran Gugus) adapun SD selain Kuterejo 1 yang dibina oleh DBE pada gugus 1 wilayah kertosono ini diantaranya adalah sebagai berikut : SD Kutorejo II, SD Kudu I, SD Kudu II, SDN Banaran II, SDN Banaran III, MIS Da'watul Choir Drenge, MIS Sabilillah Tanjung, MIS Nurul Huda Bangsri, SD Muhammadiyah Banaran.

Seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa kabupaten nganjuk telah menerpkan program kegiatan yang telah dibina oleh *Decentralized Basic Education* (DBE2) oleh karena itu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pembelajaran tersebut, dibentuk Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG). Sebagai unit pelayanan teknis pembelajaran yang mendukung peningkatan mutu pendidikan yang akan digunakan oleh para guru, kepala sekolah serta tenaga kependidikan lainnya untuk berinteraksi dengan berbagai sumber belajar dalam mengembangkan kreatifitas pembelajarannya, hal ini sesuai dengan penuturan kepala sekolah SDN Kutorejo 1

“Bahwa Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) dibentuk sebagai paguyuban yang berfungsi sebagai pembekalan sebelum dan sesudah pelatihan maupun program kegiatan lainnya yang telah dirancang oleh *Decentralized Basic Education* (DBE2), di paguyuban semua stakeholder dalam hal ini adalah guru mata pelajaran, kepala sekolah, pengawas pendidikan, komite sekolah dan wali murid, dari setiap gugus berkumpul untuk bagaimana merumuskan program atau pelatihan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran nantinya”

(Sumber : Wawancara, Rabu 16 Januari 2013 pukul 09.30 WIB)

Berikut adalah sekilas tentang Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) pangudi luhur gugus 1 kecamatan kertosono kabupaten Nganjuk yang terletak di SDN kutorejo 1 Kertosono Jln.Supriadi No 4 Kutorejo-kertosono Telp.(0358)55381

Gambar 7. Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) Pangudi Luhur

(Sumber: Pusat sumber belajar gugus Pangudiluhur.psbg@gmail.com, 2010)

1. Motto dan Visi Misi PSBG



Visi : “ Terwujudnya Profesionalisme dan Kreativitasguru selaras dengan kemajuan IPTEK dilandasi dengan budi pekerti “

Misi :

- 1). Meningkatkan kreativitas guru
- 2). Meningkatkan Profesionalisme guru
- 3). Meningkatkan wawasan pendidikan
- 4). Menyusun program secara berkala

- 5). Melaksanakan program secara intensif
- 6). Menjalin kerjasama dengan stakeholders
- 7). Menanamkan budi pekerti luhur
- 8). Meningkatkan pembelajaran yang inovatif
- 9). Meningkatkan mutu pembelajaran
- 10). Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi
- 11). Berperilaku sopan – santun dalam sehari – hari.

2. Latar Belakang PSBG Pangudi Luhur Gugus 1 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk.

Perlu adanya upaya untuk membantu meningkatkan mutu Pendidikan Dasar melalui peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar di Sekolah, dengan jalan meningkatkan kemampuan Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan lainnya. Oleh karena itu perlu diupayakan peningkatan Wawasan Kependidikan, Ketrampilan, dan pengembangan kreatifitas Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Komite Sekolah dan warga gugus yang lainnya, sehingga peningkatan kualitas pendidikan dasar segera terwujud.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan pendidikan yang semakin komplek adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pendidikan, diantaranya melakukan penataan SDM dengan semangat efektivitas dan efisiensi lewat upaya

pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan. Upaya pemberdayaan tersebut antara lain :

- a. Memperbaiki sikap kerja, yaitu kesadaran dan kesediaan menepati dan memenuhi jam kerja, tata tertib kerja, termasuk menerima tambahan tugas dan bekerja dalam satu tim.
- b. Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan kerja yang tercermin dalam usaha bersama untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu (*Quality Control Circle*).
- c. Manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas.
- d. Efisiensi tenaga kerja, pembagian tugas dan penempatan bidang tugas yang pas dengan kemampuannya.

Disamping itu sangat perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, yaitu :

- a. Sikap mental yang berupa motivasi, disiplin dan etika kerja senantiasa harus dipantau, dijaga dan ditingkatkan.
- b. Pengetahuan yang harus selalu dikembangkan, sehingga memiliki wawasan yang luas sehingga memiliki penghayatan akan pentingnya produktivitas. Pengembangan pengetahuan dapat diupayakan lewat budaya membaca maupun pembinaan-pembinaan.

- c. Pengembangan Manajemen - manajemen yang mendorong produktivitas adalah penerapan manajemen partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan bersama-sama sehingga masing-masing merasa memiliki dan bertanggung jawab.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut maka hari Rabu, tanggal 8 maret 2008, telah diselenggarakan rapat yang diikuti oleh Kepala sekolah se gugus 1 SD dan MI, Pengawas TK/SD, Guru pemandu bidang *study* dan MTT, untuk menetapkan kepengurusan PSBG dan tempat untuk gedung PSBG yang strategis, yang akhirnya diambillah kesimpulan bahwa :
 - a). PSBG yang berdiri bernama “ pangudi luhur “ artinya Mencari ilmu untuk masa depan dan baik budi pekertinya (ilmu dan budi pekerti)
 - b). Tempatnya ruangan PSBG di lokasi SDN Kutorejo I, karena adanya ruangan dan juga strategis, memenuhi syarat untuk ditematkannya PSBG.
 - c). Telah terbentuk juga susunan kepengurusan yang di sepakati semua peserta rapat yang hadir.

Adapun sebagai Sekolah inti adalah SDN Kutorejo I dan 9 sekolah imbas yang terdiri dari beberarapa sekolah yang merupakan SD dan MI imbas yaitu :

Tempat : Terletak di lingkungan sekolah dasar Inti yaitu di SDN Kutorejo I pada gugus I. yang strategis ,berada di Tengah – tengah sekolah imbas dan mudah dijangkau,ada bangunan yang permanen ,ukuran gedung 49 m².

Anggota : **SDN Kutorejo I (SD Inti)**

1. Kutorejo II Kutorejo
2. Kudu I Kudu
3. Kudu II Kudu
4. Banaran II Banaran
5. Banaran III Banaran
6. MIS Da'watul Choir Drenges
7. MIS Sabilillah Tanjung
8. MIS Nurul Huda Bangsri
9. SD Muhammadiyah Banaran

Kontribusi Sekolah Penerima :

1. Ruangannya ukuran 7 Cm X 7Cm
2. Biaya daya listrik 1600 Kwh
3. Telepon, Meja 17 buah untuk 2 orang dan kursi plastik 35 buah, AC dan rak buku 2 buah



**Gambar 8. Denah Dan Data Siswa Anggota Gugus 1 (Satu)
Kertosono Tahun Pelajaran 2010 /2011**

*(Sumber: Pusat sumber belajar gugus Pangudiluhur.psbg@gmail.com,
2010)*



**Gambar 9. Struktur Organisasi Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG)
“ Pangudi Luhur “ Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk**

*(Sumber: Pusat sumber belajar gugus Pangudiluhur.psbg@gmail.com,
2010)*

Tabel 11
Susunan Pengurus Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG)
Pangudi Luhur

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H.Ahmad Tohari,MM	Ka.UPTD Pendidikan	Pembina
2	Drs. Sunardi	Pengawas Tk/SD	Penasehat
3	Drs.Asrikil Amro D	Pengawas Tk/SD	Penasehat
4	Sujoko,S.Pd	Pengawas Tk/SD	Penasehat
5	Drs. Sumiasri	Pengawas Tk/SD	Penasehat
6	Agus Santoso,MM.Pd	M T T 1	
7	Drs. Sunardi	M T T 2	
8	Salis Rahmawati,S.Pd	Ketua PSBG	
9	Agus Santoso,MM.Pd	Ketua KKKS	
10	Fausiwati,S.Pd	Ketua KKG	
11	Eko Budi Santoso,S.Pd	Sie.Pertemuan dan Peminjaman	
12	Neni Wulandari,S.Pd	Sie.Pertemuan dan Peminjaman	
13	Fenitaningtyas,S.Pd	Sie.Pertemuan dan Peminjaman	
14	Agus Muhammad,S.Pd	Sie.Pengembangan Profesi	
15	Nanik Sriani,S.Pd	Sie.Pengembangan Profesi	
16	Irna Restu W, S.Pd	Sie.Pengembangan Profesi	
17	Siswanto,S.Pd	Sie .Informasi dan Perawatan	
18	Nasikin,S.Pdi	Sie .Informasi dan Perawatan	
19	Afrianto Ade Romadhon	Sie .Informasi dan Perawatan	
20	Lilik Suharti,S.Pd	Sie Produksi dan Distribusi	
21	Yacobus Supardal,S.Pd	Sie Produksi dan Distribusi	
22	Siswanto,S.Pd	PBS IPA	
23	Eko Budi Santoso,S.Pd	PBS Matematika	
24	Nanik Sriyani,S.Pd	PBS Bahasa Indonesia	
25	Hj. Salis Rahmawati,S.Pd	PBS IPS	
26	Sri Maryuni,S.Pd	PBS Kelas Awal	
27	Afrianto Ade Romadhon	Devisi ICT	
28	Siswanto,S.Pd	Devisi ICT	
29	Fenitaningtyas,S.Pd	Devisi TK	
30	Lasminatun,S.Pd	Koord. Reading	

(Sumber: Pusat sumber belajar gugus Pangudiluhur.psbg@gmail.com, 2010).

**Pembagian Tugas (Job Diskription) Dan Tanggung Jawab
Pengurus PSBG
“ Pangudi Luhur “**

Ketua :

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional PSBG
2. Menjamin bahwa PSBG berfungsi setiap hari kerja.
3. Menyusun RAB kegiatan PSBG
4. Menyusun Program pelatihan atau lokakarya
5. Menggalang kerjasama dengan donatur
6. Membina hubungan kerja internal dan eksternal
7. Menggali sumber dana
8. Menyusun Rencana Kerja
9. Memasyarakatkan PSBG

Sekretaris :

1. Melaksanakan Tata laksana PSBG
2. Inventarisasi PSBG
3. Menyusun Laporan Bulanan
4. Aktif mempromosikan PSBG
5. Melaksanakan Laporan dari masing-masing bagian Organisasi
6. Mendokumentasikan surat-surat sebagai arsip
7. Membantu menyusun RAB

Bendahara :

1. Mengelola keuangan
2. Menyusun RAB
3. Menggali Sumber dana
4. Melaporkan Penggunaan Keuangan

Sie. Pengembangan :

1. Mengkoordinasi kegiatan, pertemuan, informasi dan pengembangan profesi
2. Menjadwalkan pemakaian ruang dan pemanfaatan PSBG
3. Melaksanakan Program Pelatihan
3. Mengkoordinasi PBS dalam membantu kegiatan Guru
4. Menata Alat dan ruang sesuai dengan kebutuhan pemakai

Sie . Produksi Dan Distribusi :

1. Mengkoordinir hasil karya Guru sebagai sumber belajar
2. Mengkoordinir hasil karya siswa sebagai sumber belajar
3. Membuat poster atau brosur PSBG
4. Merancang alat peraga
5. Menciptakan Alat Peraga Murah

Sie. Informasi Dan Perawatan :

1. Membuat Brosur, *Poster, Leaflet, News letter*
2. Menjalinkan kerjasama dengan Stake holder dan pihak yang terkait
3. Mempromosikan PSBG

4. Menyampaikan Informasi tentang Pendidikan *Online* maupun langsung.
5. Menjaga kebersihan PSBG
7. Menata alat dan ruangan sesuai kebutuhan
8. Menjaga keamanan PSBG
9. Merawat alat-alat di PSBG

Sie. Pertemuan Dan Peminjaman

1. Menjadwalkan Pemanfaatan ruang PSBG
2. Menata alat dan ruang sesuai kebutuhan
3. Mendokumentasikan pemakaian ruang PSBG
4. Membuat dan Menyampaikan Undangan kepada peserta pelatihan
5. Koordinasi dengan pihak terkait
6. Memfasilitasi kegiatan di PSBG (pertemuan, pelatihan)
7. Mengkoordinasi peninjaman peralatan dan perawatan barang

Pemandu Bidang Studi (P B S)

1. Membantu dan mendampingi guru dalam PBM di kelas
2. Membantu kegiatan pelatihan
3. Menjadi Nara sumber sesuai bidang tugasnya
4. Membantu guru dalam persiapan pembelajaran
5. Merancang kegiatan yang inovatif

Devisi ICT (Information Communication technologi) :

1. Menjaga dan merawat peralatan ICT
2. Membersihkan Peralatan ICT

Devisi TK :

1. Merawat peralatan I A I ,menata sudut TK
2. Melakukan Peminjaman peralatan I A I
3. Mempromosikan Penggunaan peralatan I A I

Koordinator Reading :

1. Mengkoordinir penggunaan buku bacaan

Pendanaan :

1. Kegiatan PSBG dibiayai dari dana gugus sekolah 01 yang dihimpun oleh ketua gugus
2. Besaran dana PSBG menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan PSBG

Jam Kerja :

1. Dimulai pukul 11.00 -14.00 WIB
2. Dalam kondisi tertentu dapat melakukan kegiatan di luar jam kerja

Tata Tertib PSBG :

1. Hadir tepat waktu
2. Mengisi daftar hadir
3. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan ruangan PSBG
4. Batas waktu peminjaman barang atau buku maksimal 5 hari

5. Apabila terjadi kerusakan dan hilang pada barang wajib mengganti
6. Menempatkan barang yang telah digunakan pada tempatnya
7. Menjaga keindahan PSBG
8. Seluruh pengguna secara sadar dan bertanggung jawab atas tata tertib

Petugas Piket

- | | |
|-----------|--|
| 1. Senin | a. Eko Budi Santoso,S.Pd
b.Nasikin
c. Nanik Sriyani,S.Pd. |
| 2. Selasa | a. Lilik Suharti,S.Pd
b. Salis Rahmawati,S.Pd
c. Siti Yulaikah |
| 3. Rabu | a. Nenny Wulandari,Ama,Pd
b. Moh.Khoirul Anam. |
| 4. Kamis | a. Tutik Fausiwati,S.Pd
b. Esti Sukasih,S.Pd
c. Fatkul Islam |
| 5. Sabtu | a. Agus Muhammad,S.Pd
b. Siswanto,S.Pd
c. Irna Restu Wijaya,S.Pd |

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) mempunyai fungsi yang utama adalah sebagai paguyuban khususnya para stakeholder untuk bagaimana merumuskan manajemen dan penyusunan program secara baik dan terarah, selain itu melalui Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG), telah dilaksanakan beberapa program kegiatan yang telah dibina rancang oleh *Decentralized Basic Education* (DBE2) khususnya yang telah dirancang oleh adapun program-program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PSBG Pangudi Luhur Gugus 1 Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, karena berdasarkan penuturan kepala SDN Kutorejo 1 Kertosono, bahwa tujuan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) adalah :

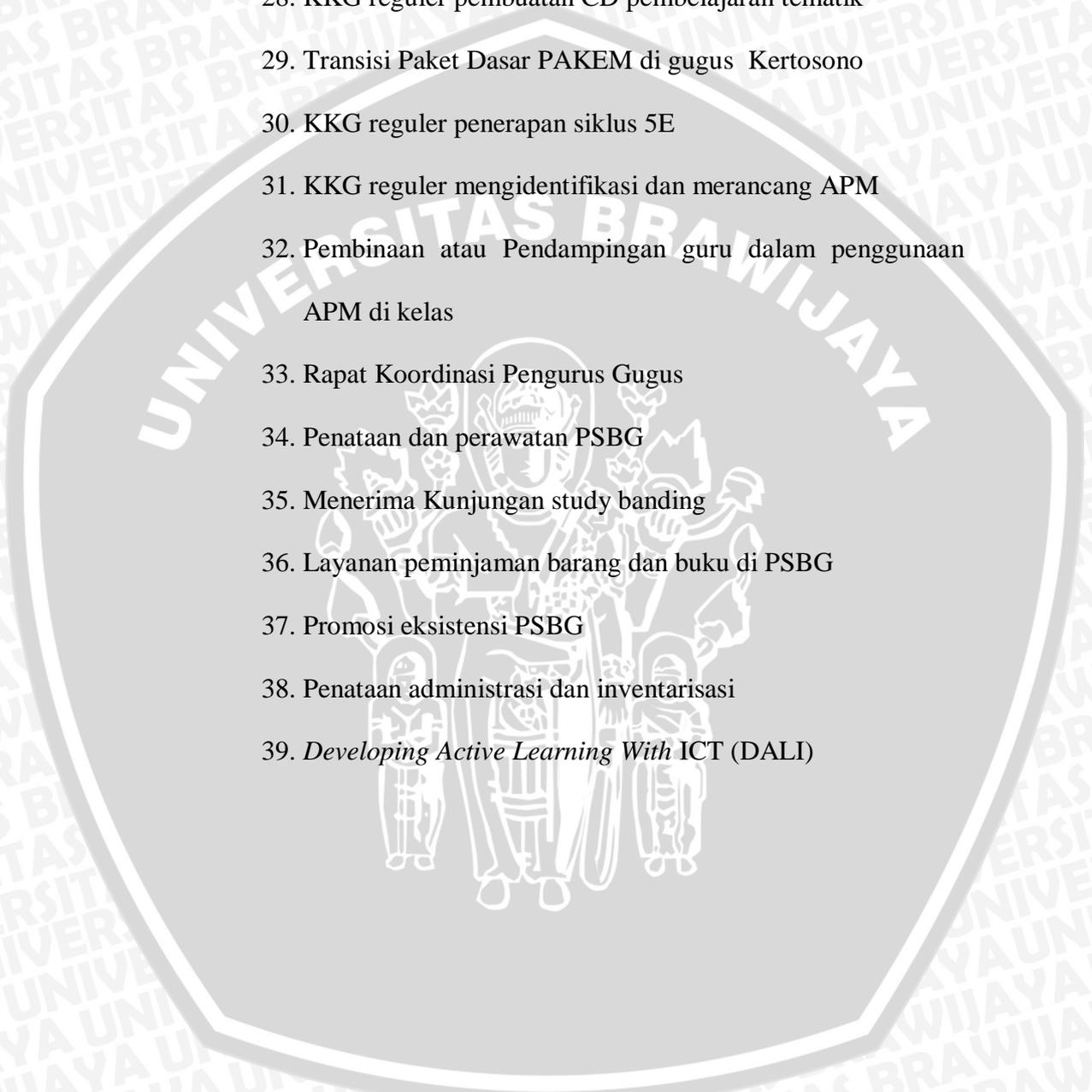
“Selain membuat guru tersenyum harus terwujudnya kekreativan dalam pembelajaran serta keaktifan siswa di dalam kelas sehingga terwujud prestasi siswa baik itu didalam maupun diluar kelas, selain itu guru juga diajarkan bagaimana menciptakan keaktifan dan kekreatifan didalam kelas melalui pelatihan, worksop dan pembelajaran ICT dan semuanya itu dirancang dan dilaksanakan Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) ”.

(Sumber : Wawancara, Senin 21 Januari 2013 pukul 09.30 WIB)

Beberpa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh program *Decentralized Basic Education* (DBE2) yang telah dilaksanakan di Gugus 01 Kertosono diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. STW pembelajaran PAKEM 4 mapel pokok
 1. IPA
 2. Matematika
 3. B. Inggris

4. B.Indonesia
5. STW paket adaptasi IPA 1 & 2
6. STW paket adaptasi Matematika 1 & 2
7. KKG 1 & 2
8. KKKS 1 & 2
9. BPS 1 & 2
10. Roll Out Manajemen PSBG
11. Roll Out Penggunaan KIT
12. Roll Out Aplikasi Hibah DBE2
13. Roll Out DALI
14. Roll Out Program Mentoring
15. KKG reguler penyusunan Instrumen penilaian
16. KKG reguler pembuatan CD pembelajaran tematik
17. Transisi Paket Dasar PAKEM di gugus kertosono
18. KKG reguler penerapan siklus 5E
19. KKG reguler mengidentifikasi dan merancang APM
20. Pembinaan/Pendampingan guru dalam penggunaan APM di kelas
21. Rapat Koordinasi Pengurus Gugus
22. Penataan dan perawatan PSBG
23. Menerima Kunjungan study banding
24. Layanan peminjaman barang dan buku di PSBG
25. Promosi eksistensi PSBG

- 
26. Penataan administrasi dan inventarisasi
 27. KKG reguler penyusunan Instrumen penilaian
 28. KKG reguler pembuatan CD pembelajaran tematik
 29. Transisi Paket Dasar PAKEM di gugus Kertosono
 30. KKG reguler penerapan siklus 5E
 31. KKG reguler mengidentifikasi dan merancang APM
 32. Pembinaan atau Pendampingan guru dalam penggunaan APM di kelas
 33. Rapat Koordinasi Pengurus Gugus
 34. Penataan dan perawatan PSBG
 35. Menerima Kunjungan study banding
 36. Layanan peminjaman barang dan buku di PSBG
 37. Promosi eksistensi PSBG
 38. Penataan administrasi dan inventarisasi
 39. *Developing Active Learning With ICT (DALI)*

Gambar 10. Pelatihan *Developing Active Learning With ICT (DALI)* PSBG Pangudiluhur Kertosono

(Sumber: Pusat sumber belajar gugus Pangudiluhur.psbg@gmail.com, 2010)

Hal ini sesuai dengan penuturan kepala SDN Kutorejo 1 Kertosono

“Untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang pembelajaran, khususnya pembelajaran berbasis ICT, di Gugus Sekolah 01 Kertosono telah dilaksanakan *Roll Out* Tingkat Gugus Sekolah Gelombang 2 tentang Pengembangan Pembelajaran Berbasis ICT. Kegiatan ini biasa disebut dengan DALI (Developing Active Learning With ICT), yang telah terlaksana dari tanggal 16 s.d. 18 Februari 2010 di PSBG Pangudi Luhur Kertosono. Kegiatan seperti ini telah dilaksanakan juga sebelumnya, yaitu Roll Out Tingkat Gugus DALI 2, yang telah dilaksanakan pada tanggal 19-21 Oktober 2009, di PSBG Pangudi Luhur pula. Kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya merupakan tindak-lanjut dari kegiatan ToT DALI dan *One Day Workshop* DALI Mentoring & *Follow Up Cohort 2*, yang dilaksanakan di Hotel "Grand Surya" Kediri pada tanggal 29 Juni s.d. 2 Juli 2009”.

(Sumber : Wawancara, Senin 21 Januari 2013 pukul 10.30 WIB)

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan keterampilan guru dan kepala sekolah untuk merancang model pembelajaran aktif dengan menggunakan ICT terbatas, Memberikan keterampilan dasar para guru dan kepala sekolah dalam mengoperasikan komputer, kamera, handycam dan internet; Membentuk kader pelatih yang mampu mentransformasi pembelajaran aktif dengan menggunakan ICT kepada seluruh guru banana program *Decentralized Basic Education* (DBE2) lainnya.

c. Stakeholder Program *Decentralized Basic Education* (DBE2)

Dalam pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) terdapat berbagai program kegiatan yang telah dirancang, meliputi pelatihan terhadap para guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan dan

sekaligus masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh kepala sekolah SDN Kutorejo 1 Kertosono

“Dalam program *Decentralized Basic Education* (DBE2) banyak kesuksesan yang telah dicapai oleh sekolah binaan, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, ataupun nasional, tapi tentunya kesuksesan tersebut tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, kepala sekolah, pengawas pendidikan, guru, siswa, masyarakat dalam hal ini adalah wali murid”

(Sumber : Wawancara, Sabtu 26 Januari 2013 pukul 09.30 WIB)

Agar program ini memberi dampak perubahan nyata dalam pembelajaran di sekolah, pelatihan ini dirancang untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dan institusi kependidikan yang terkait dengan pengembangan sekolah. Pemangku kepentingan tersebut meliputi unsur Diknas dan Depag, unsur Pusat Sumber Belajar Gugu (PSBG), para guru, kepala sekolah, wakil komite sekolah dan pengawas yang terkait dengan sekolah tersebut. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan mereka mempunyai visi yang sama, ada rasa memiliki dan memberikan dukungan untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa apabila hanya kepala sekolah, yang diberi pelatihan ternyata cenderung tidak ada perubahan di sekolah karena tanpa didukung SDM yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kurang didukung oleh pengambil kebijakan, baik dari pihak Diknas maupun dari pihak Depag. Kalau hanya gurunya saja yang diberi pelatihan juga kurang terjadi perubahan karena tidak ada dukungan dari atasan maupun pihak lainnya.

Dalam program *Decentralized Basic Education* (DBE2) peran serta masyarakat sangat diperlukan dan terkesan begitu penting keterlibatannya bahkan masyarakat diberikan tempat di paguyuban atau Pusat Sumber Belajar Gugu (PSBG), disana masyarakat yang dalam hal ini adalah wali murid diberikan keleluasaan mengelola kegiatan sendiri ketika ada program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. hal ini sesuai penuturan kepala SDN Kutorejo 1 Kertosono

“Ketika masyarakat kita kumpul pertama kali kesekolah untuk mensosialisasikan tentang program *Decentralized Basic Education* (DBE2), mereka berangapan akan ada iuran yang ditarik lagi, tapi setelah dijelaskan bahwa unsure dari pendidikan meliputi unsur: operasional yang dibiayai oleh pemerintah lewat program BOS misalnya buku pelajaran serta biaya non operasional yang meliputi biaya kegiatan sehari-hari siswa yang harus ditanggung sepenuhnya oleh wali murid, setelah adanya paguyuban atau Pusat Sumber Belajar Gugu (PSBG) masyarakat kita jelaskan bagaimana tentang Program DBE dan adanya BOS masyarakat jadi mengerti tentang tugasnya sebagai wali murid, tetapi yang lebih penting di sini adalah masyarakat tidak lagi sensitif dengan program-program yang kami akan laksanakan”.

(Sumber : Wawancara, Sabtu 26 Januari 2013 pukul 10.00 WIB)

Jadi dapat dikatakan bahwa Dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangatlah penting dalam proses peningkatan mutu pembelajaran. Masyarakat orang tua dan mungkin para tokoh masyarakat setempat yang tergabung dalam forum Komite Sekolah dan para pengurus forum gugus sekolah mempunyai peranan penting dalam merancang program pelatihan. Mereka dapat memusyawarahkan kebutuhan pelatihan, berbagai sumber yang bisa dimanfaatkan. Masyarakat dapat juga memberikan dukungan dalam bentuk dana, sumber daya manusia

dan pemikiran. Kalau semua dirancang berdasarkan kebutuhan sesungguhnya, memanfaatkan nara sumber yang ada, pelatihan akan menjadi lebih efektif dan berkesinambungan.

2. Dampak Pelaksanaan Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar Di Kabupaten Nganjuk.

Program pendidikan dasar yang terdesentralisasi (*Decentralized Basic Education*), telah dilaksanakan di kabupaten Nganjuk dengan 2 (dua) sekolah sebagai inti program atau tempat Pusat Belajar Gugus (PBS), yakni SDN Kutorejo 1 Kertosono dan SDN 4 Tanjunganom yang mana Pusat Sumber Belajar Gugus ditempatkan di SDN 2 Tanjunganom serta kurang lebih 20 sekolah yang telah dibina oleh program tersebut, dengan tujuan untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia dan kabupaten Nganjuk khususnya melalui beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Program Paket Pelatihan Terakreditasi, Pembelajaran Audio Interaktif untuk Taman Kanak-Kanak, Program Membaca di Kelas, Pusat Sumber Belajar Gugus, Pembelajaran Aktif dengan TIK, Pembelajaran di Kelas dengan Satu Komputer, Pembelajaran Aktif untuk Perguruan Tinggi, untuk selanjutnya kegiatan atau program-program yang telah dilaksanakan tersebut digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program dalam hal :

a. Peningkatan Sumberdaya Manusia

Dalam pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dirancang dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan dasar secara terdesentralisasi melalui serangkaian program-program kegiatan yang telah dirancang oleh *Propicial Coordinator* (PC), serangkaian program kegiatan tersebut tentunya dirancang bukan hanya ditunjukan kepada para murid tetapi juga sumber daya lainnya seperti guru, kepala sekolah, wali murid, dan pengawasa pendidikan, pelatihan dan pembelajar yang telah dilaksanakan diatas telah menimbulkan suatu perubahan antara lain :

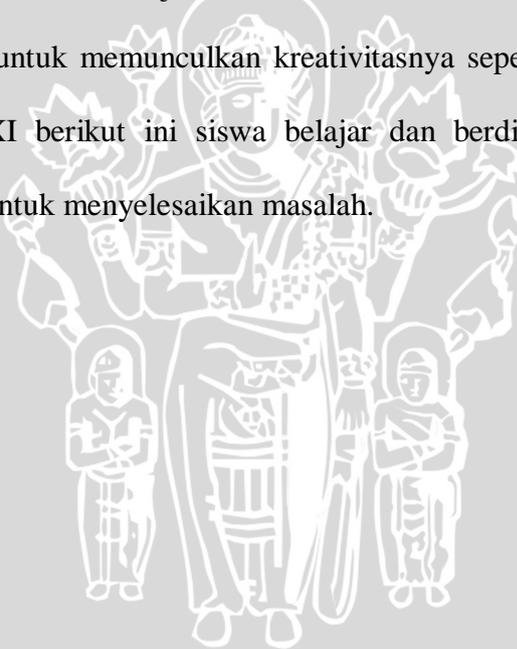
a). Munculnya Kreativitas Siswa Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas

Seperti tujuan awal program *Decentralized Basic Education*), telah dilaksanakan di kabupaten Nganjuk dengan 2 (dua) sekolah sebagai inti dan imbas 1 program atau tempat Pusat Belajar Gugus (PBS), yakni SDN Kutorejo 1 Kertosono dan SDN 4 Tanjunganom yang Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) ditempatkan di SDN 2 Tanjunganom serta kurang lebih 20 sekolah yang telah dibina oleh program tersebut, tujuan utama dari program tersebut adalah untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar di Indonesia melalui serangkaian pendekatan inovatif yang dirancang untuk memperkuat pelatihan guru dan meningkatkan lingkungan belajar di sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan kepala sekolah SDN Kutorejo 1

“ Dengan adanya program DBE ini diharapkan siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran dikelas dan tugas guru setelah mendapatkan pelatihan adalah menciptakan pembelajaran yang menarik didalam kelas “

(Sumber : Wawancara, Senin 28 Januari 2013 pukul 08.30 WIB)

Oleh karena itulah program *Decentralized Basic Education* (DBE2) ini memberikan dampak yang signifikan dalam memunculkan kreativitas pembelajaran siswa didalam kelas. Siswa jadi lebih aktif dan nyaman dalam proses pembelajaran, disamping lingkungannya yang mendukung siswa menjadi semangat juga berbagai materi pembelajaran yang disampaikan oleh para guru didalam kelas menjadikan siswa yang sebelumnya tidak aktif menjadi lebih aktif karena memang dalam hal ini siswa dituntut untuk memunculkan kreativitasnya seperti yang ditunjukkan oleh gambar XI berikut ini siswa belajar dan berdiskusi dalam mata pelajaran IPA untuk menyelesaikan masalah.



Gambar 11. Diskusi Kelompok Mata Pelajaran IPA

(Sumber: Pusat sumber belajar gugus gugus Tanjunganom 2012)

Dalam kegiatan diatas siswa berdiskusi mengenai pengenalan media sederhana dalam pembelajaran IPA dengan Langkah kegiatan :

1. Penyampaian tugas kelompok
 - a. Pembagian Kelompok
 - b. Pemberian informasi tentang tugas yang harus dikerjakan oleh setiap individu dalam kelompok.
2. Diskusi Kelompok
 - a. Identifikasi berbagai benda dalam kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan sebagai sumber belajar IPA
 - b. Menuliskan hasil pada kertas plano
 - c. Hasil diskusi kelompok ditulis pada kertas plano dan ditempel pada tempat yang tersedia
 - d. Kunjung karya ke kelompok lain dilanjutkan dengan diskusi kecil dengan kelompok yang dikunjungi
 - e. Revisi hasil
3. Presentasi
 - a. Kelompok tertentu mempresentasikan hasil
 - b. Kelompok lain memberikan tanggapan
4. Kegiatan akhir
 - a. Refleksi
 - b. Pemberian tugas terstruktur
5. Kegiatan akhir
 - a. Merumuskan simpulan
 - b. Pemantapan

b). Peningkatan hasil belajar peserta didik baik secara akademik maupun non akademik.

Bersama dengan para mitra kerjanya, 15 perguruan tinggi penghasil guru dan para praktisi di lapangan, *Decentralized Basic Education* (DBE2) telah menghasilkan paket-paket pelatihan yang memberikan manfaat kepada lebih dari 1.800 guru dan pendidik di 113 gugus sekolah, 9 kabupaten atau kota dan 7 provinsi binaan. Hal ini dimungkinkan melalui serangkaian pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka membantu meningkatkan profesionalisme guru dan pendidik yang pada gilirannya berdampak pula kepada prestasi belajar anak didiknya. Di samping kegiatan utama tersebut telah pula dilaksanakan berbagai kegiatan penunjang yang tidak saja ditujukan kepada para guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah tetapi juga para dosen di perguruan tinggi mitra.

Di kabupaten Nganjuk program *Decentralized Basic Education* (DBE2) bermitra dengan 20 sekolah dengan 2 (dua) kecamatan Tanjunganom dan Kertosono sebagai inti dari pusat pembelajaran. Setelah bekerja sama dengan baik selama hampir 5 tahun sejak didengungkan tahun 2006 banyak prestasi yang ditujukan oleh siswa baik itu secara akademik maupun non akademik ditingkat kecamatan, kabupaten, serta tingkat nasional, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh kepala sekolah SDN Kutorejo 1 Kertosono serta ketua PSBG Tanjunganom

“ Dengan adanya pelatihan-pelatihan dan alat pembelajaran dari DBE2 kami sangat terbantu dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran di kelas kami. Setelah dibina oleh program *Decentralized Basic Education* (DBE2) banyak pencapaian yang ditunjukkan oleh sekolah baik dikelas maupun diluar kelas termasuk dalam hal ini adalah prestasi belajar siswa dan guru”.

(Sumber : Wawancara, Rabu 30 Januari 2013 pukul 08.00 WIB)

Berikut adalah *success story* gugus sekolah Tanjunganom dan Kertosono setelah dibina oleh program *Decentralized Basic Education* (DBE2)

Tabel 12
Prestasi Siswa – siswi SD/MI Se Gugus
Sekolah Tanjunganom Tahun Pelajaran
2009-2010

No	Nama Lembaga	Nama Siswa	Jenis Lomba	Prestasi Di tingkat
1	SDN Tanjunganom 2	Tasya pruwita	Olimpiade MTK	Kecamatan Juara II
2	SDN Tanjunganom 2	Jalang maulana	Renang	Kecamatan Juara I
3	SDN Tanjunganom 2	Tasya Pruwita	Siswa berprestasi	Kecamatan Juara I
4	SDN Tanjunganom 2	W. nurazizah	Pildacil	Kecamatan Juara I
5	SDN Tanjunganom 2	Bella cindy	Menyanyi	Kecamatan Juara I
6	SDN Tanjunganom 2	Ahmad revian	Siswa berprestasi	Kecamatan Juara I
7	SDN Tanjunganom 3	Muhamad baharudinma	Olimpiade IPA	Kecamatan Juara I
8	SDN Tanjunganom 2	H.N Prabandari	Kreasi daur ulang	Kecamatan Juara I, 4 Kabupaten
9	SDN Tanjunganom 2	Bella Cindy	Menyanyi	Kecamatan , Kabupaten dan Propinsi Juara I
10	SDN Tanjunganom 4	Musyarofah	Bercerita	Kecamatan JuaraI,Kabupaten Juara II

(Sumber : Data succes story gugus sekolah Tanjunganom 2010)

c). Peningkatan kemampuan mengajar dan prestasi guru.

Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dirancang dalam bentuk program-program pelatihan berupa misalnya berupa materi

pembelajaran yang diharapkan dapat digunakan oleh para guru dalam penunjang materi yang disampaikan di dalam kelas, maupun ICT misalnya tentang internet yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran bidang studi apapun untuk mendownload berbagai materi penunjang tentang mata pelajaran yang pada saat itu disampaikan atau menunduh berbagai cerita-cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Semua program pelatihan ini diharapkan nantinya dapat menunjang kemampuan guru dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas.

Salah satu faktor yang membikin siswa nyaman belajar didalam kelas adalah cara mengajar seorang guru yang tidak membosankan dalam artian bagaimana guru merancang sebuah metode pembelajaran yang membuat siswanya aktif semua didalam kelas dengan mengimplementasikan apa yang telah dipelajari dalam pelatihan yang diberikan oleh Program *Decentralized Basic Education* (DBE2). misalnya dalam materi pelatihan program DBE2 gugus 01 Kertosono mata pelajaran IPA (IPA aktif di sekolah dasar). Langkah – langkah kegiatan yang akan dilaksanakan seperti yang ditunjukkan oleh gambar XIV berikut ini

Gambar 12. Langkah Kegiatan Program Pembelajaran IPA Aktif

(Sumber : dokumen materi pelatihan DBE2 gugus 01 Kertosono)

Dari gambar XII dapat dilihat bahwa program pelatihan yang disampaikan kepada para guru binaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) gugus 01 kecamatan Kertosono disesuaikan dengan rencana proses pembelajaran yang akan disampaikan di dalam kelas, adapun beberapa hal yang akan diharapkan kepada para guru dari pelatihan pembelajaran IPA aktif ini diantaranya adalah :

1. Mengevaluasi kesesuaian metode pembelajaran IPA yang dirancang guru pada RPP dengan Kompetensi Dasar dan Indikator.
2. Mencocokkan kesesuaian langkah-langkah pembelajaran dengan KD.
3. Memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan metode dan langkah-langkah pembelajaran.

Setelah mendapatkan pelatihan tersebut guru mengimplementasikan salah satu hasil dari program pelatihannya yaitu

dengan menggunakan Alternatif langkah-langkah pembelajaran dalam metode eksperimen, yang akan diberikan kepada siswa didalam pembelajaran dikelas dengan cara :

1. Menetapkan fenomena gejala alam.
2. Memunculkan pertanyaan yang memotivasi siswa untuk mengemukakan hipotesa.
3. Menggali data dengan berbagai cara.
4. Mengumpulkan dan menganalisis data
5. Menyimpulkan dan melaporkan.

Sehingga melalui program pelatihan yang diberikan oleh DBE2 dalam pembelajaran IPA tersebut guru dapat menyimpulkan bahwa siswa harus melakukan sesuatu untuk mencari tahu Misalnya Melakukan pengamatan, percobaan, penelitian, membaca, mendemonstrasikan, mendata, memaparkan obyek, mengajukan pertanyaan, menyusun penjelasan tentang gejala alam, menguji penjelasan tersebut, dan mengkomunikasikan gagasannya kepada pihak lain. Keaktifan dalam belajar IPA terletak pada dua segi,yaitu aktif bertindak secara fisik atau *hands-on* dan aktif berpikir atau *minds-on* Sehingga metode yang digunakan variatif dan multi metode.

Selain banyaknya program kegiatan dan pelatihan yang disampaikan oleh DBE2 yang nantinya sebagai bekal sekaligus tambahan pengetahuan yang akan diimplementasikan oleh para guru kepada para siswa di dalam pembelajaran kelas, sehingga dengan kata lain materi yang

disampaikan oleh program *Decentralized Basic Education* (DBE2) meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran, selain itu juga dari pembinaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2), banyak kisah sukses yang didapat oleh para guru serta kepala sekolah, berikut adalah prestasi para guru di gugus 01 kecamatan Tanjunganom setelah dibina oleh DBE2 sejak tahun 2006.

Tabel 13
Prestasi Guru SD/MI Se Gugus
Sekolah Tanjunganom Tahun Pelajaran
2009-2010

No	Nama guru	Asal sekolah	Prestasi	Tingkat
1	Ari Mangesti, S.Pd	SDN Tanjunganom 4	Guru Prestasi	Kecamatan Juara I, Kabupaten Juara I, Provinsi Juara 5 tahun 2007
2	Ismanu Hartojo, S.Pd	SDN Tanjunganom 2	Lomba Matematika	Kabupaten Juara I Tahun 2008
3	Siti Harfifah, S.Pd	SDN Tanjunganom 2	Media Pembelajaran	Kecamatan Juara I Tahun 2011
4	Ahmad Sodik, M.Pd	SDN Tanjunganom 2	Kep.Sek Prestasi	Kecamatan Juara I, Kabupaten Juara I Tahun 2009
5	Siti Harfifah, S.Pd	SDN Tanjunganom 2	Shooting Pembelajaran	Propinsi 2009
6	Ismanu Hartojo, S.Pd	SDN Tanjunganom 2	Guru Prestasi	Kecamatan Juara I, Kabupaten Juara I Tahun 2011
7	Basuki, S.Pd	SDN Jogomerto 1	Media Pembelajaran	Kabupaten Juara II Tahun 2011
8	Siti Patonah, S.Pd	SDN Tanjunganom 2	Guru Prestasi	Kecamatan Juara I 2006

(Sumber : Data succes story gugus sekolah Tanjunganom 2010)

b. Tercipta sistem sekolah berbasis gugus yang efektif dalam mendukung pengembangan metode pembelajaran berkesinambungan bagi para guru

Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dirancang dalam bentuk berbagai program kegiatan yang berupa pelatihan maupun workshop tentunya dalam hal ini melibatkan semua pihak baik itu kepala sekolah, guru, murid, pengawas pendidikan, maupun wali murid itu sendiri, banyaknya *stakeholder* yang terlibat memungkinkan terlaksananya sebuah program yang terorganisir dengan baik, untuk itu memerlukan sebuah wadah yang menampung semua *stakeholder* tersebut dalam sebuah paguyuban atau yang disebut dengan PSBG (Pusat Sumber Belajar Gugus), sehingga tujuan dari program DBE2 ini untuk lebih menjaga keberlanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan bisa cepat terlaksana, karena dalam PSBG (Pusat Sumber Belajar Gugus) selain dilengkapi dengan berbagai referensi pembelajaran juga adanya :

- a). Pengembangan Jaringan Gugus Sekolah Untuk Menghubungkan Sekolah Dengan Jaringan Global.

Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) diterapkan bukan hanya untuk meningkatkan kreativitas baik siswa maupun guru dalam proses pembelajaran ataupun peningkatan prestasi belajar siswa dan prestasi guru serta kepala sekolah tetapi juga dikembangkan berbagai pelatihan ataupun workshop untuk mendukung terciptanya gugus sekolah yang nyaman, efektif dalam mengembangkan proses pembelajaran untuk

menjembatani hal tersebut Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) membentuk Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) di kabupaten Nganjuk ditunjuk 2 (dua) kecamatan yakni Kertosono dan Tanjunganom sebagai gugus inti sekaligus tempat Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) berfungsi sebagai tempat bagi para guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat belajar dan bekerja sama, serta berinteraksi dengan berbagai sumber belajar.

Di Pusat Sumber Belajar Gugus PSBG, guru berkumpul untuk mendiskusikan materi pelatihan dan rencana program kerja PSBG; melaksanakan pelatihan dan lokakarya; menciptakan alat peraga murah (APM) dan CD/video pembelajaran; dan mendapatkan akses informasi secara luas. PSBG juga dilengkapi dengan perangkat elektronik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti televisi, pemutar CD dan DVD, komputer (laptop dan desktop), proyektor LCD, kamera foto dan video digital yang dapat dipinjam oleh guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mendukung pengembangan kapasitas gugus, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh kepala sekolah SDN Kutorejo 1 Kertosono serta ketua PSBG Tanjunganom

“ Pada Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) ini tidak hanya dilengkapi dengan berbagai buku bacaan, maupun komputer atau sebagai tempat pelatihan dan berbagai rangkaian kegiatan dari DBE2 tetapi juga dilengkapi dengan jaringan wifi dan internet yang berguna bagi para stakeholder untuk proses pembelajaran, tetapi juga menghubungkan antar gugus sekolah dengan jaringan global”

(Sumber : Wawancara, Rabu 30 Januari 2013 pukul 08.00 WIB)

Oleh karena itu Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) yang terdapat di Kertosono dan Tanjunganom akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai tempat pertemuan membahas berbagai rencana kegiatan di gugus (fungsi pertemuan), sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pelatihan untuk guru (fungsi pengembangan profesional), tempat untuk mengembangkan materi pembelajaran dan alat peraga murah (fungsi produksi), serta menjadi wahana mengakses sumber pembelajaran baik berupa buku, CD multimedia maupun secara online mengakses sumber pembelajaran di Internet (sebagai fungsi informasi).

Khusus untuk mendukung keempat fungsi tersebut, terutama untuk mendukung kegiatan komunikasi, kolaborasi, melakukan pencarian dan eksplorasi sumber belajar, PSBG yang terdapat di Kertosono dan Tanjunganom perlu untuk terhubung dengan jaringan global yaitu Internet serta menghubungkan komputer yang ada di PSBG dengan jaringan lokal (*Local Area Network*). Untuk itu PSBG membutuhkan infrastruktur jaringan Internet dan Intranet, yang akan dipergunakan sebagai kegiatan pelatihan maupun sarana pembelajaran, oleh karena itu DBE2 melakukan pengembangan kegiatan "*ClusterNet (Cluster Network)*" sebagai upaya untuk pembangunan jaringan internet dan jaringan lokal di gugus (*cluster*). Dalam kegiatan *Cluster Net* ini warga gugus bergotong-royong untuk membayar biaya bulanan langganan Internet. Mereka juga diharapkan dapat berswadaya untuk membuat perangkat penerima wireless yang

mudah, untuk menghubungkan sekolah mereka dengan koneksi jaringan lokal gugus dan koneksi Internet. Dengan harapan koneksi jaringan lokal dan Internet ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan guru dalam menunjang kegiatan pengembangan profesionalisme mereka serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kepada siswa saat ini.

b). Laporan Mutu Sekolah

Dengan adanya informasi LMS (Laporan Mutu Sekolah), orang tua siswa, masyarakat setempat, serta wakil-wakilnya diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan pemilihan pendidikan sekolah, serta partisipasi dan kontribusi mereka terhadap arah sekolah ke depan dapat meningkat. Hal ini dapat menciptakan sekolah yang terbuka, di mana sekolah lebih sering dianggap oleh masyarakat setempat sebagai sebuah birokrasi independen yang hanya memiliki tanggung jawab minimal terhadap masyarakat setempat yang seharusnya dilayani.

Bagian-bagian LMS (Laporan Mutu Sekolah) telah dirancang sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan informasi para orang tua siswa dan masyarakat sekolah pada umumnya. Bagian-bagian ini sengaja dirancang agar memungkinkan sekolah-sekolah dapat merasakan pencapaian-pencapaian para siswa, staf, serta komitenya. Prioritas pemerintah kabupaten khususnya dalam hal ini, yakni transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas turut dimasukkan ke jenjang sekolah

sebagai pengguna yang fundamental. Turut dipertimbangkan adalah ukuran dan jenis sekolah yang berbeda-beda, serta akses terhadap dana sehingga sekolah-sekolah dapat menyampaikan informasi mereka pada level yang sama melalui penargetan pada dana kebijakan (*discretionary fund*) sekolah-sekolah.

Berikut adalah hasil penilaian LMS (Laporan Mutu Sekolah)SDN Kutorejo 1 yang dilakukan oleh USAID tahun akademis 2007/2008 sampai dengan 2009/2010, dengan tes awal yang diberikan bulan agustus 2007, tes akhir pertama diberikan bulan april 2008, dan tes akhir tahap 2 dilakukan bulan maret 2010:

Tabel 14
Hasil Penilaian Awal 2007/2008

Nilai Tes Awal TA 2007/2008							
Persentase Rata-rata Jawaban Benar Berdasarkan Kelas dan Jenis Relamin							
	Kelas 3			Kelas 6			
	Jumlah Siswa	Matematika	Bahasa Indonesia	Jumlah Siswa	Matematika	Bahasa Indonesia	Sains
Laki-laki	32	(30,10%)	(75,16%)	16	(36,67%)	(55,63%)	(69,79%)
Perempuan	22	(17,58%)	(73,86%)	11	(35,15%)	(50,60%)	(70,00%)
Rata-rata Sekolah	54	(25,00%)	(74,63%)	27	(36,05%)	(53,58%)	(69,88%)
Rata-rata Prnpinsi	657	(23,69%)	(54,71%)	639	(24,94%)	(36,26%)	(45,37%)
Rata-rata Nasional	2.979	(21,54%)	(51,75%)	3.207	(24,47%)	(36,19%)	(41,27%)

Sumber : Data Laporan DBE2 2010

Tabel 15
Hasil Penilaian Akhir 2007/2008

Nilai Tes Akhir TA 2007/2008							
Persentase Rata-rata Jawaban Benar Berdasarkan Kelas dan Jenis Kelamin							
	Kelas 3			Kelas 6			
	Jumlah Siswa	Matematika	Bahasa Indonesia	Jumlah Siswa	Matematika	Bahasa Indonesia	Sains
Laki-laki	32	(51,77%)	(81,56%)	16	(66,87%)	(64,79%)	(81,04%)
Perempuan	22	(43,79%)	(85,00%)	11	(59,09%)	(62,73%)	(82,12%)
Rata-rata Sekolah	54	(48,52%)	(82,96%)	27	(63,70%)	(63,95%)	(81,48%)
Rata-rata Propinsi	657	(36,56%)	(69,16%)	639	(32,85%)	(46,22%)	(60,18%)
Rata-rata Nasional	2.979	(31,16%)	(64,91%)	3.207	(29,77%)	(43,86%)	(53,36%)

Sumber : Data Laporan DBE2 2010

Tabel 16
Hasil Penilaian Awal 2009/2010

Nilai Tes Akhir TA 2009/2010							
Persentase Rata-rata Jawaban Benar Berdasarkan Kelas dan Jenis Kelamin							
	Kelas 3			Kelas 6			
	Jumlah Siswa	Matematika	Bahasa Indonesia	Jumlah Siswa	Matematika	Bahasa Indonesia	Sains
Laki-laki	14	(59,29%)	(88,21%)	18	(69,08%)	(67,78%)	(88,15%)
Perempuan	16	(59,17%)	(89,06%)	12	(73,06%)	(68,61%)	(90,00%)
Rata-rata Sekolah	30	(59,22%)	(88,67%)	30	(70,67%)	(68,11%)	(88,89%)
Rata-rata Propinsi	640	(38,06%)	(71,95%)	590	(38,36%)	(53,16%)	(62,01%)
Rata-rata Nasional	3.215	(33,70%)	(65,18%)	2.987	(33,13%)	(47,69%)	(56,23%)

Sumber : Data Laporan DBE2 2010

- c). Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan proses pembelajaran.

Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) membentuk Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) di kabupaten Nganjuk ditunjuk 2 (dua) kecamatan yakni Kertosono dan Tanjunganom sebagai gugus inti sekaligus tempat Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) berfungsi sebagai tempat bagi para guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat belajar dan bekerja sama, serta berinteraksi dengan berbagai sumber belajar.

Di Pusat Sumber Belajar Gugus PSBG juga dilengkapi dengan perangkat elektronik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti televisi, pemutar CD dan DVD, komputer (laptop dan desktop), proyektor LCD, kamera foto dan video digital yang dapat dipinjam oleh guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mendukung pengembangan kapasitas gugus, yang merupakan bantuan jasa dari program *Decentralized Basic Education* (DBE2) hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh kepala sekolah SDN Kutorejo 1 Kertosono serta ketua PSBG Tanjunganom

“ Pada Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) kami diberikan bantuan jasa berupa buku-buku bacaan dari kelas 1-3 SD, televise, alat peraga, computer dan LCD proyektor, kamera digital, televise, semuanya dapat dimanfaatkan oleh para guru dan siswa ”

(Sumber : Wawancara, Rabu 30 Januari 2013 pukul 10.00 WIB)

Jadi dengan adanya program bantuan jasa dari *Decentralized Basic Education* (DBE2) yang berupa buku bacaan maupun peralatan Teknologi informasi (IT) para stakeholder yang terlibat utamanya yang merupakan

sekolah binaan dari program DBE2 tersebut dapat menciptakan sebuah pembelajaran secara berkesinambungan karena dengan bantuan jasa tersebut guru maupun kepala sekolah didorong untuk terus melakukan pembaharuan secara berkesinambungan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) Di Kabupaten Nganjuk.

Dalam proses pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) yang dilaksanakan di kabupaten Nganjuk sejak didengungkan tahun 2006 dan telah bermitra dengan 20 sekolah di wilayah timur dan barat kabupaten nganjuk, dengan dua sekolah yakni SDN 1 Kutorejo Kertosono dan SDN 4 Tanjunganom sebagai inti dan imbas 1 dari program tersebut tidak menemui kendala atau hambatan yang berarti, hambatan itu muncul hanya pada awal program tersebut akan dijalankan, namun dalam pelaksanaan program ini banyak sekali faktor pendukung kesuksesan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) baik yang berasal dari *intern* maupun *ekstern*, sehingga berbagai program pelatihan maupun workshop dapat berjalan dengan lancar dan sukses untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar khususnya di kabupaten Nganjuk, hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh kepala sekolah SDN Kutorejo 1 Kertosono

“Dalam pelaksanaan program DBE2 ini banyak pencapain yang ditunjukan oleh sekolah hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa stakeholder dan bantuan pihak lainnya, tetapi juga ada sedikit kendala saat program ini pertama kali akan dilaksanakan”.

(Sumber : Wawancara, Kamis 31 Januari 2013 pukul 08.00 WIB)

Dalam pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) yang dilaksanakan di kabupaten Nganjuk melalui 2 (dua) sekolah sebagai gugus inti dari pelaksanaan program hingga akhir pelaksanaan program tersebut terdapat berbagai dukungan yang berasal dari dua sumber, yaitu :

1) Faktor Internal :

Dukungan yang berasal dari Sekolah yang ditunjuk sebagai inti dari pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) yaitu SDN 1 Kutorejo Kertosono dan SDN 4 Tanjunganom sebagai SD imbas 1 antara lain

a). Lokasi atau tempat penerapan inti program

Dalam hal ini terdapatnya Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) yang terletak di Kertosono dan Tanjunganom yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai tempat pertemuan membahas berbagai rencana kegiatan di gugus (fungsi pertemuan), sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pelatihan untuk guru (fungsi pengembangan profesional), tempat untuk mengembangkan materi pembelajaran dan alat peraga murah (fungsi produksi), serta menjadi wahana mengakses sumber pembelajaran baik berupa buku, CD multimedia maupun secara online mengakses sumber pembelajaran di Internet (sebagai fungsi informasi).

b). Sarana dan Prasarana Program.

Selain itu sekolah mitra dari DBE2 ini juga diberikan beberapa fasilitas yang dilengkapi dengan perangkat elektronik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti televisi, pemutar CD dan DVD, komputer (laptop dan desktop), proyektor LCD, berbagai buku bacaan dan cerita, alat peraga dan olahraga, serta kamera foto dan video digital yang dapat dipinjam oleh guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mendukung pengembangan kapasitas gugus

c). Sumber daya Manusi (SDM) dari pelaksana program

Dalam pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2), banyak sumberdaya manusia yang mendukung kelancaran program tersebut terutama dari Dinas Pendidikan setempat yang mendukung, serta pengawas pendidikan yang dalam hal ini sebagai MTT (*Master Teacher Trainer*), kepala sekolah, komite sekolah dan para guru yang antusia dalam menyambut program kegiatan ini dan sangat kompeten.

2) Faktor Eksternal

- a). Relevansi dengan Program-program pendidikan yang ditetapkan pemerintah kabupaten Nganjuk melalui pemerintah pusat yang memegang mempunyai tujuan mampu menyelenggarakan kualitas pendidikan yang bermutu, aktif, efektif dan menyenangkan.

- b). DBE2 juga bermitra dengan Perguruan Tinggi (PT), khususnya perguruan tinggi yang menghasilkan dan meningkatkan kemampuan guru-guru SD.

Selain beberapa dukungan yang diberikan sehingga program *Decentralized Basic Education* (DBE2) di kabupaten Nganjuk melalui SDN 1 Kutorejo Kertosono dan SDN 4 Tanjunganom sebagai SD imbas 1 yang berlangsung sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 juga terdapat beberapa hambatan antara lain :

- a. Faktor Internal

- a). Sumber Daya Manusia MTT (*Master Teacher Trainer*)

Dalam pelaksanaan program tersebut sumber daya dalam hal ini adalah MTT (*Master Teacher Trainer*) hanya terdapat dua orang dan keduanya merangkap sebagai pengawas pendidikan di kabupaten Nganjuk, sehingga ketika ada jadwal kedinasan program pelatihan akan sedikit tertunda karena harus menyesuaikan dengan jadwal yang ada.

- b). Keterlambatan Pencairan Dana

Dalam hal ini, mengingat bahwa kebutuhan pendidikan itu tidak sedikit apalagi untuk menjalankan sebuah proyek dalam jangka waktu yang cukup lama, maka diperlukan sokongan dana yang banyak guna berjalannya program tersebut dan menghasilkan dampak yang diinginkan. Namun bantuan atau hibah yang didanai oleh USAID ini bukan berupa uang tetapi

berupa jasa seperti : buku-buku pembelajaran kelas 1-3 SD, alat peraga IPA, LCD, kamera digital, komputer. Dengan menandatangani aplikasi hibah yang telah disepakati Penerima hibah menyatakan bahwa Penerima hibah akan menggunakan sarana pendidikan ini hanya untuk kegiatan yang mendukung pengajaran dan pembelajaran. Penerima hibah juga menyetujui untuk memelihara dengan baik barang-barang yang tidak habis dipakai yang diterima melalui hibah ini. Namun dana hibah ini tidak bisa langsung dicairkan harus menunggu kurang lebih setengah semester untuk kemudian menerimanya, sehingga ketika akan diadakannya program kegiatan di PSBG seringkali ditunda dikarenakan keterbatasan sarana dan pra- sarana

b. Faktor Eksternal

a). Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama dalam hal ini adalah wali murid ketika program ini akan diterapkan pada saat awal pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2).

b). Persaingan antar sekolah

Di tempatkannya Pusat Pembelajaran Gugus (PSBG), sebagai awal dari berjalannya sebuah program kegiatan dan sangat penting dalam menunjang keberlangsungan suatu program kegiatan karena didalam PSBG dilengkapi dengan peralatan

yang menunjang kegiatan yang akan dilakukan oleh para stakeholder

C. Pembahasan Data Fokus Penelitian

1. Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan

a. Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Nganjuk.

Administrasi publik menurut Chandler dan plano (1988) dalam Keban (2004:03) ” merupakan serangkaian proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinir untuk memformulasikan, implementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam masalah kebijakan publik”.

Sedangkan kebijakan publik itu sendiri adalah sebuah opsi untuk mengatasi sebuah masalah. Dalam rangka memecahkan masalah ada salah satu tahapan penting untuk memberikan sebuah penilaian apakah kebijakan tersebut berdampak positif atau negatif yaitu evaluasi kebijakan, hal ini ditujukan untuk ditunjukkan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan atau dengan kata lain bahwa evaluasi ini merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu

sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Sedangkan dampak sendiri adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*). Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

Banyak masalah yang ditimbulkan oleh dampak sebuah program kebijakan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan baik itu secara positif maupun negatif, terutama dari kajian peneliti mengenai masalah pendidikan, Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Upaya peningkatan mutu pendidikan, yang sudah sejak lama menjadi agenda penting pemerintah, semakin mendapatkan penekanan beberapa tahun terakhir menyusul hasil penilaian internasional yang menempatkan Indonesia pada posisi rendah dalam hal mutu pendidikan.

Mengingat Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa, salah satu fenomena Dalam

Menghadapi era globalisasi industri dan perdagangan bebas yang akan datang adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusianya, melalui pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan khususnya di Sekolah dasar merupakan fokus perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sekolah dasar adalah satuan pendidikan formal pertama yang mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar. Selain itu pendidikan khususnya pendidikan dasar merupakan tempat pertama dalam memasuki dunia pendidikan formal di sekolah. Sehingga, kesalahan dalam menagani siswa di Sekolah dasar, akan terbawa pada jenjang pendidikan selanjutnya.

Menyadari akan hal tersebut diatas, maka upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar harus dilakukan dengan tepat dan teliti, dengan memaksimalkan gugus sekolah sebagai wahana profesionalisme guru, agar kesalahan yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, sistem pembinaan melalui gugus sekolah merupakan suatu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru serta faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan itu sendiri, baik secara eksternal (guru, murid, Sarana pembelajaran, Alat ukur atau evaluasi, metode) maupun internal (stakeholders (tidak termasuk masyarakat, Orang tua/ Wali murid, lingkungan, Dunia usaha, Lembaga pendidikan atasnya

atau Perguruan Tinggi), yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik secara regional maupun secara internasional. Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air kita. Hal ini beralasan, karena sistem birokrasi selalu menempatkan “kekuasaan” sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah-sekolah saat ini telah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi sejak kekuasaan tingkat pusat hingga daerah bahkan terkesan semakin buruk dalam era reformasi saat ini. Ironisnya, kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas pendidikan berada pada tempat yang “dikendalikan”. Merekalah seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan.

Oleh karena itulah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintahan Amerika Serikat melalui USAID pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam rangka membantu meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dalam konteks desentralisasi Melalui USAID menerapkan Program DBE. Didengungkan sejak empat tahun lalu, program DBE baru bisa direalisasikan sejak 2005.

DBE adalah suatu organisasi yang mengadakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang pendidikan

dasar. Organisasi ini juga turut serta membantu penyediaan sarana, prasarana dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di seluruh wilayah di Indonesia utamanya lima daerah yang menjadi prioritas yaitu Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat-Banten, Sulawesi Selatan. Di Jawa Timur, utamanya sembilan daerah prioritas yaitu Bangkalan, Sampang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Tuban, Bojonegoro, Mojokerto, Nganjuk.

Tujuan dari program ini ialah peningkatan kualitas pendidikan dasar di Indonesia melalui tiga komponen kegiatan yang saling berintegrasi, yaitu: 1) desentralisasi manajemen dan tata pelayanan pendidikan yang lebih efektif (DBE1), 2) peningkatan kualitas belajar mengajar (DBE2), serta 3) peningkatan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah melalui kecakapan hidup dan keterampilan vokasional (DBE3). Dengan program DBE mampu mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah melalui serangkaian pendekatan inovatif yang dirancang untuk memperkuat pelatihan guru dan meningkatkan lingkungan belajar di sekolah.

Melihat fenomena dilapangan akan pentingnya pendidikan dasar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya dikabupaten Nganjuk peneliti lebih memfokuskan kajiannya pada program *Decentralized Basic Education* (DBE2), yang lebih memprioritaskan pada peningkatan kualitas belajar mengajar. Dalam hal ini DBE2 menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan sistem pendidikan dasar di

kabupaten Nganjuk, termasuk diantaranya desentralisasi pelatihan guru yang diakreditasi oleh universitas; kepemimpinan dalam pengelolaan belajar mengajar; instruksi audio interaktif (IAI) untuk guru dan siswa Taman Kanak-kanak (TK); pusat sumber belajar gugus; kerjasama antar universitas terutama yang membina guru SD; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat belajar mengajar serta membangun kerjasama dengan sektor swasta untuk perluasan dampak proyek.

Program DBE 2 di Kabupaten Nganjuk berkembang lebih jauh untuk menciptakan sistem sekolah berbasis gugus yang efektif untuk mendukung pengembangan metode pembelajaran berkesinambungan bagi guru. Dengan dunia pendidikan yang lebih terkonsep, dalam lima tahun sudah bisa kerja secara *Local Teacher Training*. Selain itu setiap gugus memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan profesi guru yang terdiri dari paket-paket pelatihan program antara lain :

a). Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG)

Di SDN Kutorejo 1 dan di SDN 4 Tanjunganom *Decentralized Basic Education 2* (DBE2) sebagai proyek peningkatan kualitas belajar mengajar pendidikan dasar di kabupaten Nganjuk khususnya, saat ini tengah mengembangkan Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) guna mendukung dan memfasilitasi berbagai kegiatan di setiap gugus sekolah sebagai peningkatan Pusat Kegiatan Guru (PKG) yang telah ada lebih dulu. Selaras dengan Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program

pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*), akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

Sesuai dengan pendapat tersebut maka, dapat dilihat bahwasanya adanya program *Decentralized Basic Education 2* (DBE2) memberikan suatu perubahan dengan terbentuknya Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) sesuai dengan empat fungsinya, akan digunakan oleh pemangku kepentingan pendidikan sebagai tempat pertemuan membahas berbagai rencana kegiatan di gugus (fungsi pertemuan), hal ini sesuai dengan dimensi dari sebuah dampak kebijakan, Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dengan melibatkan masyarakat. yakni sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pelatihan untuk guru (fungsi pengembangan profesional), tempat untuk mengembangkan materi pembelajaran dan alat peraga murah (fungsi produksi), serta menjadi wahana mengakses sumber pembelajaran baik berupa buku, CD Multimedia maupun secara online mengakses sumber pembelajaran di Internet (sebagai fungsi informasi), pada intinya Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) difungsikan sebagai paguyuban untuk bagaimana merancang sebuah program yang dibina oleh DBE2 yang diimplementasikan dalam rangka peningkatan proses belajar mengajar

secara aktif, kreatif dan menyenangkan yang akan berdampak pada kualitas pendidikan dan prestasi siswa.

Teori ini sesuai dengan dampak dari program *Decentralized Basic Education 2* (DBE2) yang mempunyai beberapa dimensi, diantaranya:

1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dengan melibatkan masyarakat, karena salah satu fungsi dari PSBG ini adalah *pertemuan* yang dalam hal ini para *stakeholder* termasuk masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah.
2. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain, karena didalam PSBG ini juga difungsikan sebagai tempat untuk pengembangan materi pembelajaran dan alat peraga murah dalam hal ini adalah *produksi*, yang bisa dimanfaatkan oleh semua *stakeholder* serta sekolah mitra maupun non mitra.
3. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya yang ada pada kondisi saat ini, dalam menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan PSBG mempunyai fasilitas sebagai fungsi *informasi* terdapat berbagai wahana yang digunakan untuk mengakses sumber pembelajaran yang berupa

multimedia dan dapat terus dimanfaatkan oleh peserta didik maupun para guru secara berkesinambungan.

b). Pembelajaran aktif dengan TIK

Program Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Decentralized Basic Education 2 (DBE2)* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru sekolah dasar menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran aktif, karena kemampuan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah guru merupakan salah satu bidang penting dalam manajemen pendidikan, sumber daya manusia dalam konteks manajemen adalah “*people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals*” oleh karena itu sumber daya manusia dalam suatu organisasi termasuk pendidikan memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat member sumbangan dalam pencapaian tujuan, dan berdasarkan salah satu faktor internal yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan adalah tersedianya sarana prasarana, oleh karena itu dalam pencapaian tujuan program tersebut ditempuh melalui dua program inti yakni, *Intel teach Getting Started* dan Pelatihan DALI (*Development active learning with ICT*) untuk guru, karena keunggulan kompetitif ini nantinya akan berdampak pada semakin baiknya kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Nganjuk khususnya.

c). Paket Pelatihan Terakreditasi

Program *Desentralized Basic Education 2* (DBE 2) yang dilaksanakan pada tahun 2006 bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar dan madrasah ibtdaiyah. Program ini telah berhasil dalam mengembangkan Pelatihan Terakreditasi. Bekerjasama dengan 14 perguruan tinggi mitra, DBE 2 telah mengembangkan 9 paket pelatihan terakreditasi, mengujicobakan dan mengimplementasikan paket-paket tersebut kepada para guru dan tenaga kependidikan di tingkat sekolah dasar, gugus dan kabupaten atau Kota binaan DBE 2 hingga para guru-guru peserta pelatihan mendapat sertifikat pengakuan kredit (SKS) dari perguruan tinggi mitra masing-masing propinsi.

Sesuai dengan pernyataan tersebut diatas disebutkan bahwasannya agar dalam pelaksanaan pelatihan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik memerlukan dukungan dari semua pihak tidak hanya kepala sekolah dan guru saja namun juga keterlibatan masyarakat didalam pelaksanaan pelatihan ini sangat diperlukan dalam proses peningkatan mutu pembelajara misalnya dengan bermusyawarah menentukan kebutuhan yang akan digunakan dalam pelatihan, karena konsep mutu harus dikaitkan dengan perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan (*Continuous quality improvement*). Dari sisi sekolah sebagai tempat menempuh pendidikan mutu dapat digambarkan sebagai sesuatu hasil yang telah sesuai atau melebihi dari apa yang ada dalam perencanaan

program. Program perencanaan dimaksud meliputi input (peserta didik, kurikulum, dana, data dan informasi, pendidik dan tenaga kependidikan, motivasi belajar, kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan), Proses (lama waktu belajar dan mengikuti pendidikan, kesempatan mengikuti pembelajaran, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran), dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau output (jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai ujian, jumlah siswa yang bekerja dan diterima pada lapangan kerja, peran serta lulusan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat).

Namun mutu atau kepuasan dari sisi sekolah tadi belum tentu sama dengan mutu atau kepuasan menurut pelanggan dalam hal ini adalah masyarakat atau wali murid. Dikatakan bermutu menurut pelanggan apabila program-program, kegiatan, dan hasil yang dicapai telah sesuai atau melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan itu sendiri. Menyiasati agar ada relevansi antara mutu yang dimaksud oleh pelanggan, dalam hal ini sekolah, maka harus ada kerja sama antara sekolah dengan pihak pengguna pendidikan dalam penentuan dan pembuatan program-program kegaitan yang akan dilaksanakan di sekolah, maka dari itu melalui program pelatihan terakreditasi sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan mencoba melibatkan semua pihak termasuk masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

d). Program membaca di kelas

Melalui Program Membaca di Kelas, DBE 2 bekerjasama dengan para tenaga pendidik untuk membangun budaya membaca di lingkungan Sekolah Dasar. Program ini memfokuskan pada penyediaan materi baca (buku non-teks) di kelas 1–3 di semua sekolah binaan DBE 2. Dengan pendekatan perpustakaan kelas, buku-buku yang diberikan langsung ditempatkan di dalam ruangan kelas sehingga memudahkan guru dan siswa dalam menggunakannya. Untuk mendukung penyediaan materi-materi baca tersebut, pelatihan profesional bagi guru juga diberikan guna mengembangkan keterampilan mereka dalam meningkatkan minat dan budaya baca di lingkungan sekolah. Keterlibatan orang tua juga dibangun, dimana siswa diberikan untuk membawa pulang buku untuk dibaca bersama keluarga.

Sesuai dengan gambaran tersebut di atas dapat dikatakan bahwa layanan pendidikan mencakup dimensi proses dan dimensi sarana prasarana. Proses berupa pelaksanaan pembelajaran, metode, komunikasi, motivasi, dan sebagainya. Sarana prasarana berupa alat-alat pembelajaran, gedung, dan lingkungan sekolah yang kondusif merupakan unsur penting yang mutlak harus ada dalam peningkatan mutu pendidikan.

Bermutu atau tidaknya proses dan sarana prasarana pendidikan sebagai indikator dalam layanan pendidikan dapat dibandingkan dengan standar yang tertuang dalam PP 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya mencakup standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Apabila sarana prasarana, dan proses yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan harapan sekolah maupun *stakeholder* pendidikan lainnya, maka layanan pendidikan dapat memuaskan semua pihak dalam hal ini adalah masyarakat maupun yang paling utama adalah wali murid. Dengan kata lain, layanan pendidikan yang bermutu adalah layanan pendidikan yang sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dapat memenuhi harapan dan kebutuhan semua pihak.

b. Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) Yang Diterapkan SDN Tanjunganom 4 (SD Imbas 1) dan SDN Kutorejo 1 Kertosono.

Dari berbagai takrif tentang berbagai macam program, dapat diketahui bahwa program di samping bersifat alokatif dan diskriptif, program juga bersifat inovatif dan multi fungsi, utamanya menyangkut program pendidikan yang didegungkan oleh pemerintah kabupaten Nganjuk, upaya itu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama pada tingkat dasar.

Digulirkannya paradigma baru pendidikan yang menganut sistem desentralisasi pendidikan, sesuai dengan PP Nomor 25 tahun

2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom, bertitik tolak pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan sistem desentralisasi pendidikan sekolah diberi keleluasaan untuk memperoleh pendidikan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan kondisi lingkungan serta kemampuan masing-masing. Sehingga hasil dari pendidikan akan betul-betul dirasakan manfaatnya karena mulai dari proses perencanaan sudah mempertimbangkan segi relevansinya dengan kebutuhan yang ada.

Dari hasil data penelitian yang diperoleh peneliti, ketidakpuasan masyarakat di kabupaten Nganjuk terhadap program pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya adalah:

- a). Program pendidikan yang sebelumnya ada selalu Berubah-ubah, sehingga banyak para stakeholder pendidikan yang kurang faham dalam sisi penerapannya.
- b). Desain dan pelaksanaan program pendidikan yang ada selalu sama tanpa ada perbaikan.
- c). Ketidaksiapan dan kedikmampuan guru maupun sarana dan prasarana di kabupaten Nganjuk menjadi penghambat dalam pengembangan kurikulum program yang dikembangkan pemerintah.

- d). Dalam pembelajaran era sekarang ini dituntut untuk mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Atas dasar Melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional, termasuk peningkatan peranan *stakeholders* sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan inilah maka sangat jelas bahwa tekad pemerintah kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan sistem pendidikan secara desentralistik terkesan sangat kuat. Dengan sistem ini pendidikan dapat dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, di mana proses pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang paling dekat dengan proses pembelajaran (kepala sekolah, guru, murid, pengawas, pendidikan, komite sekolah dan sarana pembelajaran,).

Untuk itulah pemerintah kabupaten Nganjuk menerapkan program desentralisasi pendidikan atau yang lebih dikenal dengan *Desentralized Basic Education* (DBE) dengan tujuan Tujuan dari program ini ialah peningkatan kualitas pendidikan dasar maka pemerintah daerah kabupaten Nganjuk memfokuskan program ini pada komponen program yang kedua yakni peningkatan kualitas belajar mengajar (DBE2).

Program DBE2 ini memberikan pembinaan di sektor pembelajaran serta menciptakan kreativitas dalam hal proses belajar mengajar oleh para guru didalam kelas, melalui pelatihan dan workshop yang dilaksanakan secara kontinue. Dengan adanya program DBE2 ini diharapkan pembinaan

disektor pembelajaran khususnya pada tingkat sekolah dasar dapat merubah perilaku guru dalam mengajar, perubahan perilaku siswa serta penciptaan lingkungan yang memungkinkan siswa belajar aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Dikabupaten Nganjuk sendiri DBE2 telah bermitra dengan kurang lebih 20 sekolah dari dua kecamatan Kertosono dan Tanjunganom yakni: SDN Kutorejo 1, SD Kutorejo II, SD Kudu I, SD Kudu II, SDN Banaran II, SDN Banaran III, MIS Da'watul Choir Drenges, MIS Sabilillah Tanjung, MIS Nurul Huda Bangsri, SD Muhammadiyah Banaran, sedangkan di wilayah Tanjunganom diantaranya, SDN Tanjunganom II (inti), SDN Tanjunganom IV (imbis 1), SDN Tanjunganom I, SDN Tanjunganom III, SDN Tanjunganom V, SDN Jogomerto I, SDN Jogomerto II, SDI Darush Sholihin, MI Damai, MIN Sumberkepuh. Di SDN Kutorejo 1 dan di SDN 4 Tanjunganom *Decentralized Basic Education 2* (DBE2) sebagai proyek peningkatan kualitas belajar mengajar pendidikan dasar di kabupaten Nganjuk khususnya, saat ini tengah mengembangkan Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) guna mendukung dan memfasilitasi berbagai kegiatan di setiap gugus sekolah, berbagai pelatihan dan program kegiatan yang telah dilaksanakan di SD inti program yakni Di SDN Kutorejo 1 dan di SDN 4 Tanjunganom sebagai SD imbas 1 yang Pusat Sumber Belajar Gugus ditempatkan pada SDN 2 Tanjunganom diantaranya adalah :

1. Lokakarya Pemantapan PSBG
2. Lokakarya Pengelolaan PSBG
3. Lokakarya Pengembangan Kapasitas Gugus
 - 1). Pemasyarakatan dan Promosi PSBG
 - 2). Perawatan Perangkat TIK dan *Troubleshooting*
Pelatihan Dasar Internet
 - 3). Pelatihan-pelatihan program DBE 2 lainnya: Pembelajaran Audio Interaktif (PAI) untuk TK, Membaca di Kelas, Pembelajaran Aktif dengan TIK (DALI).

Kegiatan- kegiatan pelatihan dan lokakarya ini juga dikategorikan sebagai kegiatan peningkatan mutu pendidikan dan juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini sesuai dengan definisi Mutu yang merupakan konteks yang dinamis, wujudnya dapat berupa kepuasan. Kepuasan ini dapat dilihat dari dua sisi, pertama dari sisi produsen dan yang kedua dari sisi pengguna. Mutu bersifat dinamis karena ukuran kepuasan akan selalu berubah dengan cepat sejalan dengan perubahan waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Itulah sebabnya, konsep mutu harus dikaitkan dengan upaya perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dari sisi produsen mutu dapat digambarkan sebagai sesuatu hasil yang telah sesuai atau melebihi dari apa yang ada dalam perencanaan program. Program perencanaan dimaksud meliputi input, proses, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau

output. Namun mutu atau kepuasan dari sisi produsen belum tentu sama dengan mutu atau kepuasan menurut pelanggan. Dikatakan bermutu menurut pelanggan apabila program-program, kegiatan, dan hasil yang dicapai telah sesuai atau melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan itu sendiri. Menyiasati agar ada relevansi antara mutu yang dimaksud oleh masyarakat di kabupaten Nganjuk, dalam hal ini sekolah yang menerapkan program *Decentralized Basic Education* (DBE2), maka harus ada kerja sama antara sekolah yang dibina oleh program tersebut dengan pihak pengguna pendidikan dalam penentuan dan pembuatan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Karena apabila ditilik dari sisi mutu pendidikan itu sendiri banyak faktor - faktor yang memepengaruhi baik itu dari dalam yang meliputi : guru, murid, sarana pembelajaran, metode, dan alat ukur evaluasi. Sedangkan faktor dari luar adalah : para stakeholder, wali murid, lingkungan, dunia usaha, dan lembaga pergruan tinggi yang membina guru SD. Untuk itu dalam mewujudkan suatu layanan pendidikan yang bermutu dan yang berdasarkan prinsip desentralisasi maka pemerintah kabupaten Nganjuk melalui SDN kutorejo 1 (inti) dan SDN Tanjunganom 4 (imbas 1) menerapkan program DBE2 dengan mengembangkan suatu pelatihan yang tidak hanya ditujukan kepada para guru tetapi juga kepada semua stakeholder. Agar program ini memberi dampak perubahan nyata dalam pembelajaran di sekolah, pelatihan ini dirancang untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dan institusi kependidikan yang terkait dengan

pengembangan sekolah. Pemangku kepentingan tersebut meliputi unsur Diknas dan Depag, unsur Pusat Sumber Belajar Gugu (PSBG), para guru, kepala sekolah, wakil komite sekolah dan pengawas yang terkait dengan sekolah tersebut. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan mereka mempunyai visi yang sama, ada rasa memiliki dan memberikan dukungan untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Sekolah sebagai suatu organisasi yang memberikan jasa layanan pendidikan, mempunyai tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal.

Itulah sebabnya, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu elemen-elemen yang ada di dalamnya. Secara umum unsur-unsur yang ada dalam organisasi sekolah ini terdiri dari tiga dimensi yaitu masukan (input), proses, dan keluaran (output). Input, meliputi peserta didik, kurikulum, dana, data dan informasi, pendidik dan tenaga kependidikan, motivasi belajar, kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan, sararan dan prasarana, serta lingkungan, sedangkan proses meliputi lama waktu belajar dan mengikuti pendidikan, kesempatan mengikuti pembelajaran, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, sedangkan output itu sendiri meliputi meliputi jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai ujian, jumlah siswa yang bekerja dan diterima pada lapangan kerja, peran serta lulusan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Dan salah satu bidang penting dalam administrasi atau

manajemen pendidikan adalah berkaitan dengan personil atau sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu Pendidik seperti guru maupun tenaga kependidikan seperti tenaga administratif. Intensitas dunia pendidikan berhubungan dengan manusia dapat di pandang sebagai suatu perbedaan penting antara lembaga pendidikan atau organisasi sekolah dengan organisasi lainnya.

Teori ini juga sesuai dengan tujuan yang diupayakan oleh pemerintah kabupaten Nganjuk melalui sekolah yang telah dibina oleh program *Decentralized Basic Education* (DBE2), yakni SDN kutorejo 1 dan SDN Tanjunganom 4, adapun Program-program kegiatan yang dibina oleh DBE2 yang mengupayakan peningkatan sumberdaya manusia pendidikan diantaranya adalah: Pelatihan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan komitmen bahwa Menyadari betapa pentingnya peran komputer dalam mendukung kegiatan pembelajaran, maka DBE 2 memandang penting untuk membekali para guru sebagai agent perubahan untuk melek komputer. Guru diberikan pelatihan tentang cara-cara pengoperasian komputer hingga pembuatan bahan ajar maupun presentasi dengan computer selain itu juga program Pelatihan DALI (*Developing Active Learning With ICT*) dngan tujuan memberikan bantuan teknis berupa paket pelatihan pengembangan pembelajaran aktif dengan menggunakan perangkat TIK. Pada paket pelatihan ini juga dijelas-kan tentang pengelolaan kelas dengan komputer terbatas, dimana seorang guru

dapat menggunakan satu perangkat komputer untuk pembelajaran didalam kelas.

c. Stakeholder Program Decentralized Basic Education (DBE2)

Agar program ini memberi dampak perubahan nyata dalam pembelajaran di sekolah, pelatihan ini dirancang untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dan institusi kependidikan yang terkait dengan pengembangan sekolah. Pemangku kepentingan tersebut meliputi unsur Diknas dan Depag, unsur Pusat Sumber Belajar Gugu (PSBG), para guru, kepala sekolah, wakil komite sekolah dan pengawas yang terkait dengan sekolah tersebut. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan mereka mempunyai visi yang sama, ada rasa memiliki dan memberikan dukungan untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Dengan demikian nampak bahwa manajemen sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam suatu organisasi termasuk dalam lembaga pendidikan seperti sekolah yang juga memerlukan pengelolaan Sumber daya manusia yang efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Tuntutan akan upaya peningkatan kualitas pendidikan pada dasarnya berimplikasi pada perlunya sekolah mempunyai sumber daya manusia pendidikan baik pendidik maupun sumber daya manusia lainnya untuk berkinerja secara optimal, dan hal ini jelas berakibat pada perlunya melakukan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai

dengan tuntutan legal formal seperti kualifikasi dan kompetensi, maupun tuntutan lingkungan eksternal yang makin kompetitif di era globalisasi dewasa ini, yang menuntut kualitas sumber daya manusia yang makin meningkat yang mempunyai sikap kreatif dan inovatif serta siap dalam menghadapi ketatnya persaingan.

2. Dampak Pelaksanaan Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar Di Kabupaten Nganjuk.

Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu penerapan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dengan sasaran peningkatan mutu pendidikan (baik akibat yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan strategi baru pada peningkatan mutu pendidikan (*impact*). Akibat yang dihasilkan oleh suatu penerapan program yang tidak melibatkan pemerintah pusat dalam penerapannya utamanya menyangkut pemberian layanan pendidikan, yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perubahan inovasi baru untuk menciptakan suatu pembelajaran yang aktif, kreatif, aktif dan menyenangkan (*effects*).

Sesuai dengan pendapat tersebut diatas, maka untuk melihat sejauh mana sasaran dari program desentralisasi pendidikan ini dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah kabupaten Nganjuk

melalui dua sekolah yang menjadi inti dan imbas 1 dari program *Decentralized Basic Education* (DBE2) itu yakni SDN Kutorejo 1 Kertosono dan SDN 4 Tanjunganom sebagai SD imbas 1 mengimplementasikan beberapa program kegiatan baik itu pelatihan maupun workshop dengan sasaran tidak hanya siswa tetapi juga guru dan keplas ekolah serta stakeholder pendidikan yang lainnya, hal ini sebagai wujud komitmen pemerintah kabupaten Nganjuk didalam rangka meningkatkan mutu pendidikan utamanya sekolah dasar diera desentralisasi sekarang ini.

Peningkatan mutu pendidikan utamanya di sekolah dasar merupakan fokus perhatian dalam rangka meningkatkat kualitas sumber daya manusia karena sekolah dasar merupakan satuan pendidikan formal pertama yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, maka untuk itulah upaya meningkatkan mutu sekolah dasar harus dilakukan dengan tepat dan teliti melalui program *Decentralized Basic Education* (DBE2), pemerintah kabupaten Nganjuk membentuk Pusat Sumber Belajar Gugus sebagai wadah dalam merancang, mengimplementsikan dan mengevaluasi berbagai program kegiatan yang akan dilakukan oleh sekolah yang bermitra dengan program DBE2, oleh karena itulah evaluasi dampak ini berusaha untuk menungkap bagaimana sebenarnya program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dapat meningkatkan mutu pendidikan diera desentralisasi pendidikan sekarang

ini melalui beberapa program kegiatan peningkatan sumber daya manusia pendidikan.

Evaluasi dampak program *Decentralized Basic Education* (DBE2) memberikan perhatian yang besar pada output dan dampak program kebijakan. Evaluasi yang dilakukan untuk melihat berbagai hal antara lain yaitu:

- a). Menentukan apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga dan lembaga, dalam hal ini sangat jelas bahwa program *Decentralized Basic Education* (DBE2) untuk meningkatkan pendidikan dasar di kabupaten Nganjuk mempunyai beberapa program pelatihan dan pengembangan yang tidak hanya ditujukan kepada para guru saja tetapi juga *stakeholder* lainnya termasuk siswa itu sendiri dan juga wali murid khususnya. Dan didalam kaitannya dalam proses pembelajaran didalam kelas DBE2 telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan sistem pendidikan dasar di kabupaten Nganjuk, termasuk di dalamnya: pelatihan guru terdesentralisasi yang diakreditasi oleh universitas; kepemimpinan dan manajemen pembelajaran; instruksi audio interaktif (IAI) untuk guru dan siswa Taman Kanak-kanak (TK); pusat sumber belajar gugus; kerjasama dengan universitas yang membina guru SD; teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat pembelajaran

b). Menilai apakah dampak tersebut berkaitan dengan intervensi program. Merujuk pada upaya yang akan dicapai oleh program *Decentralized Basic Education* (DBE2) itu sendiri adalah untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar di kabupaten Nganjuk melalui serangkaian pendekatan inovatif yang dirancang untuk memperkuat pelatihan guru dan meningkatkan lingkungan belajar di sekolah, bahwa sangat jelas disini kalau program desentralisasi pendidikan ini mencoba untuk membenahi Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan sentralistik yang dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan dalam mutu dan keunggulan pendidikan di Indonesia dan kabupaten Nganjuk khususnya. Hal ini beralasan, karena sistem birokrasi selalu menempatkan “kekuasaan” sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan, atas dasar inilah maka pemerintah kabupaten Nganjuk melalui SDN Kutorejo 1 Kertosono dan SDN 4 Tanjunganom (imbis 1) mencoba mewujudkan harapan pemerintah kabupaten Nganjuk dengan menerapkan program desentralisasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan sistem profesionalisme guru, yang mampu menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan efisien, serta

terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan dapat dipertanggung jawabkan.

- c). Mengeksplorasi akibat yang tidak diperkirakan baik positif maupun negatifnya. Dalam pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dirancang dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan dasar secara terdesentralisasi melalui serangkaian program-program kegiatan yang telah dirancang oleh *Propicial Coordinator* (PC), serangkaian program kegiatan tersebut tentunya dirancang bukan hanya ditunjukkan kepada para murid tetapi juga sumber daya lainnya seperti guru, kepala sekolah, wali murid, dan pengawasa pendidikan, pelatihan dan pembelajar yang ditujukan dalam hal antara lain : munculnya kreativitas siswa dalam proses pembelajaran di kelas; peningkatan hasil belajar peserta didik baik secara akademik maupun non akademik; peningkatan kemampuan mengajar dan prestasi guru; pengembangan jaringan gugus sekolah untuk menghubungkan sekolah dengan jaringan global; laporan mutu sekolah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya program- program pelatihan dan juga berbagai fasilitas yang disediakan oleh DBE2 di pusat sumber belajar gugus adalah: adanya jaminan dan keyakinan bahwa pendidikan akan tetap berfungsi sebagai wahana

pemersatu bangsa, Masa transisi benar-benar di gunakan untuk menyiapkan berbagai hal yang dilakukan secara gradual dan di jadwalkan setepat mungkin, adanya komitmen dari pemerintah daerah kabupaten Nganjuk terhadap pendidikan, terutama dalam pendanaan pendidikan. adanya kesiapan sumber daya manusia dan sistem manajemen yang tepat yang telah dipersiapkan dengan matang oleh kabupaten Nganjuk, namun dari beberapa hal tersebut juga ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya adalah Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahami sepenuhnya permasalahan dan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pendidikan, dengan kata lain adalah kurangnya sosialisasi mengenai bagaimana program DBE2 ini dijalankan dan apa tujuannya kepada dunia pendidikan. Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam di karenakan perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial, kurangnya sumber daya yang adalah yang menimbulkan faktor ini terjadi diantaranya adalah keterbatasan seorang pemandu program dikarenakan berbenturan dengan tanggung jawab dalam tugas lainnya.

- d). Permasalahan yang disoroti pada bagaimana program mempengaruhi peserta program dan apakah perbaikan kondisi peserta program betul-betul disebabkan oleh program ataukah faktor lain, dalam program *Decentralized Basic Education* (DBE2) banyak program kegiatan maupun pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia pendidikan dikarenakan dalam suatu organisasi termasuk organisasi pendidikan memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberi sumbangan bagi pencapaian tujuan. Meningkatnya kinerja sumber daya manusia akan berdampak pada semakin baiknya kinerja organisasi dalam menjalankan perannya di masyarakat, begitupula dengan tujuan program ini dengan menciptakan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan, DBE2 telah mengimplmentasikan beberapa program kegiatan yang disampaikan kepada para guru, kepala sekolah dan pengawas pendidikan dan nantinya diterapkan dalam proses belajar mengajar, melalui pusat pembelajaran gugus program kegiatan dan pelatihan tersebut diantaranya adalah Lokakarya Pemantapan PSBG, Lokakarya Pengelolaan PSBG, Lokakarya Pengembangan Kapasitas Gugus, Pemasarakatan dan Promosi PSBG, Perawatan

Perangkat TIK dan Troubleshooting, Pelatihan Dasar Internet, Pelatihan-pelatihan program DBE 2 lainnya: Pembelajaran Audio Interaktif (PAI) untuk TK, Membaca di Kelas, Pembelajaran Aktif dengan TIK (DALI), jadi sangat jelas dengan berbagai program kegiatan dan pelatihan yang diterapkan khususnya kepada para guru sangat mempengaruhi utamanya dikarenakan pembelajaran pada saat sekarang ini dituntut dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dengan pembelajaran yang sekarang ini mau tidak mau guru dituntut untuk mempersiapkan pembelajaran sebaik mungkin, dan bekal itu sudah dirancang dan dipersiapkan dalam pelatihan sebelum dan sesudah diterapkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, artinya program-program pelatihan yang dibina oleh program *Decentralized Basic Education* (DBE2) benar-benar mempengaruhi kinerja guru dalam proses pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dampak kebijakan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada tercapainya indikator-indikator pelaksanaan kebijakan, yang dapat diukur dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun *outcome* kebijakan. Sehingga menimbulkan suatu dampak, baik

dampak positif maupun negatif yang akan berpengaruh juga terhadap perubahan suatu organisasi dalam menyusun suatu strategi dan kebijakan didalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dampak terhadap kebijakan program tersebut antara lain :

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dirancang dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan dasar secara terdesentralisasi melalui serangkaian program-program kegiatan yang telah dirancang oleh *Propicial Coordinator (PC)*, diantaranya Program Paket Pelatihan Terakreditasi, Pembelajaran Audio Interaktif untuk Taman Kanak-Kanak, Program Membaca di Kelas, Pusat Sumber Belajar Gugus, Pembelajaran Aktif dengan TIK, Pembelajaran di Kelas dengan Satu Komputer, Pembelajaran Aktif untuk Perguruan Tinggi, serangkaian program kegiatan tersebut tentunya dirancang bukan hanya ditunjukkan kepada para murid tetapi juga sumber daya lainnya seperti guru, kepala sekolah, wali murid, dan pengawasa pendidikan, pelatihan dan pembelajar yang telah dilaksanakan diatas telah menimbulkan suatu perubahan antara lain : munculnya kreativitas siswa dalam proses pembelajaran di kelas, peningkatan hasil belajar peserta didik baik secara akademik maupun non akademik, peningkatan kemampuan mengajar dan prestasi guru.

Meningkatkan kinerja sumber daya manusia disini memerlukan pengelolaan yang sistematis dan terarah, agar proses pencapaian tujuan

organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini berarti bahwa manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan sekolah, mitra atau pun non mitra program DBE2, apapun latar belakang sekolahnya, aspek manajemen sumber daya manusia menduduki posisi penting dalam suatu sekolah dalam hal ini adalah penyedia layanan pendidikan atau organisasi karena setiap organisasi terbentuk oleh orang-orang, menggunakan jasa mereka, mengembangkan keterampilan mereka, mendorong mereka untuk berkinerja tinggi, dan menjamin mereka untuk terus memelihara komitmen pada organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem Sumber Daya Manusia dapat mendukung keunggulan kompetitif secara terus menerus melalui pengembangan kompetensi SDM dalam organisasi termasuk dalam peningkatan mutu pendidikan tersebut.

b. Tercipta sistem sekolah berbasis gugus yang efektif dalam mendukung pengembangan metode pembelajaran berkesinambungan bagi guru.

Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) dirancang dalam bentuk berbagai program kegiatan yang berupa pelatihan maupun worksop tentunya dalam hal ini melibatkan semua pihak baik itu kepala sekolah, guru, murid, pengawas pendidikan, maupun wali murid itu sendiri, banyaknya *stakeholder* yang terlibat memungkinkan terlaksananya sebuah

program yang terorganisir dengan baik, untuk itu memerlukan sebuah wadah yang menampung semua *stakeholder* tersebut dalam sebuah paguyuban atau yang disebut dengan PSBG (Pusat Sumber Belajar Gugus), sehingga tujuan dari program DBE2 ini untuk lebih menjaga keberlanjutan dalam peningkatan mutu pendidikan bisa cepat terlaksana, karena dalam PSBG (Pusat Sumber Belajar Gugus) selain dilengkapi dengan berbagai referensi pembelajaran juga adanya : Pengembangan Jaringan Gugus Sekolah Untuk Menghubungkan Sekolah Dengan Jaringan Global, laporan mutu sekolah Dengan adanya informasi LMS (Laporan Mutu Sekolah), orang tua siswa, masyarakat setempat, serta wakil-wakilnya diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan pemilihan pendidikan sekolah, serta partisipasi dan kontribusi mereka terhadap arah sekolah ke depan dapat meningkat, serta Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan proses pembelajaran.

Oleh karena itu Dalam era yang penuh dengan perubahan, lingkungan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia sangatlah menantang, perubahan muncul dengan cepat dan meliputi masalah-masalah yang sangat luas, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia terutama dalam hal ini adalah penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas adalah sebagai berikut (a) perekonomian dan perkembangan teknologi, dalam hal ini adalah adanya peralatan teknologi informasi utamanya computer

dan internet untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran (b) ketersediaan dan kualitas tenaga kerja, dalam hal ini adalah tersedianya jasa dan sarana prasarana dalam mendukung kesinambungannya layanan pendidikan dalam menciptakan pendidikan yang bermutu, dengan adanya penilaian dan evaluasi berkala yang mampu meningkatkan kinerja semua pihak dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu mengelola Sumberdaya manusia menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagi keberhasilan suatu organisasi, kegagalan dalam mengelolanya akan berdampak pada kesulitan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program *Decentralized Basic Education (DBE2) Di Kabupaten Nganjuk.*

Dalam pelaksanaan program *Decentralized Basic Education (DBE2)* yang dilaksanakan di kabupaten Nganjuk melalui 2 (dua) sekolah sebagai gugus inti dari pelaksanaan program hingga akhir pelaksanaan program tersebut banyak faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun penghambat program tersebut.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui desentralisasi pendidikan sebagai salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini

dirisaukan oleh berbagai pihak utamanya di kabupaten Nganjuk sendiri, ada beberapa hal yang mempengaruhi baik secara positif maupun negatif baik dari dalam maupun dari luar program tersebut, upaya tersebut diantaranya:

a). Faktor Internal

Faktor internal mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan baik oleh pemimpin maupun anggota organisasi bersangkutan, utamanya dalam peningkatan mutu pendidikan yang terdiri dari kehidupan itu terdiri dari unsur-unsur guru, murid, sarana pembelajaran, alat ukur atau evaluasi, metode, hal ini akan menentukan keberhasilan sebuah program kegiatan tersebut dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah :

- 1). Mampu menyelenggarakan pendidikan secara memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.

Setiap program mempunyai tujuan bahwa program tersebut nantinya akan berdampak pada sasaran yang akan diinginkan, dengan demikian diperlukan sebuah wahana yang berfungsi untuk memfasilitasi keberlangsungan program tersebut baik itu pada tahap awal perencanaan sampai implementasi dan penilaian, serta dengan di dukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran program tersebut, baik itu sebagai pusat yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan

sebagai tempat pertemuan membahas berbagai rencana kegiatan di gugus (fungsi pertemuan), sebagai tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pelatihan untuk guru (fungsi pengembangan profesional), tempat untuk mengembangkan materi pembelajaran dan alat peraga murah (fungsi produksi), serta menjadi wahana mengakses sumber pembelajaran baik berupa buku, CD multimedia maupun secara online mengakses sumber pembelajaran di Internet (sebagai fungsi informasi), hal ini dimungkinkan untuk merumuskan dan secara langsung mengimplementasikan program dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,

- 2). Memberdayakan personil dan lembaga, antara lain melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional.

Sumber daya manusia merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat menentukan dalam suatu organisasi, dan perlu terus dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya, program DBE2 ini juga telah mengembangkan program-program pelatihan diantaranya adalah adapun Program-program kegiatan yang dibina oleh DBE2 yang mengupayakan peningkatan sumberdaya manusia pendidikan diantaranya adalah: Pelatihan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan komitmen bahwa Menyadari betapa

pentingnya peran komputer dalam mendukung kegiatan pembelajaran, maka DBE 2 memandang penting untuk membekali para guru sebagai agent perubahan untuk melek komputer. Guru diberikan pelatihan tentang cara-cara pengoperasian komputer hingga pembuatan bahan ajar maupun presentasi dengan computer selain itu juga program Pelatihan DALI (*Developing Active Learning With ICT*) dngan tujuan memberikan bantuan teknis berupa paket pelatihan pengembangan pembelajaran aktif dengan menggunakan perangkat TIK, program-program pelatihan ini tidak hanya ditujukan pada guru saja tetapi juga kepala sekolah, komite sekolah, dan pengawasa pendidikan setempat hal ini dimungkinkan untuk mengembangkan program ini seluas mungkin dan akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

b). Faktor Eksternal

Program itu berada dalam lingkungan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana program tersebut diterapkan berada misalnya dalam hal ini adalah stakeholders (tidak termasuk masyarakat), orang tua/ wali murid, lingkungan, dunia usaha, lembaga pendidikan atasnya atau perguruan tinggi. Agar program itu dapat melaksanakan misi dan tujuan maka ia harus memperhitungkan faktor lingkungan maupun faktor eksternal dalam penerapan program tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

- 1). Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang ada sekarang ini.

Untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten Nganjuk khususnya DBE2 juga menyelenggarakan paket pelatihan dengan mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi yang menghasilkan guru SD, agar adanya suatu relevansi dengan Program-program pendidikan yang ditetapkan pemerintah kabupaten Nganjuk melalui pemerintah pusat yang memegang mempunyai tujuan mampu menyelenggarakan kualitas pendidikan yang bermutu, aktif, efektif dan menyenangkan. Menyiasati agar ada relevansi antara mutu yang dimaksud oleh pelanggan, dalam hal ini sekolah, maka harus ada kerja sama antara sekolah dengan pihak pengguna pendidikan dalam penentuan dan pembuatan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah.

Berdasarkan pengalaman, pelaksanaan program disentralisasi yang belum matang juga melahirkan berbagai persoalan baru, baik itu dari dalam maupun dari luar program tersebut, diantaranya adalah :

a). Faktor Internal

Yang merupakan faktor dari tubuh pelaksanaan program tersebut dikarenakan belum matangnya sumberdaya yang ada diantaranya adalah:

1. Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam di karenakan perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial, dalam hal ini adalah keterbatasan sumber daya yang ada dalam rangka pengembangan dan pembekalan dalam mengimplementasikan suatu program dengan baik. Program DBE2 hanya didukung oleh 2 MTT yang pada saat bersamaan juga mempunyai tugas kedinasan karena tanggung jawab yang diemban memang banyak, karena didalam sebuah organisasi besar tentunya diperlukan sebuah sumber daya yang besar dan memadai dengan kualitas yang sama sehingga bisa saling melengkapi, selain itu juga
2. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua) menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurun dari waktu sebelumnya, sehingga akan menurunkan motivasi dan kreatifitas tenaga kependidikan di sekolah untuk melakukan pembaruan, dalam hal ini permasalahan anggaran dan juga biaya pendidikan sudah biasa diatasi untuk melancarkan serta menciptakan suatu program pembelajaran yang efektif dan berkesinambungan tetapi keterlambatan dan kemacetan distribusi

pencairan dana dari pusat membuat tujuan pendidikan yang diinginkan menjadi menurun dan terkadang hanya jalan ditempat.

b). Faktor Eksternal

Sebuah pelaksanaan program yang diterapkan kepada sebuah sasaran tertentu tentunya juga akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial sekitar, karena faktor lingkungan sosial tersebut tidak dapat diabaikan oleh para pelaksana program. Hal ini dapat dipahami sebuah program dirumuskan dan dilaksanakan untuk kepentingan tertentu dan dengan karakter yang berbeda-beda pula. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1). Sosialisasi kepada masyarakat

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama dalam hal ini adalah wali murid ketika program ini akan diterapkan pada saat awal pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2), Jadi dapat dikatakan bahwa Dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangatlah penting dalam proses peningkatan mutu pembelajaran. Masyarakat orang tua dan mungkin para tokoh masyarakat setempat yang tergabung dalam forum Komite Sekolah dan para pengurus forum gugus sekolah mempunyai peranan penting dalam merancang program pelatihan. Mereka dapat memusyawarahkan kebutuhan pelatihan, berbagai sumber yang bisa dimanfaatkan. Masyarakat dapat juga

memberikan dukungan dalam bentuk dana, sumber daya manusia dan pemikiran. Kalau semua dirancang berdasarkan kebutuhan sesungguhnya, memanfaatkan nara sumber yang ada, pelatihan akan menjadi lebih efektif dan berkesinambungan.

2). Persaingan antar sekolah.

Kesenjangan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya dalam hal penganggaran pendidikan serta prestasi didalam maupun luar sekolah membuat para stakeholder pendidikan selalu bersaing dan berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik, namun kadang kesenjangan tersebut bukan malah diartikan positif untuk mencadi cerminan yang lebih baik tetapi malah menjadi negatif karena ide peningkatan mutu pendidikan tidak bisa menjadikan mereka bersatu untuk bagaimana bergotongroyong membiayai pendidikan serta merumuskan suatu ide cemerlang yang bisa menyatukan semua stakeholder, karena kesenjangan dan kurang memahami bahwa prestasi itu didapat dari kerja keraslah ide peningkatan mutu pendidikan dijadikan ajang persaingan untuk meningkatkan kemampuan individu bukan untuk menjadikan sebuah pendidikan yang berkelanjutan dimasa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan oleh penulis tentang program *Decentralized Basic Education* (DBE2), yang dilakukan pemerintah kabupaten Nganjuk dengan SDN kutorejo 1 Kertosono dan SDN 4 Tanjunganom sebagai gugus inti pelaksanaan program dan gugus imbas 1, yaitu sebagai berikut

1. Program *Decentralized Basic Education* (DBE2) di Kabupaten Nganjuk berkembang lebih jauh untuk menciptakan sistem sekolah berbasis gugus yang efektif untuk mendukung pengembangan metode pembelajaran berkesinambungan bagi guru. Dengan dunia pendidikan yang lebih terkonsep, dalam lima tahun sudah bisa kerja secara *Local Teacher Training*. Selain itu setiap gugus memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan profesi guru di Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG), dalam hal ini di pusatkan di Kertosono yakni SDN Kutorejo 1 dan di Tanjunganom yakni SDN 4 Tanjunganom (imbas 1) yang dalam hal ini Pusat Sumber Belajar Gugus PSBG berada di SDN 2 Tanjunganom serta aset berupa sumber daya manusia yang sudah terlatih yakni *master teacher trainner* (MTT), pemandu bidang studi (PBS), tim teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

2. Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) sebagai unit pelayanan teknis pembelajaran yang mendukung peningkatan mutu pendidikan dapat digunakan oleh para guru, kepala sekolah serta tenaga kependidikan lainnya untuk berinteraksi dengan berbagai sumber belajar dalam mengembangkan kreatifitas pembelajarannya.
3. Program Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Decentralized Basic Education* (DBE 2) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru Sekolah Dasar (SD) menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran aktif. Tujuan ini ditempuh melalui dua program inti TIK *Decentralized Basic Education* (DBE 2):
 - a). *Intel Teach Getting Started*
 - b). Pelatihan DALI untuk guru
4. Paket pelatihan terakreditasi Agar pelatihan ini memberi dampak perubahan nyata dalam pembelajaran di sekolah, pelatihan ini dirancang untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dan institusi kependidikan yang terkait dengan pengembangan sekolah Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan mereka mempunyai visi yang sama, ada rasa memiliki dan memberikan dukungan untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

5. Program membaca di Kelas, *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk, bekerjasama dengan para tenaga pendidik untuk membangun budaya membaca di lingkungan Sekolah Dasar. Program ini memfokuskan pada penyediaan materi baca (buku non-teks) di kelas 1–3 di semua sekolah binaan *Decentralized Basic Education* (DBE2) kabupaten Nganjuk.
6. Seperti tujuan awal program *Decentralized Basic Education*), telah dilaksanakan di kabupaten Nganjuk dengan 2 (dua) sekolah sebagai inti program atau tempat Pusat Belajar Gugus (PBS), SDN Kutorejo 1 Kertosono dan SDN 4 Tanjunganom sebagai SD imbas 1 yang Pusat Belajar Gugus (PBS) berada di SDN 2 Tanjunganom serta kurang lebih 20 sekolah yang telah dibina oleh program tersebut, tujuan utama dari program tersebut adalah untuk mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar di kabupaten Nganjuk khususnya melalui serangkaian pendekatan inovatif yang dirancang untuk memperkuat pelatihan guru dan meningkatkan lingkungan belajar di sekolah.
7. DBE2 melakukan pengembangan kegiatan “*ClusterNet (Cluster Network)*” sebagai upaya untuk pembangunan jaringan internet dan jaringan lokal di gugus (*cluster*).
8. Dengan adanya informasi LMS (Laporan Mutu Sekolah), orang tua siswa, masyarakat setempat, serta wakil-wakilnya diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait

dengan pemilihan pendidikan sekolah, serta partisipasi dan kontribusi mereka terhadap arah sekolah ke depan dapat meningkat.

9. Dalam pelaksanaan program DBE2 ini banyak pencapain yang ditunjukkan oleh sekolah hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa stakeholder dan bantuan pihak lainnya, tetapi juga ada sedikit kendala saat program ini pertama kali akan dilaksanakan, baik itu secara internal maupun eksternal, faktor-faktor tersebut antara lain:

- a). Faktor internal

- a. Lokasi atau tempat penerapan inti program

Dalam hal ini terdapatnya Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG) yang terletak di Kertosono dan Tanjunganom yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai tempat pertemuan membahas berbagai rencana kegiatan.

- b. Sarana dan prasarana program

Fasilitas yang dilengkapi dengan perangkat elektronik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti televisi, pemutar CD dan DVD, komputer (laptop dan desktop), proyektor LCD, berbagai buku bacaan dan cerita, alat peraga dan olahraga.

- c. Sumber Daya Manusi (SDM) dari pelaksana program

Dalam pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2), banyak sumberdaya manusia yang mendukung kelancaran program tersebut terutama dari Dinas Pendidikan setempat yang mendukung, serta pengawas pendidikan yang dalam hal ini sebagai MTT (*Master Teacher Trainer*).

a). Faktor eksternal

- a. Relevansi dengan Program-program pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten Nganjuk.

Selain beberapa dukungan yang diberikan sehingga program *Decentralized Basic Education* (DBE2) di kabupaten Nganjuk melalui SDN 1 Kutorejo Kertosono dan SDN 4 Tanjunganom (imbas 1) yang berlangsung sejak tahun 2006 hingga tahun 2011 juga terdapat beberapa hambatan antara lain:

a). Faktor Internal

- a. Dalam pelaksanaan program tersebut sumberdaya yang menyangkut MTT (*Master Teacher Trainer*) hanya terdapat dua orang dan keduanya merangkap sebagai pengawas pendidikan di kabupaten Nganjuk, sehingga ketika ada jadwal kedinasan program pelatihan akan sedikit tertunda karena harus menyesuaikan dengan jadwal yang ada.
- b. Keterlambatan Pencairan Dana, dalam hal ini mengingat bahwa kebutuhan pendidikan itu tidak sedikit apalagi untuk

menjalankan sebuah proyek dalam jangka waktu yang cukup lama, maka diperlukan sokongan dana, Namun dana hibah ini tidak bisa langsung dicairkan harus menunggu kurang lebih setengah semester untuk kemudian menerimanya, sehingga ketika akan diadakannya program kegiatan di PSBG seringkali ditunda dikarenakan keterbatasan sarana dan pra- sarana

b). Faktor Eksternal

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama dalam hal ini adalah wali murid ketika program ini akan diterapkan pada saat awal pelaksanaan program *Decentralized Basic Education* (DBE2).
- b. Di tempatkannya Pusat Pembelajaran Gugus (PSBG), sebagai awal dari berjalannya sebuah program kegiatan dan sangat penting dalam menunjang keberlangsungan suatu program kegiatan karena didalam PSBG dilengkapi dengan peralatan yang menunjang kegiatan yang akan dilakukan oleh para stakeholder.

B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan diatas dan hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten Nganjuk dalam upayanya menerapkan program *Decentralized Basic Education* (DBE2), dalam meningkatkan mutu

pendidikan. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Perlunya dampak yang lebih optimal agar nantinya penyebarluasan program tidak hanya memberikan sebuah hasil secara internal atau dalam lingkup kabupaten Nganjuk sendiri tetapi juga diharapkan menjadi contoh terhadap daerah lain, dengan mengadakan studi banding dengan kabupaten lain yang menerapkan program yang sama, melalui hasil karya siswa, prestasi siswa dan guru serta pengembangan Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG).
2. Pengembangan pusat sumber belajar gugus yang dalam hal ini digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai tempat pertemuan membahas berbagai rencana kegiatan tidak hanya ditempatkan pada satu lokasi saja tetapi juga mencakup seluruh sekolah binaan DBE2, melalui pengaliran rapat pertemuan atau kegiatan lainnya seperti Kelompok Kerja Guru (KKG), pelatihan dan rencana pelatihan agar mengembangkan sistem insentif yang mendorong terjadinya kompetensi yang sehat baik antara lembaga dan personil sekolah untuk pencapaian tujuan pendidikan.
3. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah MTT (*Master Teacher Trainer*) hanya terdapat dua orang dan keduanya merangkap sebagai pengawas pendidikan di kabupaten

Nganjuk, dengan menunjuk beberapa orang lagi untuk menjadi pendamping program melalui rapat yang disepakati, agar nantinya program tetap lancar tanpa menyesuaikan jadwal dengan seorang mentor program.

4. Masyarakat harus lebih banyak dilibatkan terutama dalam hal ini adalah wali murid, dengan disediakan tempat di Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG), kemudian masyarakat dikumpulkan untuk diajak bersama-sama stakeholder lainnya merancang program kegiatan yang nantinya akan bermanfaat bagi sekolah, sehingga masyarakat bisa menyadari bahwa kontribusinya sangatlah diperlukan
5. Pemanfaatan Pusat Sumber Belajar Gugus (PSBG), secara keseluruhan dengan menambah buku-buku pelajaran baik itu kelas 1 sampai kelas 6, bukan hanya buku cerita, siswa kelas 1 sampai 6 dijadwalkan untuk bergiliran belajar sambil memanfaatkan peralatan yang ada misalnya komputer sebagai alat pembelajaran, serta dengan adanya buku-buku pelajaran bisa juga difungsikan sebagai perpustakaan yang bisa digunakan oleh semua murid.
6. Program *Decentralized Basic Education* (DBE2), karena penamaannya menggunakan istilah asing perlu lebih giat lagi dalam mengenalkan kepada masyarakat misalnya melalui spanduk-spanduk atau ditempel pada dinding kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ace, Suryadi. 2003, *Mewujudkan Sekolah-sekolah Yang Mandiri dan Otonom*, disampaikan pada sosialisasi pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah.
- Afifuddin, dan Beni. A. Saebani. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Cahyono, Bambang Tri. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : IPWI Jakarta, 1996
- Depdiknas. 2007. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009*. Jakarta : Pusat Informasi dan Humas Depdiknas.
- Djahidin, 2007. *Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalm Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah.
- Furchan, Arif (I 992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Frederickson. H. George. 1987. *Administrasi Negara Baru*, Cetakan Kedua, Alih Bahasa Al-Ghozei Usman, LP3ES, Jakarta.
- Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 63.
- Hamalik, Hardianto, 2001. *Fungsi dan Karakteristik Pendidikan*, Jogjakarta: Ruzz Media.
- [Http://edukasi.kompasiana.com/2012/09/23/perwajahan-pendidikan-di-indonesia-489304.html](http://edukasi.kompasiana.com/2012/09/23/perwajahan-pendidikan-di-indonesia-489304.html), diakses 13 mei 2013
- [Http://www.geocities.ws/endang.komara/PERANAN_KBK_DALAM_IMPLM ENTASI_OTDA_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.html](http://www.geocities.ws/endang.komara/PERANAN_KBK_DALAM_IMPLM ENTASI_OTDA_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.html), diakses 13 mei 2013
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Kebijakan Publik*. Edisi Kesatu. Jakarta : Universitas Terbuka.

Jayawinata, Jahidin. 2012. *peran MSDM dalam meningkatkan mutu pendidikan*, diakses 9 November 2012 dari <http://jahidinjayawinata61.wordpress.com>.

Kusumanegara, Solahuddin . 2010, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Edisi pertama. Yogyakarta : Gava Media.

Keban, Yeremias, T, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori dan Isu*, Yogyakarta : Gava Media.

Komite Reformasi Pendidikan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Nasional*, (Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2001), h. 154

Lababa, djunaidi. 2008. "*Evaluasi Program Sebuah Pengantari*", diakses pada 3 November 2012 dari <http://evaluasiendidikan.blogspot.com>.

Laporan Mutu Sekolah, DBE2, SDN Kutorejo 1 Kertosono , 2010.

Panduan Praktik Terbaik DBE 2 (*Paket Pelatihan Terakreditasi*) 2010

Mathis R.L dan Jackson J.H, 2002, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Salemba Empat, Jakarta.

Milles, dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press

Mulyasa, E..2006. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Moelong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Nigtisesmito. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Definisi dan Fungsi.*, diakses 7 November 2012 dari <http://www.propotenzia.com>

Panduan *Workshop Penyusunan Draft Surat Keputusan Bersama (SKB), Tentang Pengawasan Pendidikan. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Nganjuk*, 2012.

Panduan Praktik Terbaik DBE 2, 2010.

Panduan Praktik Terbaik DBE 2 *Paket Pelatihan Terakreditasi* 2010.

Panduan, *Succes Story Gugus Sekolah Tanjunganom*, 2010.

Pasalog, Hermani. 2007, *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

- Pasaribu dan Simandjutak, 1982. *Pendidikan nasional (Tinjauan Pedagogik teoritis)*. Bandung : TARSITO.
- Peraturan Pemerintah, 2006. No. 19 tahun 2005 *tentang Standar Nasional Pendidikan*. Bandung : Citra Umbara.
- Pidarta, Made. 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Prajino dan Pranarka, 1980. *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir*, Jakarta : Centre For Strategic and International Studies (CSIS).
- Pusat sumber belajar gugus gugus satu kec. kertosono kab.Nganjuk Pangudiluhur.psbg@gmail.com, Diakses 1 Januari 2013.
- Putra, Fadillah. 2003, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suderadjat, Hari, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, Bandung : Cipta Lekas Garafika, 2005
- Sopater, Sularso, 1998. *Pembelajaran Memasuki Era Kesejagatan*, Jakarta : Pustaka sinar harapan.
- Sugiyono, 2006 . *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Suharsaputra, Uhar. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan*. diakses 7 November 2012, dari <http://uharsputra.wordpress.com>.
- Suharto, edi. 2005. *Analisis kebijakan public panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suzetta, Paskah. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin*. Jakarta: SMERU
- Syafaruddin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi*. Jakarta : Grasindo.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung : Citra Umbara.
- _____.2005. *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta : LeKDIS.

_____. 2006. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bandung : Citra Umbara.

_____. 2006. Undang-undang RI No. 11 tahun 2005 tentang Buku Pelajaran. Bandung : Citra Umbara.

Usaid, 2011. *Pengajaran professional dan pembelajaran bermakna*, diakses 7 November 2012, dari <http://www.dbeindonesia.org>.

V. Paqueo dan J. Lammert, *Decentarlization in Education* (New York: Education Reform dan Management Thematic Goup, 2000), h. 23.

www.nganjukkab.go.id/ Pemkab Nganjuk /2010... Profil Nganjuk, diakses 31 desember 2012.

N.Dunn, William.2003 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Zauhar, Susilo. 2001. *Administrasi Publik*. Universitas Negeri Malang

_____.1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*.Malang: IKIPMALANG.

